



Editor: Moh Suardi

Nasfi, Riana Dewi Kartika, Nurjanna Ladjin,
Wasifah Hanim, Sugiartiningsih,
Rosdiana Sijabat, Happy Susanto, Suhatman,
Marissa Silooy, Alfiana, Siti Mardiana,
Helin G Yudawisastra, Ni Wayan Novi Budiasni

EKONOMI PEMBANGUNAN

BOOK CHAPTER
EKONOMI PEMBANGUNAN

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PENERBIT
INSAN CENDEKIA MANDIRI
Publisher of educational books

BOOK CHAPTER

EKONOMI PEMBANGUNAN

Nasfi

Riana Dewi Kartika

Nurjanna Ladjin

Wasifah Hanim

Suglartiningsih

Rosdlana Sijabat

Happy Susanto

Suhatman

Marissa Silooy

Alfiana

Siti Mardiana

Helin G Yudawisastra

NI Wayan Novi Budlasni

Book Chapter
Ekonomi Pembangunan

Nasfi, dkk.

Editor:
Moh Suardi, M.Pd.E.

Desainer:
Mifta Ardila

Sumber:
www.insancendekiamandiri.co.id

Penata Letak:
Reski Aminah

Proofreader:
Tim ICM

Ukuran:
viii, 213 hlm., 15.5 x 23 cm

ISBN:
978-623-348-371-1

Cetakan Pertama:
Oktober 2021

Hak Cipta 2021, pada Nasfi, dkk.

Isi diluar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 020/SBA/02

PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0813-7272-5118

Website: www.insancendekiamandiri.co.id

www.insancendekiamandiri.com

E-mail: penerbitbic@gmail.com

Daftar Isi

Prakata — vii

BAB 1

SEJARAH EKONOMI PEMBANGUNAN DI INDONESIA — 1

Dr. (C) Nasfi, S.E., M.M., M.E.CRBD.

BAB 2

KINERJA DAN PERSAINGAN INDUSTRI — 19

Riana Dewi Kartika, S.E., M.M.

BAB 3

**KETERKAITAN ANTARA SEKTOR PERTANIAN DAN
PEMBANGUNAN — 31**

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si.

BAB 4

MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN — 49

Wasifah Hanim

BAB 5

**KEBIJAKAN SWASEMBADA BERAS DALAM PEREKONOMIAN
INDONESIA — 63**

Dr. Sugiarti Ningsih, S.E., M.Si.

BAB 6

DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA — 81

Rosdiana Sijabat, S.E., M.Si., Ph.D.

BAB 7
INOVASI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI MASA
PANDEMI — 95
Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA.

BAB 8
KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN — 111
Dr.(C) Suhatman, S.Pd., M.Si.

BAB 9
ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN —125
Marissa Silooy, S.E., M.M., CRA.

BAB 10
STABILITAS SISTEM KEUANGAN — 143
Dr. Dra. Alfiana, M.M.

BAB 11
SINERGI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (TIK) BERSAMA
UMKM MENUJU KEBANGKITAN EKONOMI PASCA
PANDEMI — 159
Dr. Siti Mardiana, M.T., M.S.I. S.eC.

BAB 12
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN — 175
Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si.

BAB 13
PERBANKAN DI INDONESIA DI MASA KRISIS — 203
Ni Wayan Novi Budiasni, S.E., M.M.

Prakata

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesejahteraan kepada kami semua, Buku ini merupakan gabungan penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang disusun dengan secara sistematis dan rapi untuk kepentingan bahan ajar kuliah ataupun referensi bagi kalangan masyarakat.

Sejarah ekonomi Indonesia sejarah hilangnya kesempatan, dalam catatan sejarah bahwa nasionalisme ekonomi Indonesia terdapat pada dua titik yang ekstrem, titik pertama adalah titik moderat, dimana pendukungnya berkeyakinan mengundang modal dan investasi asing masih diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, dan kutub ekstrem yang kedua adalah para nasionalis yang menekankan pentingnya memajukan bisnis para pengusaha pribumi, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing sebagai upaya membebaskan diri dari kekangan imperialis, dan meningkatkan peranan perusahaan negara untuk membangun industri nasional.

Dalam membangun ekonomi Indonesia tidak lepas dari pembangunan industri dari struktur hingga kinerja dan daya saing, dalam meningkatkan daya saing industry perekonomian harus dapat menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan permintaan konsumen, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memberikan kesempatan bagi investasi asing maupun domestik

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Padang, September 2021

Penulis

BAB 1

SEJARAH EKONOMI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Dr. (C) Nasfi, S.E., M.M., M.E.CRBD.

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Sabwa, Padang Panjang

nasfi.anwar@gmail.com

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bentuk yang diinginkan sesuai yang direncanakan, di mana pembangunan yang direncanakan lebih dirasakan secara rasional bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dalam taraf berkembang (Jhingan, 2016). Pembangunan secara umum diarahkan di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi maupun politik dengan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam kelompok masyarakat dengan lebih kondusif demi pembaharuan, pembinaan maupun pembangunan masyarakat. Pembangunan ekonomi salah satu programnya adalah pengembangan motivasi untuk bergairah berusaha yang bersifat kondusif. Namun yang lebih jadi perhatian pemerintah dan pihak terkait bagaimana agar dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pemberian pemahaman, pembinaan dan dorongan bagi masyarakat untuk tetap termotivasi dalam pembangunan ekonomi dengan dorongan energy yang ada (Mulyani et al., 2017).

Terminologi dari kata pembangunan ekonomi (*economic development*) umumnya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di suatu negara berkembang. Para ekonom mengistilahkan "*Economic development is growth plus change*" (pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan terjadinya perubahan pada struktur dan corak kegiatan ekonomi), di mana keberhasilan suatu pembangunan suatu desa, daerah ataupun negara, bisa dikatakan berhasil bila pertumbuhan

ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi, dengan ukuran produktivitas atau produktivitas di daerah atau negara setiap tahunnya (Nasfi, 2020). Pembangunan terdapat dua unsur pokok; *pertama*, masalah apa yang akan dihasilkan untuk didistribusikan atau dinikmati, *kedua*, masalah manusia yang merupakan aktor pengambil inisiatif yang menjadi garda awal pembangunan. Dengan demikian pembangunan hasil akhirnya ditujukan untuk masyarakat atau manusia itu sendiri, manusia yang kreatif, bahagia, aman dan bebas dari rasa takut (Nasfi, Nagara, 2020).

Pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi pembangunan dapat ditingkatkan dengan adanya penerapan kebijakan maupun peraturan pemerintah melalui kajian di setiap elemen, seperti dari budaya, sosial serta politik. “Proses pembangunan tidak bisa tergesa-gesa, Indonesia butuh melakukan pendekatan konstruktif dari sejarah serta membutuhkan sinergi strategi ekonomi,” ujar Boediono (Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia) dalam *The 4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019* yang diadakan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia dibutuhkan pendekatan konstruktif untuk membentuk sikap yang apresiatif tidak hanya terhadap pembangunan ekonomi namun perlu juga pembangunan non ekonomi. “Sejarah membuktikan negara-negara fokus terhadap tiga hal pembangunan pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur, maka negara tersebut akan sukses di perekonomian” ujar Boediono. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hongkong, China, dan Vietnam adalah negara-negara yang sukses dalam melakukan pembangunan ekonomi secara menyeluruh (Boediono, 2019).

Prof. Hal Hill dari *Australian National University* yang merupakan pakar ekonomi, mengungkapkan kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia akan berhasil diantaranya melalui pembangunan pendidikan, birokrasi dan infrastruktur. “Negara-negara yang melaksanakan pembangunan pendidikan, birokrasi dan infrastruktur secara konsisten dan berkelanjutan akan mencapai kesuksesan dalam pembangunan ekonomi, Indonesia bisa berhasil bila mempelajari negara yang telah sukses di

pembangunan ekonomi tersebut.” Negara-negara sukses di pembangunan ekonomi ini sebenarnya memiliki strategi yang dimiliki oleh Indonesia, dari sektor penting seperti industri, pasar dan finansial. Allaster Cox, merupakan wakil duta besar Australia untuk Indonesia mengatakan, Asia Timur melakukan secara konsisten dan kontinu yang akhirnya pembangunan ekonomi negara tersebut bermakna bagi semua sektor penting. “Bagaimana Indonesia dalam jangka waktu panjang mempersiapkan generasi baru yang sesuai dengan rencana, dalam rangka membangun negeri melalui sumber daya manusia,” ujarnya (LIPI, 2019).

Pembangunan ekonomi menghadapi kendala dan tantangan berupa inklusivitas keuangan menurut (Nugroho, 2019), diantaranya tantangan tersebut; *pertama*, problema kekakuan bisnis perbankan sebagai pelaku dominan di pasar keuangan, menghadapi keterbatasan informasi dalam menyediakan kredit skala kecil kepada usaha kecil menengah akibat peraturan yang rumit dan berbelit dari otoritas keuangan. Operasional perbankan juga secara sosiologis jauh dari karakteristik Usaha Kecil Menengah (UKM) serta rumah tangga miskin yang menuntut informalitas kemudahan dan kecepatan layanan. *Kedua*, tingginya bunga kredit mikro oleh lembaga keuangan non-bank akibat besarnya biaya operasional dan keterbatasan likuiditas serta tidak berkembangnya sistem penjaminan di pasar kredit mikro. *Ketiga*, dominansi perbankan dalam mobilitas tabungan dan *distorsi* pasar akibat intervensi subsidi bunga program kredit mikro pemerintah, di mana situasi ini menyebabkan kompetisi yang tidak adil antara perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sementara di bagian lain keterkaitan operasional baik pola *channeling* dan *executing* tidak berjalan baik antara keduanya (Nugroho, 2019).

Ditelusuri dari sejarah perkembangan ekonomi pembangunan Indonesia semenjak zaman penjajahan Belanda termasuk dalam setelah berakhirnya Perang Dunia (PD) II, di mana perhatian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat kurang, baik bagi negara yang menjajah maupun negara yang kena jajah. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara disebabkan oleh; *pertama*, sebelum Perang Dunia II

sebagian negara sedang berkembang dan sedang dijajah, di mana negara penjajah memikirkan mencari keuntungan dari negara jajahan. *Kedua*, kurangnya perhatian pemerintah atau pemimpin negara jajahan dalam pembangunan ekonomi, di mana pemerintah atau pemimpin negara memikirkan bagaimana negara mereka bisa merdeka. *Ketiga*, para ekonom saat itu bagaimana mereka berfikir dan menganalisis pembangunan ekonomi, di mana saat itu masalah pembangunan ekonomi terbatas dan pemikiran ekonom saat itu pembangunan ekonomi jangka pendek (Arsyad, 2020). Setelah PD II berakhir sejarah maupun dari era orde lama, orde baru serta sampai era Presiden Joko Widodo periode kedua Juli 2021 ini, masalah pembangunan ekonomi berkembang dan tumbuh secara pesatnya. Di mana ada beberapa faktor penyebab berkembangnya pembangunan ekonomi terutama Indonesia, *pertama*, berkembang cita-cita mengejar ketinggalan ekonomi dari negara-negara maju setelah selama ini dijajah, di mana pembangunan ekonomi merupakan hal yang mendesak dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. *Kedua*, berkembangnya perhatian negara-negara terhadap pembangunan ekonomi, dengan pertimbangan lain ingin mendapatkan dukungan secara ideologi dari negara-negara maju baik dari blok barat maupun blok timur, bantuan berupa hibah, teknis, tenaga ahli maupun pinjaman (*loan*) (Arsyad, 2020).

Membahas antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi terutama mahasiswa dan mereka yang kurang mendalami, dan mereka menganggap hal itu sama, atau mereka dalam mendefinisikan atau mengartikannya sama, padahal antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan dua hal yang sama kata, namun artinya berbeda. Istilah yang berakar dari ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi yang dijabarkan dalam buku ekonomi pembangunan ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan awal, ke depan memang masih harus ditinjau dan dilakukan penyesuaian atas perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam kancah kajian ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi terutama sejarah ekonomi pembangunan. Kenapa perlu dikaji sejarah ekonomi pembangunan

dalam buku ekonomi pembangunan ini, tujuannya untuk bisa diterapkan dalam peningkatan pemahaman para pembaca dan yang membutuhkan pemahaman mendalam, bagaimana ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dan negara dengan tindakan pembangunan ekonomi.

B. Pembangunan, Ekonomi Pembangunan, dan Pembangunan Ekonomi

Pemahaman kita sering terjebak dari istilah pembangunan, ekonomi pembangunan, dan pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah, jika didalami masing-masing indikator maupun definisinya sangat jauh perbedaan. Bila artikan pembangunan adalah perubahan atau transformasi ekonomi, sosial maupun budaya secara terstruktur maupun terencana melalui suatu kebijakan dan strategi yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (Tikson, 2005). Sedangkan Siagian (1994) dalam (Mulyani et al., 2017) mendefinisikan pembangunan adalah suatu kegiatan maupun usaha dalam rangka mencapai pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan kemudian dilakukan secara benar dan sadar oleh negara atau pemerintahan beserta masyarakatnya dalam rangka menuju moderitas dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh negara maupun pemerintah bersama-sama masyarakatnya, berdasarkan rencana yang telah disusun untuk mencapai perubahan ekonomi ke yang lebih baik dan sejahtera untuk masyarakatnya.

Apa itu ekonomi pembangunan, di mana diperoleh jawaban ringkas dari para ahli *“Economic development is a development of the economic welfare of a country or region for the welfare of its people. The study of economic development is also known as development economics.”* (Pembangunan ekonomi merupakan suatu pembangunan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Ilmu yang membahas mengenai pembangunan ekonomi disebut juga ekonomi pembangunan) (Witjaksono, 2014). Dari kutipan Witjaksono

(2014) di atas, maka didapat dua definisi secara bersamaan, baik definisi pembangunan ekonomi maupun ekonomi pembangunan tersebut;

1. Pembangunan Ekonomi adalah suatu rangkaian proses pembangunan yang dilakukan oleh negara atau daerah dalam rangka mengadakan perubahan untuk memakmurkan atau menyejahterakan masyarakat negara atau daerah tersebut.
2. Ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang studi atau ilmu yang membahas tentang pembangunan ekonomi suatu wilayah negara atau daerah.

Pembangunan ekonomi merujuk pada upaya meningkatkan standar kehidupan masyarakat suatu negara, terkait dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dari ekonomi itu sendiri bagaimana menuju ekonomi modern untuk mencapai kesejahteraan masyarakat suatu negara tersebut, pembangunan ekonomi mencakup proses dan kebijakan yang diterapkan negara untuk memperbaiki ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial masyarakat negara tersebut atau negara itu sendiri (Witjaksono, 2009). Ekonomi pembangunan merupakan hal atau alat atau suatu cabang ilmu ekonomi untuk tujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara bekas jajahan agar suatu negara tersebut bisa membangun lebih cepat serta tidak jauh ketinggalan perekonomiannya dari negara-negara maju (Mulyani et al., 2017).

Pemahaman serta definisi dari ekonomi pembangunan di atas, jelas tujuan dari analisis ekonomi pembangunan di Indonesia diantaranya tujuan untuk:

1. Memecahkan masalah-masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang.
2. Memecahkan faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembangunan di Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang.
3. Melahirkan atau menemukan teori maupun pendekatan yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah ekonomi pembangunan yang dihadapi Indonesia sebagai negara

berkembang, tujuan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari dan memperdalam tentang permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, baik itu pembangunan sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Dengan demikian, akan dicoba membahas dan menjelaskan di bagian berikut tentang sejarah ekonomi pembangunan, karena ekonomi pembangunan merupakan suatu ilmu atau bidang ilmu, bagaimana peran dan sejarahnya di Indonesia dalam rangka terlaksana pembangunan ekonomi dari teori dan ilmu yang dilahirkan.

Sejarah Ekonomi Pembangunan dari Zaman Penjajahan sampai Era Reformasi Periode Kedua Presiden Joko Widodo

Ekonomi pembangunan Indonesia merupakan suatu cabang ilmu yang membahas pembangunan ekonomi di wilayah negara Indonesia atau di daerah-daerah Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas sebelumnya, dengan demikian kita akan coba membahas perkembangan atau sejarahnya mulai dari zaman sebelum kemerdekaan atau zaman penjajahan sampai era kedua Presiden Joko Widodo. Untuk itu sejarah atau perkembangan ekonomi pembangunan akan dibagi menjadi 5 (lima) perkembangan; 1) sebelum kemerdekaan, 2) orde lama, 3) orde baru, dan 4) orde reformasi Periode Kedua Presiden Joko Widodo.

1. Ekonomi Pembangunan Masa Sebelum Kemerdekaan

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mengendalikan perekonomian Indonesia berdasarkan analisis ekonomi pembangunan, terjadi monopoli dilakukan oleh VOC sejak tahun 1620 dari analisis ekonomi pembangunan, akibatnya perekonomian bangsa Indonesia dikendalikan oleh VOC, kekuasaan VOC berakhir tahun 1795 dan VOC bubar karena kegagalan mengeksplorasi kekayaan Indonesia. Pendudukan Inggris (1811-1816), analisis dilakukan oleh ilmu ekonomi pembangunan bahwa Inggris menerapkan *Landrent* (pajak tanah). Inilah imperialisme modern, tanah negara yang dijajah

dikuasai dan dieksplorasi kekayaan alamnya. Berdasarkan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain:

- a. Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah masyarakat yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang masyarakat tidak produktif menghasilkan jasa di mana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris berniat negara yang jajahannya terjadi kemakmuran di perekonomian, tujuan Inggris agar negara yang dijajah masyarakatnya bisa membeli produk-produk Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).
- b. Adam Smith berpendapat bahwa peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.
- c. *The quantity theory of money* adalah situasi ekonomi terjadi naik atau turun tingkat harga yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang cuma seumur jagung di Hindia Belanda.

Setelah penjajahan Inggris, maka perekonomian Indonesia dari analisis ekonomi pembangunan di kuasai Belanda kembali, perekonomian Indonesia berdasarkan mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Pemerintahan Belanda mendapatkan sewa tanah dari penduduk Indonesia tanpa pemerintah Belanda melakukan kegiatan mengharap tanah, menurut ekonomi pembangunan biaya makin besar maka terjadi peningkatan penderitaan masyarakat Indonesia, sesuai teori Karl Marx, bahwa nilai lebih akan meningkatkan kesejahteraan Belanda, sedangkan masyarakat yang dijajah menderita.

Belanda mengubah system perekonomian Indonesia, berdasarkan analisis menjadi liberal (pintu terbuka) yaitu, keinginan Belanda mengubah nasib warga pribumi atau

Indonesia ke arah lebih baik, dengan mengubah kebijakan ekonomi, dari analisis ekonomi pembangunan sistem perekonomian Belanda di Indonesia, yaitu berdasarkan teori-teori mazhab klasik, antara lain:

- a. Swasta mengelola perkebunan swasta dan pribumi sebagai penggarap tanah.
- b. Prinsip keuntungan absolut, bila harga barang di atas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba besar.
- c. *Laissez faire laissez passer*, merupakan system perekonomian diserahkan kepada pihak swasta namun peran penting tetap dipegang pemerintah Belanda.

Pendudukan Jepang (1942-1945), kebijakan ekonomi di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi pembangunan adalah pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak masuk pasukan Jepang dalam perang Pasifik dengan sistem ekonomi sosialis ala bela tentara Dai Nippon. Perombakan struktur ekonomi masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan kekurangan pangan masyarakat Indonesia. Segala hal diatur oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan oleh pemerintah Jepang untuk memenangkan perang Pasifik.

2. Ekonomi Pembangunan Masa Ode Lama

Berdasarkan analisis ekonomi pembangunan masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950), pembangunan ekonomi Indonesia semakin buruk, inflasi sangat tinggi, uang beredar lebih dari satu mata uang (mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang). Pemerintah RI pada Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas baru berupa uang ORI (Oeang Republik Indonesia) untuk mengganti uang Jepang. Teori ekonomi moneter mengatakan semakin banyaknya jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Berdasarkan analisis ekonomi pembangunan, untuk meningkatkan pembangunan Indonesia dilakukan;

- a. Juli 1946, pemerintah Indonesia melakukan program pinjaman Nasional dilaksanakan kementerian keuangan.
- b. Pemerintah RI mengadakan diplomasi beras ke India, melaksanakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika. Menembus Blokade Belanda di Sumatera untuk tujuan Negara Singapura dan Negara Malaysia.
- c. 19 Januari 1947, Pemerintah Indonesia membentuk *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi).
- d. Tahun 1948, pemerintah Indonesia melakukan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera), ke bidang-bidang produktif.
- e. Pembangunan ekonomi di Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi dengan Mazhah Fisiokrat, yaitu usaha swasembada pangan dilaksanakan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kegiatan pemerintah swasembada pangan, dengan tujuan perekonomian akan membaik di sektor pertanian merupakan sumber kekayaan.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957), dari analisis ekonomi pembangunan perekonomian Indonesia menggunakan prinsip-prinsip liberal, di mana perekonomian diserahkan pada pasar. Dari analisis ekonomi pembangunan diketahui pengusaha pribumi masih lemah dan mereka pengusaha tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, terutama pengusaha keturunan (Cina). Sistem Demokrasi Liberal berakibat memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru mencapai merdeka. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia, antara lain:

1. Pada 20 Maret 1950, yaitu kebijakan pemotongan nilai uang (*sanering*) dikenal dengan Gunting Syarifuddin, tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Pada Kabinet Natsir dikenal dengan Program Benteng, yaitu kebijakan untuk menumbuhkan wiraswastawan asli Indonesia dan kebijakan mendorong importir nasional, tujuan agar pengusaha pribumi mampu bersaing dengan perusahaan impor asing dengan mengurangi impor barang tertentu dengan izin

lisensi hanya importir asli Indonesia, dan importir tersebut diberikan kredit untuk pengembangan usaha, tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.

3. Pada 15 Desember 1951 dengan UU No. 24 tahun 1951, lahirlah Bank Indonesia yang berasal dari Nasionalisasi De Javasche Bank, di mana Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral maupun sebagai bank sirkulasi.
4. Pada cabinet Ali Sastroamijoyo I yang diprakarsai oleh Iskak Cokrohadisuryo, di mana system perekonomian Indonesia berbentuk Ali-Baba, di mana system ekonomi Ali-Baba ini dengan model dan tujuan berbentuk kerja sama diantara pengusaha non pribumi (Cina) dengan pengusaha asli Indonesia (pribumi).
5. Konferensi Meja Bundar secara sepihak keputusannya dibatalkan, diantaranya pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pembatalan sepihak berakibat pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, namun setelah ditinggalkan Belanda Perusahaan tersebut para pengusaha pribumi tidak mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967), analisis ekonomi pembangunan di mana perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Tujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi, masa ini dikenal juga sistem perekonomian Mazhab Sosialisme. Pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Mazhab Sosialisme, pemerintah belum mampu juga mengatasi pembangunan ekonomi, tindakan pemerintah selanjutnya bagaimana menekan inflasi serta menekan maupun menghemat pengeluaran pemerintah. Masa Demokrasi Terpimpin ini kebijakan pemerintah diantaranya proyek besar dilaksanakan pemerintah dengan negara luar, sehingga perekonomian Indonesia masa itu bisa dibilang berkiblat ke Timur atau sistem ekonomi sosialis dalam politik, ekonomi, maupun dalam bidang lainnya.

C. Ekonomi Pembangunan Masa Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Dari analisis ekonomi pembangunan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia, maka digunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi demokrasi pancasila. Maka, analisis ekonomi pembangunan, di mana pembangunan ekonomi Indonesia dengan menggunakan sistem sesuai teori Keynes, campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antardaerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Di samping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

D. Ekonomi Pembangunan Masa Reformasi Era Periode ke Dua Presiden Joko Widodo

Pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manufer-manufer yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, masalah yang mendesak untuk dipecahkan pemulihan ekonomi Indonesia adalah; 1) penundaan pembayaran hutang sebesar US\$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun, 2) kebijakan privatisasi BUMN, hasil penjualan BUMN menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ekonomi mengurangi Subsidi BBM, dan subsidi dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang kesejahteraan masyarakat. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Masalah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,

birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Sehingga pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Sampai era periode kedua Presiden Joko Widodo, analisis ekonomi pembangunan di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia level 5%, kegagalan pertumbuhan ekonomi di bawah 5% akan berdampak kepada peluang kerja dan terjadinya pengangguran. Di era Pemerintahan Joko Widodo atau periode kedua tahun 2021, arah kebijakan pembangunan ekonomi menurut analisis ekonomi pembangunan yaitu pertama, “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan arah kebijakan umum yang kedua, “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan (Saepudin et al., 2020). Kemudian analisis ekonomi pembangunan Indonesia di perekonomian kesulitan menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), jika gagal mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Periode kedua Presiden Joko Widodo ini sampai Juli 2021, bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (negatif), salah satunya penyebab terdampak dari Pandemi Covid-19 (Basmar et al., 2021).

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. 2020. *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Dua). Universitas Terbuka.
- Basmar, E., Purba, B., Damanik, D., Banjarnahor, A. R., Sipayung, P. D., Hutabarat, M. L. P., Astuti, A., Hendrawati, E., Lie, D., & Simanjuntak, M. 2021. *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Boediono. 2019. *The 4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019*. LIPI.
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*.
- LIPI. 2019. *The 4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019*. LIPI.
- Mulyani, E., Suropto, S., NUZIA, W. Z., & Fatmasari, R. 2017. *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nasfi, N. 2020. Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 54–66.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.8818>
- Nasfi, Nagara, P. 2020. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pedesaan Berwawasan Lingkungan Di Negara Berkembang. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*, 2(1), 55–62.
- Nugroho, A. E. 2019. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. LIPI.
- Saepudin, A., Muryantini, S., & Maghfiroh, H. D. 2020. Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Eksos LPPM*, 2(2), 166–177.
- Tikson, T. D. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Gemilang Persada.
- Witjaksono, M. 2009. Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: Telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1).

Witjaksono, M. 2014. Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam konteks Studi Pembangunan. *Karya Dosen Fakultas Ekonomi UM*.

Tentang Penulis



Dr.(C) Nasfi, S.E., M.M., M.E.CRB.D.

Lahir di Bukittinggi 02 Desember 1969, tamat SDN 02 Sungai Pua tahun 1983, tamat Tsnawiyah Diniyah V Jurai Sungai Pua tahun 1986, tamat SMEA PB Bukittinggi jurusan Akuntansi tahun 1989, tamat Akademi Keuangan dan Perbankan (AKBP) Padang Oktober 1994, Januari 1995 mulai bekerja di Perbankan sampai 26 Juni 2021, Jabatan terakhir di berbagai perbankan mikro Direktur Utama yang dijabat selama 20 tahun. Tahun 1999 transfer ke S1 Manajemen ke UPI “YPTK” Padang tamat Oktober 2001, Februari 2004 tamat Magister Manajemen UPI “YPTK” Padang. September 2018 tamat Pasca Sarjana IAIN Batusangkar Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Agustus 2018 melanjutkan Program Doktor FE Universitas Negeri Padang.

Dosen dari tahun 2005 sampai sekarang dengan Jabatan Lektor, sekarang Dosen tetap Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa di Padang Panjang. Dari 2004 sampai sekarang Nasfi Trainers/Fasilitator LSP Certif dan Trainers di beberapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Nasfi aktif sebagai Reviewer dan Editor di berbagai Jurnal nasional maupun jurnal international. Dengan kepakaran yang dimiliki di Bidang Perbankan dan Manajemen. Buku yang ditulis Manajemen Perubahan, Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Era Revolusi Industri 5.0, Dasar Ilmu Manajemen, Dasar Manajemen dan Kewirausahaan, Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi serta Ekonomi Mikro Islam.

Email Penulis: nasfi.amwar@gmail.com

No Hp/Wa: 081261699199

BAB 2

KINERJA DAN PERSAINGAN INDUSTRI

*Rjana Dewi Kartika, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, Singaraja*

Kondisi persaingan ekonomi pada saat ini sangatlah ketat dan kompleks. Perusahaan dituntut untuk selalu mengerti apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen. Perubahan-perubahan harus terus dilakukan untuk bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan terkait dengan bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan konsumen, persaingan dengan pihak pesaing, dan apa yang terjadi di pasar.

Dewasa ini, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa orientasi produk mengalami pergeseran, di mana sektor jasa mengambil peranan yang semakin penting. Kenyataan yang ada pada masa sekarang ini menunjukkan bahwa konsumenlah yang kini memegang kendali permainan, perusahaan yang ingin tetap *survive* dan berkembang mau tidak mau harus dapat mengikuti selera konsumen. Dalam hal ini kepuasan atas kualitas pelayan menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan.

Menurut Barthwal (2010), ada dua elemen utama ekonomika industri, yaitu elemen deskriptif dan elemen analitis.

1. Elemen deskriptif menyediakan survei industri dan lembaga komersial lainnya untuk memberikan informasi tentang sumber daya alam, iklim industri, kondisi infrastruktur, pasokan faktor produksi, kebijakan industri dan perdagangan, serta tingkat kompetisi di suatu wilayah atau negara kepada pelaku bisnis.
2. Elemen analitis terkait dengan kajian mengenai penentuan strategi/kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam

bisnis, seperti analisis pasar, penentuan harga, pemilihan teknik produksi, penentuan lokasi produksi perusahaan, perencanaan investasi, perekrutan dan pemecatan pegawai, keputusan finansial perusahaan, diversifikasi produk, dan sebagainya. Lebih lanjut Barthwal mengatakan bahwa dua elemen ini saling terkait, dalam hal ini pengambilan keputusan yang tepat dalam organisasi bisnis atau usaha tidak akan tepat tanpa informasi yang mencukupi.

Selain memperhatikan pengambilan keputusan, kualitas pelayanan dalam bersaing di era globalisasi baik industri dagang maupun jasa, perusahaan perlu meningkatkan *performance* di segala bidang. Baik dalam hal peningkatan finansial, sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia, meski sebuah perusahaan telah memiliki finansial yang kuat, bahan baku yang tersedia, memiliki teknologi yang mutakhir, serta ditunjang dengan sistem manajemen yang baik, jika sumber daya manusianya tidak memadai maka seluruh faktor produksi tersebut tidak dapat menjunjung tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini menjadikan sumber daya manusia menjadi salah satu aset penting bagi setiap perusahaan, dapat dikatakan bahwa karyawan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan terwujudnya tujuan suatu perusahaan. Dalam mewujudkan tujuan yang optimal tentunya perusahaan memerlukan kinerja karyawan.

Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri sedekat mungkin dengan kompetisi pasar yang sedang dihadapinya. Perusahaan harus mempunyai kinerja yang baik agar menjadi lebih unggul dalam bersaing dari kompetitornya.

Terkait dengan sebuah perusahaan harus mampu bersaing terhadap kompetitor, salah satunya yaitu mengenai kinerja. Dalam membangun ekonomi kinerja sangat penting sebab jika sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik maka perusahaan akan mampu bersaing di segala situasi.

Kondisi perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, Osoro dan Ogeto (2014) dalam Makori (2015). Kinerja perusahaan sangat bergantung kepada informasi dan kejadian yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Beberapa penelitian

menemukan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi strategi organisasi, struktur, proses dan hasil secara keseluruhan, Goll dan Rasheed (2004) dalam Makori (2015).

Aktivitas bisnis perusahaan yang ada di Indonesia tentunya tidak akan terlepas dari pengaruh kondisi perekonomiannya. Kondisi perekonomian Indonesia yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan ketidakpastian perekonomian Indonesia. Penyebab ketidakpastian kondisi perekonomian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia menyebabkan besarnya tantangan para pelaku ekonomi untuk tetap bertahan dalam bisnis mereka. Beragam faktor yang terdapat pada bisnis mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba antara lain:

1. Menurut teori neoklasik yang digunakan dalam pendekatan SCP mengasumsikan bahwa profit yang tinggi (di atas normal) hanya dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki dan memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk mengendalikan harga dan kuantitas produk yang diproduksi atau dijualnya. Di sisi lain, aliran pemikiran ekonomi lain yang biasa disebut Chicago School menyatakan bahwa profit di atas normal terjadi karena keunggulan biaya atau superioritas efisiensi sejumlah perusahaan yang kemudian meningkatkan derajat monopoli yang dicapainya. Sementara itu, berdasarkan pemikiran aliran Schumpeterian atau Austrian, profit di atas normal dianggap sebagai bentuk dari keberhasilan proses inovasi pada masa sebelumnya. Sebagai tambahan, tingkat profitabilitas memengaruhi keputusan perusahaan untuk tetap berada di dalam pasar atau keluar dari pasar. Tingkat profitabilitas juga memiliki implikasi langsung terhadap struktur pasar, khususnya distribusi jumlah dan skala produsen (penjual).
2. Profitabilitas merupakan ukuran yang tepat bagi tingkat keberhasilan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit. Meskipun demikian, indikator profitabilitas kurang relevan untuk menganalisis kinerja perusahaan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan

profit. Terkait dengan hal ini, indikator pertumbuhan, seperti pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, atau pertumbuhan lapangan kerja mungkin dapat menjadi salah satu alternatifnya. Indikator pertumbuhan juga memiliki kelebihan, yaitu perusahaan dengan skala usaha yang tidak sebanding pada awal periode dapat diperbandingkan.

3. Kualitas produk dapat menjadi indikator yang penting ketika kepuasan konsumen menjadi tujuan utama perusahaan. Indikator ini biasa digunakan dalam analisis yang digunakan oleh lembaga pemerintahan maupun organisasi konsumen.
4. Tingkat perkembangan teknologi sering kali dianggap sebagai indikator kinerja industri yang penting. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi mampu menciptakan dampak yang sangat besar bagi pasar, terutama melalui pengaruhnya terhadap sisi permintaan (selera dan preferensi konsumen cenderung berubah seiring dengan keluarnya produk baru ke pasar) dan sisi penawaran (teknologi dan struktur biaya cenderung berubah ketika terdapat mekanisme produksi baru dan lebih efisien yang berhasil dibangun).
5. Efisiensi dapat dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif terkait jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input tertentu, termasuk terkait pemilihan kombinasi input untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu. Sementara itu, efisiensi alokatif terkait dengan kemampuan pasar dalam memaksimalkan kesejahteraan para pemangku kepentingan dalam pasar tersebut.

A. Mengapa Persaingan Industri Itu Penting

Pada masa sekarang ini, Ekonomi Industri menjadi cabang ilmu ekonomi yang semakin penting untuk dipelajari. Hal ini didasarkan oleh sejumlah hal berikut (dirumuskan berdasarkan Hasibuan, 1993):

1. Praktik-praktik struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis telah dikenal sejak lama, praktik-praktik konsentrasi pasar ini cenderung mendorong terjadinya perilaku pelaku pasar yang menimbulkan berbagai kerugian

bagi konsumen, misalnya dalam hal penetapan harga yang tinggi. Dengan memahami ekonomika industri, konsumen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan menentukan strategi untuk meminimalkan risiko kerugian yang akan ditanggungnya, akibat struktur dan perilaku pasar yang ada.

2. Semakin tinggi konsentrasi industri maka persaingan antarperusahaan akan semakin rendah dan sering kali muncul berbagai hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Hal ini akan semakin mengakibatkan terjadinya inefisiensi perekonomian. Dengan memahami ekonomika industri, kita dapat mengambil strategi maupun kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memengaruhi konsentrasi tersebut dalam rangka mendorong terwujudnya efisiensi perekonomian.
3. Konsentrasi industri yang tinggi berakibat pada adanya konsentrasi kekayaan. Hal ini selanjutnya dapat menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan, baik dalam hal pemerataan pendapatan maupun pemerataan kesempatan kerja (berusaha). Pemahaman tentang ekonomika industri akan memberikan landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan dan membangun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan pembangunan tersebut.
4. Kaitan struktur industri dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi terkait erat dengan intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemahaman mengenai ekonomi industri akan memberi landasan bagi kita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan struktur industri yang mengoptimalkan benefit bagi perekonomian dan menganalisis kebijakan pemerintah apakah yang sekiranya tepat untuk diaplikasikan pada struktur industri yang ada.
5. Kajian-kajian tentang struktur perilaku, kinerja, dan industri tidak terlepas dari masalah-masalah ekonomi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa saja barang dan jasa diproduksi. Dalam hal ini, pemahaman ekonomika industri akan memberi landasan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perekonomian, baik rumah tangga, produsen, pemerintah untuk mengambil keputusannya secara tepat dalam

mendukung terwujudnya tujuan ekonominya, khususnya dalam konteks ini, adalah pencapaian kesejahteraan masing-masing pemangku kepentingan tersebut.

B. Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Persaingan Industri

1. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Ritme pembangunan sektor industri antara satu daerah dengan daerah yang lain cenderung berbeda. Daerah di mana pembangunan sektor industri berjalan pesat adalah daerah di mana ritme sektor industrinya relatif cepat, sehingga menghasilkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, daerah tertentu dengan ritme sektor industrinya lamban, akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal inilah yang membuat ketimpangan pembangunan sektor industri antara satu daerah dengan daerah lainnya. Industri manufaktur adalah satu industri yang menyumbang pertambahan PDB, di mana sektor industri ini sangat potensial untuk dikembangkan. Industri tersebut sangat berkembang di pulau Jawa dan menaikkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di pulau Jawa. Sementara, di luar pulau Jawa, perkembangan sektor industri tergolong lambat sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang berarti untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian, ketimpangan antar daerah menjadi sangat terasa. Daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan industri manufaktur, karena tersedianya bahan baku yang cukup untuk mengembangkan industri tersebut, dan letak geografis yang cukup strategis karena berdekatan dengan negara tetangga sebagai potensi pasar yang lain selain domestik.

2. Investasi yang Kurang Merata

Menurut Harrod-Domar terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kurangnya investasi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Investasi yang rendah berarti produk-

tivitas daerah tersebut juga rendah karena keterbatasan dana untuk pembangunan, seperti misalnya industri manufaktur. Daerah-daerah di pulau Jawa, sekali lagi menjadi wilayah dengan PMDN tertinggi yaitu hampir 66%, Sumatera 16,1%, dan selebihnya untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk investasi PMA sebagian besar dinikmati oleh pulau Jawa yaitu 76%, dan Sumatera 12,4%. Untuk daerah-daerah lain di luar Jawa dan Sumatera investasi hanya sekitar kurang dari 5%. Sehingga informasi-informasi teknologi, manajemen, dan lain-lain yang dibawa oleh pihak asing ke Indonesia bersamaan dengan investasinya, hanya dirasakan oleh dunia usaha yang berada di pulau Jawa (sumber data BPS diolah).

Investasi di daerah mengalami keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Kelanjutan permasalahan pada masa Orde Baru yang masih menganut sentralisasi sehingga daerah-daerah tertentu masih belum siap dengan sistem desentralisasi yang saat ini berlaku.
- b. Kebijakan-kebijakan dan birokrasi-birokrasi yang cenderung menghambat investasi itu sendiri.
- c. Keterbatasan infrastruktur terutama daerah-daerah yang secara geografis sulit untuk dijangkau.
- d. Sumber daya manusia yang masih rendah dan belum siap untuk membangun daerahnya.

3. Rendahnya Mobilitas

Faktor Produksi Mobilitas faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja dan kapasitas antar daerah sangat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendapatan antar daerah. Daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lamban akan mempengaruhi mobilitas antar daerah, karena mekanisme pasar input dan output yang ada akan menentukan mobilitas faktor produksi.

Menurut A. Lewis, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi antar daerah yang optimal akan tercapai dan semua

daerah akan menjadi lebih baik. Jadi, mobilitas faktor produksi akan menyebabkan meratanya potensi antar daerah sehingga tiap-tiap daerah dapat melakukan pembangunan. Hal tersebut yang tidak terjadi di daerah-daerah di Indonesia karena faktor produksi yang potensial hanya terpusat di Jawa.

Perbedaan sumber daya alam sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia sebagai modal awal pembangunan sangat besar dan potensial. Bila ditinjau dari pemikiran klasik, dengan kondisi tersebut seharusnya kemajuan tiap-tiap daerah akan tercapai, dengan asumsi bahwa daerah dengan sumber daya alam yang kaya akan lebih maju dan makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin akan sumber daya alam. Pemikiran tersebut tidak selamanya benar, karena sumber daya alam hanya merupakan modal awal, selanjutnya harus dikembangkan dengan teknologi yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mengelola sumber daya alam tersebut, teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas pada akhirnya akan mengabaikan sumber daya alam yang tersedia, seperti yang kita lihat di negara-negara maju yang miskin sumber daya alam seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.

4. Perbedaan Demografis

Permasalahan selanjutnya yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Indonesia adalah kondisi geografis yang berbeda-beda antar daerah. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, pertumbuhan jumlah penduduk dan aspek-aspek sosial lainnya. Hal tersebut mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, dengan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan permintaan pasar, yang berarti mendorong kegiatan perekonomian. Penduduk yang banyak dengan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang baik, dan memiliki kompetensi yang tinggi akan mendorong penawaran dan meningkatkan produktivitas. Artinya, jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan peningkatan dan pengelolaan sumber daya

manusia yang baik. Jika tidak, jumlah penduduk yang besar justru akan menambah beban pemerintah daerah.

5. Kurang Lancarnya Perdagangan Antardaerah

Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah lebih disebabkan oleh terbatasnya komunikasi dan transportasi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terhambat karena tidak lancarnya arus barang dan jasa di daerah tersebut, jika ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, akibat tidak tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan, maka kegiatan ekonomi komplementer dari barang dan jasa tersebut akan mengalami penurunan, sehingga kegiatan perekonomian akan menurun. Bila dilihat dari sisi penawaran, dengan terbatasnya barang dan jasa sebagai faktor produksi yang dibutuhkan, akan menghambat kegiatan perekonomian dan perekonomian daerah tidak dapat mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Barthwal, R. R. 2010. *Industrial Economics: An introductory textbook*. 2nd Edition. New Delhi: New Age International Publishers Ltd.
- Hasibuan, Nurimansjah. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. Jakarta: LP3ES.
- Harrord, Domar, 1957. *Model Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.

Tentang Penulis



Riana Dewi Kartika, S.E., M.M.

Lahir di Singaraja, 05 April 1993 merupakan dosen di Program Studi Manajemen, STIE Satya Dharma Singaraja. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Laboratorium Singaraja, pada tahun 2011 melanjutkan studi di Jurusan S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dengan mengambil jurusan Akuntansi. Selanjutnya, pendidikan strata dua di Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) pada tahun 2017 dengan mengambil Program Studi Magister Manajemen. Selain mengajar, penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen SDM dan pemasaran., penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Email Penulis: rianakartika683@gmail.com

BAB 3

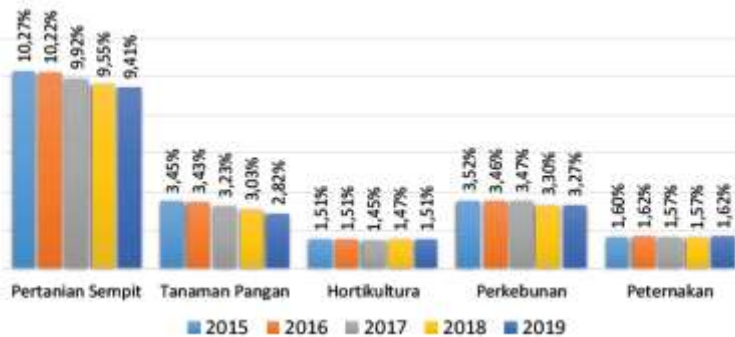
KETERKAITAN ANTARA SEKTOR PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.St.
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
nurjannaladjin@unismuhluwuk.ac.id

Sektor pertanian dalam perekonomian nasional mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi, sosial, dan fungsi ekologi. Fungsi ekonomi sebagai fungsi penyediaan pangan dan kesempatan kerja. Fungsi sosial berkaitan dengan pemeliharaan masyarakat perdesaan sebagai penyangga budaya bangsa. Fungsi ekologi sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup, konservasi lahan dan cadangan sumber air. Di era sekarang ini, pembangunan pertanian lebih berorientasi pada pencapaian nilai tambah, pendapatan, serta kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi sektor modern, efisien, dan berdaya saing, agar mampu berperan sebagai landasan perekonomian nasional.

1. Produk Domestik Bruto Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar PDB Nasional yang masih tumbuh positif di tengah terjadinya wabah Covid-19. Penopang utama pertumbuhan PDB sektor pertanian berasal subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman ini tumbuh 9,23% secara tahunan, diikuti pertumbuhan sektor hortikultura sebesar 0,86% secara tahunan. Sektor tanaman perkebunan meningkat 0,17%, serta sektor peternakan dan jasa pertanian dan perburuan masing-masing sebesar -1,83% dan -2,36%



Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertanian Sempit Terhadap PDB Nasional ADHB Tahun 2015–2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

2. Tenaga Kerja Pertanian

Pertanian merupakan sektor strategis sekaligus sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan berbasis pedesaan. BPS (2020) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang. Walaupun trend penyerapan tenaga kerja sektor pertanian relatif menurun dibandingkan dengan sektor lain, namun peran sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja masih tetap dominan. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang cenderung turun dan angkatan kerja muda cenderung lebih tertarik untuk bekerja di sektor non pertanian dapat disebabkan oleh turunnya daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian dan relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dibanding sektor non pertanian.

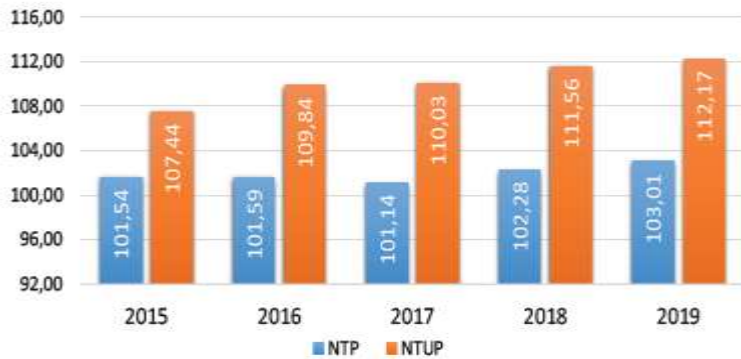


Gambar 2. Tenaga Kerja Pertanian Sempit Tahun 2015–2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

3. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. BPS (2019) menunjukkan bahwa NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura yaitu 2,54%, sedangkan peningkatan terendah pada subsektor Peternakan sebesar 0.63%, penurunan NTP terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar -0,15%. Data BPS menyebutkan tahun 2015 nilai NTUP (pertanian sempit tanpa perikanan) hanya sebesar 107,44 dan secara signifikan meningkat hingga pada tahun 2019 dengan nilai NTUP sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas) mengalami kenaikan dalam perdagangan.

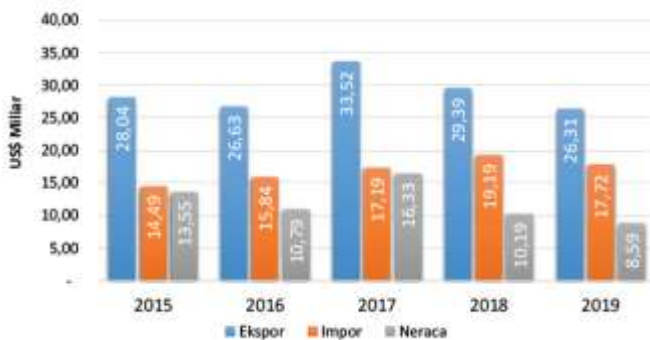


Gambar 3. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani Tahun 2015 – 2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

4. Neraca Perdagangan

Peningkatan volume dan nilai ekspor pertanian tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya neraca perdagangan atau *Balance of Trade* (BoT) pada periode tersebut, yaitu naik 34,72% jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari US\$1,44 miliar menjadi US\$1,95 miliar peningkatan ekspor dan surplus perdagangan produk pertanian dalam kurun waktu November–Desember 2019 tentunya tidak terlepas peningkatan produksi dan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratiexs). Secara umum, subsektor perkebunan menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan.



Gambar 4. Neraca Perdagangan Petani Tahun 2015–2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024

5. Investasi

Investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama periode 2015-2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp. 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp. 43,6 triliun di tahun 2019. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.13,4 triliun. Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada Subsektor Perkebunan, dibandingkan dengan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Pada periode 2015–2019, realisasi investasi PMDN dan PMA pada Subsektor Perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan Subsektor Tanaman Pangan 0,26%, Hortikultura 0,16% dan Ternak 4,02%.



**Gambar 5. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian
Semipit Tahun 2014–2019**

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

A. Potensi Pertanian Indonesia

1. Keanekaragaman Hayati

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun

2. Lahan Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, olehnya itu lahan pertanian menjadi faktor produksi pertanian utama dan tak tergantikan dalam proses usaha pertanian. Lahan pertanian merupakan salah satu unsur sumber daya alam yang bersifat fisik maupun kimia tanah yang menentukan keberhasilan produksi pertanian, di samping faktor iklim, irigasi, teknologi, aktivitas manusia, dan faktor produksi lainnya. Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi).

3. Penduduk

Penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, juga merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Berdasarkan data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

4. Inovasi dan Teknologi

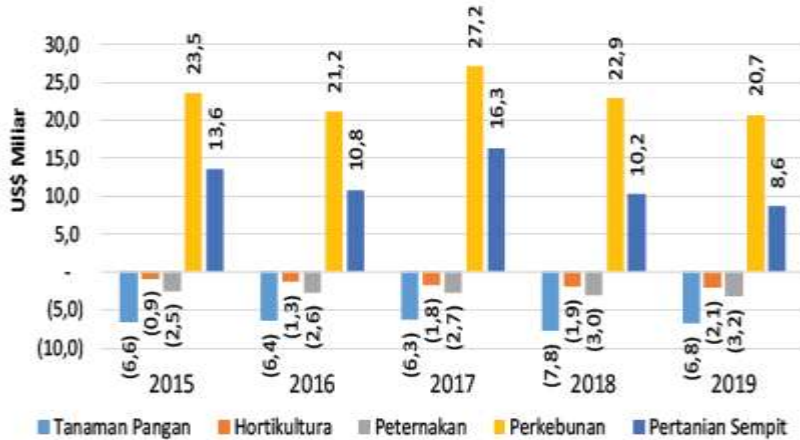
Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan (ekstensifikasi) sulit diterapkan di Indonesia, di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian semakin meluas.

B. Permasalahan Pertanian Dalam Pembangunan

Beberapa permasalahan mendasar dalam memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan adalah:

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi. Permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2018). Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia, dan di antaranya 7,3 juta merupakan anak yang berada di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi. World Food Programme (WFP) dalam studi tentang biaya pangan Indonesia 2017, menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi.

2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non tariff barrier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global.



Gambar 6. Defisit Neraca Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US\$ 11,9 miliar atau tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi

produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerja sama ekonomi antarwilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antardaerah) maupun kerja sama regional (antarnegara).

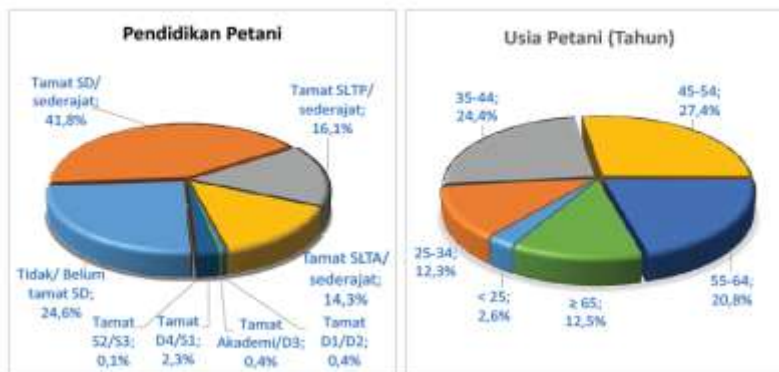
3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan. Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Selain masalah luas lahan yang menurun, yaitu kepemilikan lahan oleh petani yang semakin sempit. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.

4. Pendidikan dan Usia Petani

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sekitar 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja

yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar 16,13% dan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.



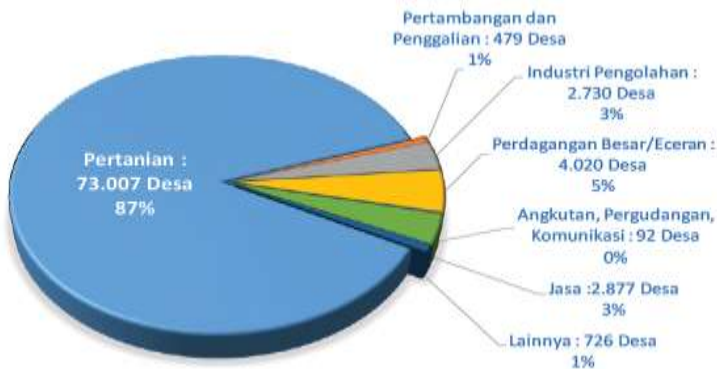
Gambar 7. Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024

5. Kemiskinan Pedesaan

Badan Pusat Statistik 2020 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41%) dibandingkan posisi Maret 2020, Peningkatan penduduk miskin pada September 2020 sebagian besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20 persen. Menurut BPS (2020) beberapa faktor

yang menyebabkan kemiskinan adalah: *Pertama*, perubahan rata-rata upah buruh per hari. Sampai September 2019 sebesar 1,02%, perubahan rata-rata upah buruh per hari atau kenaikan upah ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan di bulan September dari 9,41% menjadi 9,22%. *Kedua*, nilai tukar petani (NTP) yang meningkat, NTP secara nasional sebesar 104,16 atau melebihi 100, artinya nilai tukar petani (NTP) terindikasi bahwa mengalami surplus. *Ketiga*, rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan inflasi sebesar 1,84%. *Keempat*, terjadi penurunan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas pokok, seperti penurunan harga beras, telur, ayam dan sebagainya. *Kelima*, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat. *Keenam*, meningkatnya kuota penerima pelaksana program bantuan pangan non-tunai (BPNT) apabila dibandingkan dengan triwulan pertama di tahun 2019.



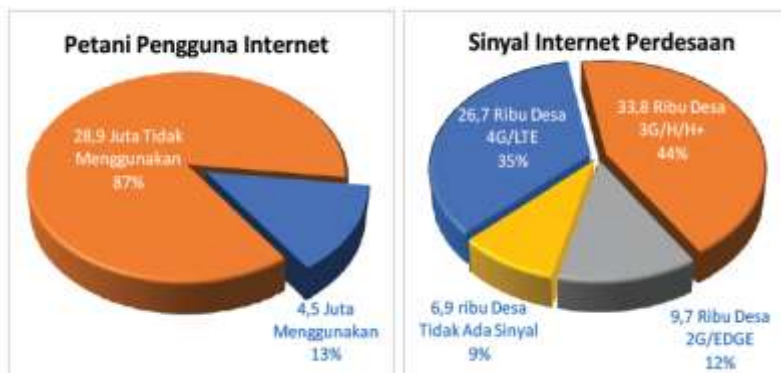
Gambar 7. Penghasilan Utama Penduduk Pedesaan Tahun 2018

Sumber: BPS,2018

6. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 saat ini ditandai dengan penggunaan berbagai mesin otomatisasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Lima teknologi utama yang menopang implementasi revolusi industri 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, *teknologi robotic* dan sensor, serta teknologi 3D. Dengan adanya revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, diharapkan proses usaha tani menjadi

semakin efisien, sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, terdapat 77.172 (91,95%) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 dan 2014, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 70.610 (89,82%) desa/kelurahan pada tahun 2011 dan 74.473 (90,61%) desa/kelurahan pada tahun 2014.



Gambar 8. Petani Pengguna Internet dan Sinyal Internet Pedesaan Tahun 2018
Sumber: BPS, 2018

7. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menjadi ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan ketika terjadi siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Untuk menyikapi perubahan iklim global dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan, diantaranya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan

karakteristik masing-masing wilayah. Selain itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir atau genangan dan salinitas.

8. Keterbatasan akses pembiayaan petani

Pembiayaan di sektor pertanian merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan di perdesaan yang berperan utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pentingnya pembiayaan dalam pembangunan pertanian berkaitan dengan tipologi petani yang didominasi petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit, sehingga kurang memungkinkan untuk melakukan investasi barang-barang modal dalam pemanfaatan teknologi baru. Aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah krusial yang sering dikeluhkan petani. Minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan serta lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim dan ketidakpastian jaminan harga merupakan faktor penyebabnya.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan bahwa dari sekitar 8.000 sampel petani hanya sekitar 15 persen petani yang sudah mengakses kredit bank, 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-Bank lainnya dan petani yang mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 33 persen.



Gambar 9. Realisasi KUR Sektor Pertanian Tahun 2016–2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodal formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah seharusnya melakukan reformasi program kredit khusus sektor pertanian jika ingin meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong produktivitas petani melalui: *Pertama*, Skema kredit yang fleksibel, terpercaya, dan terjangkau, khususnya skema penjaminan kredit pertanian. *Kedua*, Membuat program kartu tani, berbasis *Information Communication Technology (ICT)* serta melakukan perbaikan penyaluran kredit Sarana Produksi Pertanian (Saprotan). *Ketiga*, untuk keberlanjutan pertanian, perlu mempertimbangkan insentif bagi Lembaga Penyalur kredit, profesionalisme analis kredit, dan peran kelompok tani, beserta dampaknya, sehingga program kredit yang terintegrasi dengan program konsolidasi lahan berintegrasi dengan program pemberdayaan kewirausahaan

C. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Beberapa tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan antara lain: untuk menjaga dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan serta melindungi

lingkungan, menjamin penghasilan bagi petani, menjamin konservasi energi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan keamanan bahan pangan, dan menciptakan keserasian antara petani dan faktor sosial ekonominya (Rachmawatie *et al.*, 2020).

Untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern dan berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian yang memfokuskan pada empat aspek yaitu

1. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian.
2. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.
3. Pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi.
4. Ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung dan bangunan air lainnya) <https://psp.pertanian.go.id>.

Daftar Pustaka

Global Nutrition Report. 2018. *Accountability to Accelerate The World's Progress on Nutrition*.

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/291340/neraca-perdagangan-sektor-pertanian-mengalami-surplus>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021

<https://nasional.kontan.co.id>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021

<https://psp.pertanian.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024

Rachmawatie, SJ., J. Sutrisno, W.S. Rahayu, L. Widiastuti. 2020. *Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Implementasi Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan*. Plantaxia. Yogyakarta.

Tentang Penulis



Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si., lahir di Luwuk, 17 Desember 1976 Dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Tamat SD Muhammadiyah 1 Luwuk Tahun 1988, MTs Negeri Luwuk Tahun 1991, SMU Negeri 2 Luwuk tahun 1994, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu Tahun 1999, Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas di Ponegoro Semarang Tahun 2008, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2019. Aktif di berbagai organisasi dan mengikuti Seminar nasional dan internasional. Menulis Buku Disparitas Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah (2021) dan Konvergensi Pendapatan Per Kapita Di Provinsi Sulawesi Tengah (2021).

BAB 4

MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN

Wasifah Hanim

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung

wasifah.hanim@umbandung.ac.id

A. Pengertian

Investasi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi nasional pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012). Pentingnya investasi dalam perekonomian telah dijelaskan dalam teori neoklasik terutama dalam teori Harold Domard, di mana investasi memberikan efek multiplier tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga menimbulkan alih pengetahuan dan alih teknologi serta memperluas kesempatan kerja.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012). Sumber investasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu investasi domestik (penanaman modal dalam negeri) dan investasi asing (Penanaman Modal Asing). Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI atau PMA). Kedua investasi asing tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, Investasi asing langsung merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh asing dalam jangka panjang berupa pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal dan bahan baku. Dalam hal ini, investor dapat terlibat secara langsung dalam pengawasan dan manajemen di perusahaan tersebut. Investasi portofolio asing merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh asing dalam bentuk asset-aset financial, seperti saham dan obligasi, oleh karena itu investor tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan tersebut (Eliza, 2013). Berdasarkan perbedaan karakteristik dari kedua investasi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi langsung dapat memberikan manfaat lebih banyak dalam meningkatkan perekonomian dibandingkan dengan investasi portofolio.

B. Manfaat Modal Asing Bagi Perekonomian Nasional

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik tersendiri sebagai negara tujuan investasi. Daya saing dalam menarik investor harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, agar sektor swasta dapat berperan lebih besar melalui investasi, sehingga akan memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional (Dona, 2017).

Penanaman modal asing adalah salah satu sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari luar negeri dalam upaya untuk mendorong peningkatan sektor riil (Jamil & Hayati, 2020). Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia diantaranya:

1. Dengan masuknya modal baru akan membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana.

2. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang.
3. Dengan masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru, selanjutnya bias dikembangkan di Indonesia.
4. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dengan keterlibatan investor asing akan mendorong UMKM meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya, hal ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.
5. Meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak.
6. Untuk, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara.

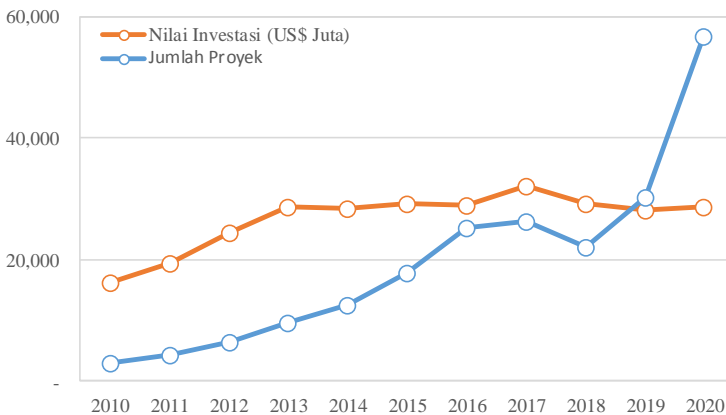
Manfaat Investasi asing tidak hanya dinikmati oleh negeri penerima saja (negara tujuan investasi) tetapi juga dinikmati oleh negara asal investasi. Dari sisi investor asing, keuntungan yang diterima adalah efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya yang dimilikinya. Sementara Negara penerima investasi asing akan mendapatkan manfaat dalam bentuk kemungkinan adanya inovasi dan penguasaan teknologi baru, peningkatan kemampuan manajerial dan administrasi yang lebih baik serta semakin luasnya jaringan perdagangan internasional (Hanim et al, 2020).

C. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Masuknya modal asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung atau tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim/kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.

Pada dekade terakhir pada dasarnya jumlah proyek yang berasal dari investasi asing cenderung meningkat, meskipun Tetapi jika dilihat dari sisi nilai investasinya pada dua tahun terakhir cenderung lebih rendah dari jumlah proyek yang ditanamkan. Jumlah proyek dan nilai investasi sama pentingnya bagi perekonomian Nasional, Nilai Investasi yang semakin besar menunjukkan meningkatnya aggregate demand yang secara langsung kapasitas produksi nasional. Sementara jumlah proyek investasi asing memberikan indikasi meningkatnya jumlah perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menggambarkan diversifikasi investasi semakin beragam.

Pada gambar 4.1 berikut menunjukkan perkembangan penanaman modal asing di Indonesia, pada periode 2010-2019 nilai investasi asing yang ditanamkan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah proyek yang ditanamkan. Nilai investasi yang dinyatakan dalam juta US\$ cenderung meningkat namun tidak terlalu signifikan, bahkan pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan nilai investasi. Sementara dari sisi jumlah proyek yang ditanamkan pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan yang sangat besar, namun nilai investasinya lebih rendah dibandingkan jumlah proyek investasi asing.



Gambar 4.1. Perkembangan Investasi Asing Di Indonesia Tahun 2010 - 2020

Sumber: <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>

Investasi asing di Indonesia sejak tahun 2010-2016 mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2011 jumlah penanaman modal asing di Indonesia sebanyak 16.215 juta US\$, pada tahun 2015 menjadi 29.276 juta US\$, terjadi peningkatan sebesar 13.061 juta US\$ (80,55%). Namun, sejak tahun 2015-2018 investasi asing yang masuk ke Indonesia cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016 penanaman modal asing mengalami penurunan sebesar 1,07% dan kembali meningkat sebesar 11% pada tahun 2017 (32.240 juta US\$). Pada tahun 2018-2019 dua tahun berturut-turut investasi asing hingga pada angka 28.529,6 juta US\$, besarnya penanaman modal asing pada tahun terus mengalami penurunan. Patut menggembirakan seiring dengan adanya pandemic Covid-19, pada tahun 2020 penanaman modal asing justru mengalami kenaikan sebesar 458 juta US \$ (1,62%).

Berkenaan dengan jumlah proyek yang berasal dari penanaman modal asing pada periode 2011-2016 relative cukup besar, pertumbuhan rata-rata jumlah proyek investasi asing sebesar 42,22%. Pada tahun 2017-2018 jumlah investasi Asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan tajam. Sejak tahun 2019-2020 jumlah proyek investasi asing yang masuk ke Indonesia kembali meningkat, bahkan pada tahun 2020 pertumbuhan jumlah proyek ke Indonesia sebesar 86,88%.

Tabel 4.1. Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah dan Nilai Investasi Asing di Indonesia Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Juta)	Pertumbuhan (%)	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Juta)
2010	3,076	16,215		
2011	4,342	19,475	41.16	20.10
2012	6,472	24,565	49.06	26.14
2013	9,612	28,618	48.52	16.50
2014	12,632	28,530	31.42	-0.31
2015	17,738	29,276	40.42	2.62
2016	25,321	28,964	42.75	-1.07
2017	26,257	32,240	3.70	11.31

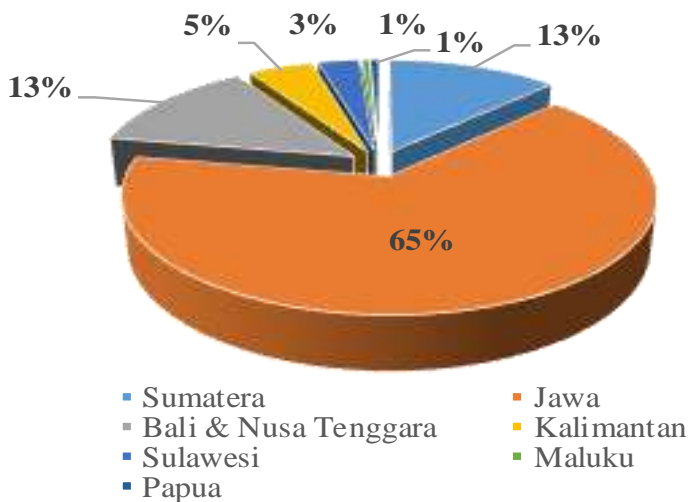
2018	21,972	29,308	-16.32	-9.09
2019	30,354	28,208	38.15	-3.75
2020	56,726	28,667	86.88	1.62

Sumber: <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>

Kecenderungannya arus masuk modal asing dari negara maju diarahkan ke negara berkembang, para investor hanya mau menanamkan modalnya di tempat yang paling menguntungkan. Faktor-faktor yang menentukan daya Tarik investasi asing diantaranya adalah pasokan tenaga kerja murah dan melimpah (seringkali menjadi pertimbangan utama), tingkat pertumbuhan ekonomi negara tujuan investasi, solvabilitas negara, keterbukaan perdagangan, ukuran pasar negara tujuan investasi, korupsi, inflasi, tingkat perkembangan industri, defisit fiskal, nilai tukar dan hambatan investasi dan birokrasi (Hanim, 2021).

Pulau Jawa masih menjadi primadona lokasi investasi asing di Indonesia, 65% jumlah proyek-proyek investasi asing mengambil lokasi di Pulau Jawa. Investasi asing yang mengambil lokasi Sumatera dan Bali Nusa Tenggara masing-masing hanya 13%, untuk pulau-pulau lainnya tidak lebih dari 5%. Dari sisi nilai investasi asing, sebesar 55% terkonsentrasi di Pulau Jawa Pula, 15% terkonsentrasi di Pulau Sulawesi dan 12% di Pulau Sumatera.

Investasi Asing lebih memilih untuk mengambil lokasi Pulau Jawa, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur di seluruh Indonesia yang masih belum merata. Di samping itu, lebih dari 50% dari jumlah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk yang besar di Pulau Jawa menjadikan daya tarik tersendiri bagi investasi asing, di samping sebagai sumber tenaga kerja juga sebagai pasar yang luas untuk memasarkan produk yang dihasilkan.



Gambar 4.2. Proporsi Nilai Investasi Asing di Indonesia Berdasarkan Lokasi

Sumber: <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>

Komposisi Investasi asing berdasarkan negara asal menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 102 negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi Asing dari 10 negara yaitu paling tinggi yaitu Singapura, RRT, Hongkong (RRT), Korea Selatan, Jepang, Belanda, Taiwan, Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia memberikan kontribusi terhadap total investasi masuk sebesar 95%. Tiga negara dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia yaitu Singapura dengan nilai investasi sebesar US\$2.615,7 juta (33,92%), RRT dengan nilai investasi sebesar US\$1.333,1 juta (17,28%) dan Hongkong (RRT) sebesar US\$1.055,7 juta (13,69%).

Table 4.2. Nilai Investasi Asing Berdasarkan Negara Asal Tahun 2020

No	Negara	Investasi (US\$ Juta)	%
1	Singapura	2615.7	33.92
2	R.R. Tiongkok	1333.1	17.28
3	Hongkong, RRT	1055.7	13.69

4	Korea Selatan	699.5	9.07
5	Jepang	453.7	5.88
6	Belanda	402	5.21
7	Taiwan	294.7	3.82
8	Amerika Serikat	269.6	3.50
9	Malaysia	83.3	1.08
10	Australia	78.9	1.02
11	Lainnya	426.3	5.53

Sumber: <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>

Jika dirinci berdasarkan sektor, investasi asing paling banyak diminati adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yaitu US\$ 5,969 miliar (20,82%), sektor listrik, dan air US\$ 4,613 miliar (16,10%), dan sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi US\$ 3,58 miliar. Kedua sector tertinggi merupakan sektor infrastruktur dasar yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pengembangan industri logam dasar mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan kedua sektor tersebut akan mendorong peningkatan sektor Industri, Industri logam dalam negeri menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur industri nasional, industri logam memiliki peranan penting karena industri ini menghasilkan bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lainnya, seperti permesinan dan peralatan pabrik, otomotif, maritim serta elektronika (Kementerian Perindustrian, 2016). Demikian pula ketersediaan infrastruktur seperti listrik mempunyai keterkaitan yang cukup penting terhadap berbagai sektor industri. Sektor listrik mempunyai keterkaitan ke depan terbesar terhadap berbagai sub sektor industri, terutama industri semen, tekstil, logam, dan kertas. Hal tersebut menunjukkan peran penting listrik sebagai sumber energi dalam proses produksi (Laporan BI,2018). Jadi nilai investasi yang tinggi dalam sektor industri logam dasar, barang logam, bukan

mesin dan peralatannya dan sektor listrik, dan air akan mendorong percepatan pembangunan industri nasional.

Tabel 4.3. Investasi Asing di Indonesia Berdasarkan Sektor

NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (US\$ Juta)	%
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	5,969.20	20.82
2	Listrik, Gas dan Air	4,613.90	16.10
3	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	3,580.40	12.49
4	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	2,191.40	7.64
5	Pertambangan	2,005.10	6.99
6	Industri Kimia dan Farmasi	1,742.50	6.08
7	Industri Makanan	1,592.10	5.55
8	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1,184.20	4.13
9	Industri Kertas dan Percetakan	942.80	3.29
10	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	942.00	3.29
11	Jasa Lainnya	733.30	13.61

Sumber: <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>

D. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Perekonomian Indonesia

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi dalam mendorong perekonomian nasional (Kambono & Marpaung, 2020). Meningkatnya investasi di suatu negara akan mendorong keberlanjutan aktivitas perekonomian dalam jangka Panjang. Pada gilirannya akan mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan

nasional, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi adalah salah satu komponen dari pengeluaran agregat yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Kedua, peningkatan investasi berarti terjadi penambahan barang modal, oleh karena itu akan menambah kapasitas produksi dan akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi cenderung diringi dengan perkembangan teknologi, sehingga akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja terkait dengan kemajuan teknologi yang diterapkan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa aliran modal asing mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat memungkinkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Banyak sekali penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh Studi tentang peran Investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi kesimpulan adalah Investasi asing memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hoque ME (2018), Pandya (2017), Haydaroglu (2016), Ould (2015), Taiwo (2015), Louzi (2011), Zaman (2011), dan Bengoa (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Investasi asing tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi Nasional (PDB) (Hanim W et al, 2020).

E. Daya Saing Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi

Indonesia memiliki banyak potensi yang menjadi kekuatan daya saing sebagai negara tujuan investasi yaitu sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda dan terampil, pasar domestik yang besar dan terus tumbuh, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi serta stabilitas politik yang terjaga (BKPM). Di ASEAN, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama investor global. Pada semester tahun 2016, Indonesia berhasil

menarik investasi global sebesar US\$ 16.641 miliar, nomor 2 tertinggi di ASEAN setelah Singapura.

Vietnam, Myanmar, dan Kamboja adalah tiga negara yang tergabung di ASEAN yang menjadi pesaing Indonesia sebagai negara tujuan Investasi. Upah Tenaga kerja yang lebih murah dan biaya investasi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia menjadikan banyak negara maju melirik ketiga negara tersebut. Bahkan dari segi geografis, Kamboja dan Myanmar juga masuk dalam rantai pasok poros Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan China, hal ini sangat menguntungkan Kamboja dan Vietnam mengingat China adalah investor strategis ASEAN (Kurniasih, 2020).

Berdasarkan data FDI Outflow dari 10 negara yang tertinggi dalam menanamkan modalnya ke Indonesia, pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang menarik untuk berinvestasi bagi negara-negara tersebut. Karena jika dilihat dari presentasi investasi yang ditanamkan ke Indonesia, tidak ada satu negara pun dari 10 negara tersebut yang proporsinya lebih dari 10%. China dan Hongkong masing-masing investasi ke Indonesia dalam kisaran 1% dari total *outflow* FDI-nya, Korea Selatan 2,15%, Jepang 0,39%, paling tinggi adalah Singapura yaitu sebesar 8,08% dari total *outflow* FDI-nya (UNCTAD, 2021). Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh negara Untuk menarik investasi asing masih perlu ditingkatkan misalnya kemudahan perizinan, prosedur insentif dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Dona, F. 2017. Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 80–90.
- Eliza, M. 2013. Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Investasi Asing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 19.
- Hanim, W. 2021. *How Does Foreign Direct Investment (FDI) Reduce Poverty? Application of the Triangular Hypothesis for the Indonesian Case*. 10(1), 400–411.
<https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi>
- Jamil, P. C., & Hayati, R. 2020. Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 31(2), 1–4.
<https://www3.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia>
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. 2020. Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145.
<https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Kementerian Perindustrian. 2016. Wujudkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. *Media Industrri*, 01, 1–68.
<http://www.kemenperin.go.id/download/11419>
- Kurniasih, E. P. 2020. Perkembangan investasi asing di negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 362–370.
- Sukirno Sadino. 2012. MakroEkonomi Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulistiawati, R. 2012. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan Untan*, 3(1), 10500.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888>

UNCTAD. 2021. World Investment Report | UNCTAD. In *Unctad*.
<https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>

Wasifah Hanim, Sugiartiningsih, M. H. M. S. 2020. The Determinant Factors of Foreign Direct Investment (FDI) on Indonesian Economy. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 849957.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR2024369>Laporan Bank Indonesia Tahun 2018

Tentang Penulis



Wasifah Hanim lahir di Kabupaten Banyuwangi pada 9 Desember 1964. Menyelesaikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Jember dan program S2 dan S3 Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Pada tahun 2009 mendapatkan kesempatan Bea siswa Sandwich sebagai mahasiswa tamu di Universitas Gottingen Jerman Barat. Saat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Selain itu aktif membantu di Beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah sebagai dalam kegiatan-kegiatan/studi-studi yang terkait dengan Bidang Ekonomi.

BAB 5

KEBIJAKAN SWASEMBADA BERAS DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. Sugiarti Ningsih, S.E., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung

ummusugartiningsih@umbandung.ac.id

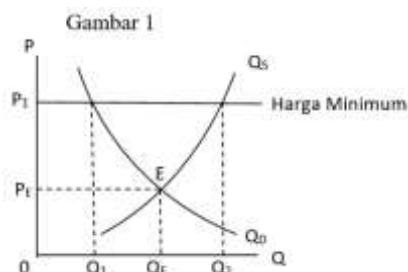
Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK) sesuai bagi Indonesia yang berpenduduk besar sehingga pembangunan akan berpihak pada rakyat yang aplikasinya dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Soeharsono S., 2009). Sebagai Negara Berkembang implementasi SEK akan terlihat dari pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai motor pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2016). Sektor pertanian tanaman pangan terutama padi menjadi produk strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Realitasnya sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Persediaan beras dalam kondisi mencukupi menjadi tugas utama pemerintah untuk menjamin keamanan pangan yang operasionalnya dijalankan oleh Bulog. Intervensi Bulog terlihat dari kebijakan harga maksimum dan minimum sebagai berikut (Lia A., 2017):

1. Teori Kebijakan Minimum (*Floor Price*)

Kebijakan harga minimum atau terendah dilakukan oleh pemerintah bila produk pertanian khususnya beras menurut mekanisme pasar terjadi pada harga yang sangat rendah. Kondisi ini bila dibiarkan akan merugikan produsen beras termasuk petani yang mengalami kasus harga jual beras di bawah biaya produksinya. Solusinya pemerintah akan meningkatkan harga beras di atas keseimbangan seperti terlihat pada Gambar 1berikut:

Gambar 1



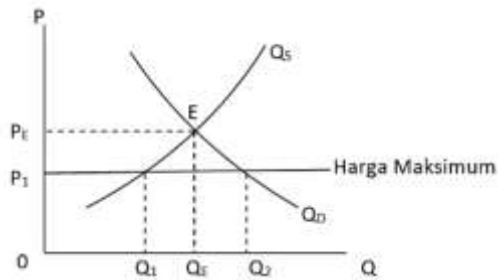
Kebijakan harga minimum

Dari Gambar 1 di atas terlihat di saat beras diperdagangkan menurut mekanisme pasar maka keseimbangan terjadi di titik E (Q_E , P_E). Berarti harga beras terjadi sebesar P_E dan output sebesar Q_E . Apabila harga P_E tersebut dianggap terlalu rendah maka pihak yang dirugikan adalah petani. Peran pemerintah harus dapat melindungi dengan menaikkan harga dari P_E ke P_1 yang disebut dengan kebijakan harga minimum. Dampak kenaikan harga ini secara matematis akan mengubah dari seimbang menjadi tidak seimbang di mana pada harga P_1 permintaan sebesar Q_1 dan penawaran sebesar Q_2 sehingga terjadi excess supply sebesar Q_1Q_2 yang memungkinkan suatu negara dapat mengekspor ke negara lain. Dengan meningkatnya harga beras ini maka penghasilan petani akan terjadi peningkatan.

2. Kebijakan Harga Maksimum (*Ceiling Price*)

Kebijakan harga maksimum dilakukan oleh pemerintah di sektor pertanian bila harga produk menurut mekanisme pasar terlalu tinggi sehingga merugikan konsumen. Untuk dapat meningkatkan daya beli konsumen maka pemerintah menurunkan harga di bawah posisi keseimbangan seperti terlihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2



Kebijakan Harga Maksimum

Dari Gambar 2 di atas terlihat sebelum ada intervensi pemerintah maka keseimbangan harga di pasar mencapai sebesar OPE dan output sebesar OQE. Harga produk pertanian ini dirasa terlalu tinggi bagi konsumen sehingga dianggap merugikan. Pemerintah perlu melindungi konsumen dengan menetapkan langsung di bawah keseimbangan sebesar OP1. Sesuai teori permintaan turunnya harga produk pertanian seperti beras akan diikuti oleh kenaikan permintaan dari OQE ke OQ2. Sedangkan penawaran beras akan turun dari OQE ke OQ1 sehingga terjadi excess demand sebesar Q1Q2. Kelangkaan beras ini harus dapat ditanggulangi oleh pemerintah dengan mengeluarkan stok yang ada di gudang.

Dengan bersandar pada teori tersebut maka peran Bulog dalam mencapai swasembada beras dengan menstabilkan harga dan kesediaan beras. Kinerja Bulog berbeda dengan perusahaan pada umumnya disebabkan kebijakan pemerintah melalui Bulog memiliki ciri khas sebagai berikut (Sapuan S.,2016):

1. Tidak mengenal target jumlah yang akan dibeli, perencanaan didasarkan prognosis. Bila harga gabah/beras sudah di atas harga pembelian pemerintah (HPP) tidak ada kewajiban untuk membeli (intervensi pasar). Prognosis dapat berubah bila terjadi kekeringan atau perubahan kebijakan pemerintah.
2. Tidak berebut barang di pasar apabila harga gabah/beras sudah di atas HPP.

3. Tidak membentuk jaringan pembelian sampai petani sehingga tidak menyiapkan infrastruktur untuk kepentingan itu.
4. Bulog hanya beroperasi ketika terjadi surplus musiman dan hanya membeli di daerah surplus produksi.
5. Prinsip saling menjamin, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk program peningkatan produksi padi, hasilnya dijamin oleh Bulog untuk dibeli sesuai dengan aturan yang berlaku. Bulog mendapat kemudahan kredit yang dijamin oleh Menteri Keuangan, sedangkan Menteri Keuangan bersedia menjamin kredit Bulog karena adanya jaminan anggaran yang digunakan untuk cadangan beras pemerintah dan raskin.

Dengan mengenal ciri khas Bulog tersebut maka perkembangan swasembada beras yang telah dirintis sejak kemerdekaan perlu ditinjau kembali penerapannya mulai Orde Lama hingga era pemerintahan Jokowi II.

Kebijakan Swasembada Beras di Era Orde Lama

Beras adalah produk pertanian yang memicu inflasi di Indonesia. Sejarah inflasi di Indonesia yang tergolong hiper pada akhir Orde Lama ditandai dengan kenaikan besar harga komoditi beras selama musim paceklik 1967 berlanjut hingga Maret 1968 hampir menggagalkan usaha stabilisasi. Factor iklim El Nino yang melanda Indonesia dan negara Asia berdampak panen turun drastis dan tidak mampu menutup impor di masa paceklik. Kelangkaan beras diikuti oleh kenaikan harga beras sangat tinggi. Harga beras di Jakarta naik dari Rp 17,5 per kg (Mei 1967) menjadi Rp 30 (September 1967) kemudian menjadi Rp Rp 90 (Februari 1968) (Boediono, 2016).

Kenaikan harga beras sangat peka terhadap stabilitas politik yang masih rapuh. Beras diakui indicator penting penentu inflasi di Indonesia dengan bobot 30% sehingga perlu dijaga stabilitasnya. Krisis beras di Indonesia direspon oleh Amerika Serikat dengan memberikan bantuan beras dan bulgur tahun 1967.12 dan 1968.01. Sesuai dengan teori kekakuan harga, tindakan tersebut tidak berpengaruh terhadap penurunan harga (Mankiw,2007). Penurunan harga dan stabilitas produksi baru teraih memasuki

musim panen tahun 1968.04. Peristiwa ini memberikan pelajaran kepada pemerintah pentingnya melakukan kebijakan pengamanan beras dan program stabilisasi ekonomi.

Penawaran beras tahun 1968 dapat diselamatkan dengan dua metode yaitu 1. Memberikan insentif untuk meningkatkan produksi beras domestic dan 2. Rencana impor yang aman. Dengan meramu kedua metode dengan stabilisasi terbukti mampu menekan hiper inflasi di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut (Boediono, 2016):

Tabel 1. Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Periode 1961-1971 (% per tahun)

Produksi dan Impor Beras
1970-1987

Tahun	Luas Panen (ribu/ha)	Hasil (ton/ha)	Produksi (juta ton)	Impor (ribu ton)
1970	8,135.00	2.38	19.30	771.00
1975	8,495.00	2.67	22.30	670.00
1976	8,368.00	2.78	23.30	1,508.00
1977	8,360.00	2.79	23.30	2,308.00
1978	8,970.00	2.89	25.70	1,266.00
1979	8,850.00	2.97	26.30	2,579.00
1980	9,005.00	3.29	29.60	1,213.00
1981	9,382.00	3.49	32.70	437.00
1982	9,162.00	3.74	33.60	505.00
1983	9,169.00	3.85	35.30	1,109.00
1984	9,768.00	3.91	38.10	185.00
1985	9,905.00	3.94	39.00	0.00
1986	9,988.00	3.98	39.70	0.00
1987	9,923.00	4.04	40.10	0.00

Sumber: Tabor (1992), h. 173.

Dari Tabel 1 tersebut terlihat tujuan pembangunan di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi serendah-rendahnya. Laju inflasi Indonesia tergolong hiper mulai tahun 1962 sampai dengan 1967. Laju inflasi tertinggi terjadi tahun 1966 yaitu 635,3% dan terendah tahun 1972 yaitu 2,5%. Satu hal yang wajib dicermati setelah terhindar dari hiperinflasi tepatnya tahun 1968 di mana inflasi mampu ditekan hingga mencapai 85,1% maka pertumbuhan ekonomi terjadi pelonjakan dari 1,4 % menjadi 10,9%.

Dengan keberhasilan menekan inflasi hingga batas rendah (Sadono Sukirno, 2013) perekonomian Indonesia terus meningkat

mencapai angka yang tinggi 7,0% tahun 1971 dan mendorong proses pembangunan pertanian lebih progresif.

Kebijakan Swasembada Beras Era Orde Baru

Era Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan program pembangunan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka Panjang (25 tahun). Dalam Repelita I pembangunan difokuskan pada sector pertanian untuk peningkatan beras di Indonesia dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Keseriusan pembangunan sector pertanian khususnya beras ditindaklanjuti mulai penyediaan barang modal pertanian (bibit unggul, pupuk bersubsidi) dan pemberdayaan SDM (penyuluhan padi), pembangunan irigasi secara besar-besaran, kredit bersubsidi, penerapan harga dasar padi serta pembangunan penggilingan dan gudang-gudang beras. Keunggulan pemerintah menyerap teknologi pertanian yang dikenal dengan program revolusi hijau lebih mendorong perubahan dinamis ke arah program intensifikasi (Boediono, 2016).

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan suplai beras yang lebih menekankan pada program intensifikasi bertujuan meningkatkan produktivitas padi. Di mana untuk luas lahan yang sama dapat dipanen volume padi yang lebih besar. Tentu saja produktivitas ini memerlukan dukungan prasarana dan sarana baik fisik maupun kelembagaan besar seperti terlihat pada Tabel 2 berikut: (Boediono, 2016):

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan
Periode 1969-1985**

Prasarana Produksi Tanaman Pangan
1969-1985

Sarana/Prasarana	1969	1985	Pertumbuhan (% per tahun)
Jaringan Irigasi			
Pemerintah (juta ha)	2.45	3.23	2.2
Lain-lain (juta ha)	1.11	0.86	1.9
Penggilingan (ribu unit)	16.3	28.3	4
Kapasitas Gudang Beras (juta ton)	1.5	5.7	10
Pasokan Pupuk (juta ton)	0.5	5.1	29.4
Kios Pupuk (ribu unit)	1.9	20.3	19.8
Kelompok Tani (ribu)	40	225	11.6
Penyuluh Lapangan (ribu)	1.6	22.2	19.2
Bank Desa (ribu unit)	0.5	3.7	12.6
Koperasi (ribu unit)	0.1	6.9	32.6

Sumber: Tabor (1992), h. 174.

Dari Tabel 2 tersebut terlihat pasokan pupuk mengalami peningkatan terbesar dari 0,5 juta ton tahun 1969 menjadi 5,1 juta ton tahun 1985 atau meningkat sebesar 29,4% per tahun. Kondisi ini mencerminkan pentingnya barang modal untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Sedangkan penggilingan hanya meningkat 4,0% per tahun yaitu dari 16,3 ribu unit menjadi 28,3 ribu unit pada periode yang sama. Walaupun peningkatan penggilingan sudah dianggap memuaskan namun harus tetap diperhatikan oleh pemerintah untuk melindungi petani padi.

Usaha keras pemerintah dalam memfasilitasi sarana-prasarana tersebut baru menuai hasil gemilang tahun 1985 dengan diakuinya Indonesia sebagai negara swasembada beras. Di mana hasil beras per hektar meningkat dari 2,38 ton/ha tahun 1970 meningkat menjadi 3,94 ton/ha tahun 1985 atau terjadi kenaikan hampir dua kali lipat. Keberhasilan swasembada beras dan pembangunan pertanian disinyalir dari pemanfaatan devisa dari ekspor migas. Prestasi yang menonjol dari swasembada beras di masa Orde Baru adalah tidak terjadi impor selama tiga tahun (1985-1987) walaupun impor beras tidak dilarang.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa program swasembada beras lebih menekankan sisi penawaran dalam pengambilan kebijakan. Realisasi ini sejalan dengan teori per-

tumbuhan ekonomi yang memprioritaskan produktivitas output dengan meningkatkan kualitas teknologi dan Sumber daya Manusia (SDM) yang dimiliki (Asfia, 2016). Selanjutnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan melakukan tindakan yang adil baik bagi petani maupun konsumen dalam negeri. Solusinya dengan menjaga harga dasar supaya aman serta mengenakan tarif terhadap beras impor. Keberhasilan swasembada beras didukung stabilitas politik yang membaik (Sugiarti, 2018). Kebijakan tersebut mendapat respon positif oleh pihak terkait mulai kelompok tani hingga teknokrat serta upaya menjaga keseimbangan makro (Boediono, 2016).

Kebijakan Swasembada Beras Pasca Reformasi

Reformasi di Indonesia yang dipicu krisis moneter tahun 1997 sebagai akibat factor eksternal telah berdampak pada penurunan kurs rupiah terhadap US\$ yang overvalue dan mendorong Indonesia meminta bantuan IMF (Tulus T., 2014). Pada 1997/98 El Nino terjadi lagi di Indonesia yang mengakibatkan produksi pangan dan pertanian turun tajam serta kebakaran hutan yang tinggi. Penurunan produksi pangan mendorong harga beras naik berlipat ganda (3x) sepanjang tahun 1998. Kenaikan harga beras ini merambah ke barang lain secara luas. Kemudian berhentinya sector riil menyebabkan tingginya PHK serta kemiskinan di Indonesia sehingga mengubah krisis ekonomi menjadi krisis politik (Boediono, 2016).

Bahkan saat pemerintahan SBY I kenaikan harga beras terus berlangsung karena penyimpangan program swasembada beras dengan menyerahkan pada mekanisme pasar sejak tahun 1990 an dan pasca krisis moneter 1997/1998. Berawal dengan pembungkusan dalam kemasan 5 dan 10 kg dengan merek tertentu serta permintaan beras kristal dengan mesin tertentu di supermarket. Kemudian berkembangnya penggilingan keliling (2008-2010) menggunakan mesin Engberg menghasilkan butiran beras dengan kepatahan tinggi. Kehadiran mesin penggiling keliling berdampak perebutan bahan baku gabah dengan penggilingan besar dan kecil yang menghasilkan beras asalan dengan kadar air

14%. Momen ini dimanfaatkan oleh penggilingan besar dengan memproses beras asalan menjadi beras medium (kerusakan 15-20%) dan premium dengan jalan dipoles dan ditekan kepatahannya kemudian dikemas dalam bungkus kecil. Selanjutnya intervensi pemodal besar yang menjual beras medium (50 kg) dan beras premium (5 kg) dengan strategi memborong di pasar. Penyimpangan tersebut mempersulit kinerja Bulog sehingga harga pembelian Bulog selalu lebih rendah dari harga pasar. Tingginya tuntutan masyarakat dan pemerintah akhirnya Bulog menyerah pada mekanisme pasar (Sapuan, 2016).

Kelemahan Bulog meskipun telah diasiasi oleh pemerintah dengan operasi pasar tetap tidak efektif sehingga kebijakan stabilitas harga beras dirubah menjadi subsidi langsung seperti program raskin. Dalam perkembangannya program raskin dianggap lebih efisien bila diterima uang tunai yang ditransfer ke rekening penerima yaitu rumah tangga miskin. Namun realitasnya program subsidi uang tunai tidak terwujud karena jika sudah ditransfer sulit ditarik (Boediono, 2016).

Program kedaulatan pangan nasional harus ditegakkan guna mewujudkan swasembada pangan dalam keadaan surplus dan menjadi negara pengespor pangan di pasar internasional. Syaratnya harus berlandaskan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya dan sarana produksi domestik. Perbaikan infrastruktur pertanian padi baik kualitas barang modal (pupuk, pestisida) serta perbaikan dan pembangunan irigasi di daerah sentra baru harus dari kekuatan domestic. Demikian halnya dengan penyediaan infrastruktur jalan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi petani. Seluruh infrastruktur tersebut sangat berpotensi meningkatkan produktivitas padi (Prabowo, 2013).

Dengan bergulirnya pemerintahan Joko Widodo I program kedaulatan pangan dipetakan mulai tahun 2016-2045. Prestasi awal pemerintah mampu menjamin ketersediaan pangan hingga tahun 2017.05. Bila diperhatikan keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari iklim yang kondusif sehingga pola panen naik 2-3 kali per tahun. Dampaknya Indonesia optimis dapat

surplus beras sebesar 1,7 juta ton dan mengekspor beras organic ke Belgia sebesar 40 ton (Kementerian, 2016).

Guna meningkatkan ekspor dalam jangka panjang pemerintah mencetak sawah dan membangun lumbung pangan di setiap perbatasan Indonesia untuk memudahkan ekspor ke negara terdekat seperti Singapura, Sabah, Serawak (Malaysia), Brunei, dan lainnya. Sebagai contoh dibukanya 5000 hektare sawah di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau diprediksi menaikkan peluang ekspor beras Indonesia ke Singapura. Secara lebih jauh pemerintah menargetkan swasembada beras di setiap pulau akan tercapai akhir 2017. Dengan pemikiran swasembada beras dapat menekan harga beras karena pendeknya mata rantai distribusi. Sebagai hasil (2014-2016) pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kala berhasil meningkatkan produksi pangan strategis. Produksi padi naik 4,96% diikuti jagung (18,11%), cabai (9,66%) dan bawang merah (3,75%). Bahkan selama periode 2016.01-08 impor produk pangan dapat ditekan dan ekspor beras organic meningkat 67%. Dampaknya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) meningkat 2,88% dan penduduk miskin turun 0,22 juta jiwa. Peningkatan produksi beras memunculkan keoptimisan pencapaian swasembada beras tahun 2016 dan menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045 (Kementerian, 2016).

Walaupun demikian beras tetap wajib diperhatikan stoknya oleh pemerintah untuk menghindari krisis pangan akibat wabah Covid-19. Demi merespon himbauan Badan Pangan Dunia (FAO) untuk menjaga rantai pasok bahan pangan, pemerintah meminta kementerian dan Lembaga terkait menjaga iklim pemanenan padi kondusif periode 2020.08-2020.09. Berkat iklim yang baik periode awal 2020 (Januari-Maret) suplai beras di Indonesia cukup tinggi. Di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Karawang memanen padi pada sawah seluas 19.621 hektare dan menghasilkan produksi total 137.347 ton atau 7 ton per hectare. Sedangkan di Dusun Randu, Kecamatan Pedes, Karawang musim tanam berjalan lancar di tengah pandemi. Apabila luas lahan 4 hektare diprediksi meningkatkan produksi beras 19,8 juta ton hingga akhir Agustus 2020 maka akan mampu memenuhi kebutuhan nasional hingga

Desember 2020. Besarnya pemanenan beras merupakan tantangan Bulog untuk menyerap maksimal produksi beras local pada 2020.04-2020.05 walaupun stok beras Bulog cukup besar 1,4 juta ton (Ekonomi, 20-26 April 2020).

Dibalik keberhasilan meningkatkan produksi beras dengan mencetak sawah sebagian pihak (pemerhati lingkungan) mengingatkan faktor kegagalan akibat kerusakan hutan tropis di Indonesia era Orde Baru sebagai dampak proyek lahan gambut sejuta hektare. Dari sisi lingkungan mencetak sawah di lahan gambut berdampak rusaknya ekosistem rawa gambut yang berakhir dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir bandang (Ringkasan 11-17 Mei 2020).

Dengan demikian solusi pengembangan teknologi pertanian beras di Indonesia sebaiknya lebih ke arah intensifikasi berdasar prinsip swasembada beras dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Model Pengolahan Tanaman Terpadu (PTT)

Model PTT bertujuan untuk mengelola tanaman, tanah, air dan unsur hara secara terintegrasi untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik serta produksi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Dari hasil penerapan model PTT di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan baik dari hasil (volume dan nilai), biaya produksi maupun pendapatan usaha tani (www.sulsel.litbang.depan.go.id)

2. Metode SRI (*System of Rice Intensification*)

Metode SRI adalah metode intensifikasi pertanian dengan menekankan enam faktor yaitu berusia muda sekitar 10-15 hari, pengaturan jarak tanam sekitar 40 cm x 40 cm, pengairan tanpa harus menggenangi lahan serta penggunaan bahan organik sebagai pupuk maupun pestisida. Penerapan metode SRI mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional di mana metode SRI adalah tanaman hemat air, hemat biaya, hemat waktu, produksi meningkat dan ramah lingkungan

(www.sinartani.com/teknologi/libang-mancenegara/4191.html)

3. Panca Usaha Tani

Metode panca usaha tani merupakan tonggak intensifikasi pertanian dengan memenuhi lima faktor yaitu pemilahan dan penggunaan bibit unggul, pengolahan lahan pertanian atau tanah pertanian secara tepat, pengaturan irigasi atau saluran air, pemberian pupuk sesuai aturan dan pemberantasan hama dengan baik. Dengan penerapan kelima faktor tersebut terbukti telah menghasilkan produk pertanian yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memuaskan seperti yang dihasilkan di berbagai wilayah Indonesia (<http://de223.4shared.com/doc/B-enF7S/preview.html>)

4. Sistem Tanam Jajar Legowo

Sistem Tanam Jajar Legowo adalah sistem menanam padi yang bertujuan meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Selain itu, sistem tanam tersebut juga memanipulasi lokasi tanaman sehingga seolah-olah tanaman padi dibuat menjadi taping (tanaman pinggir) lebih banyak. Seperti diketahui tanaman padi yang berada di pinggir akan menghasilkan produksi lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik. Hasil penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo dapat meningkatkan hasil panen dua kali lipat dari metode yang biasa dipakai petani (<http://nasa-banjarnegara.bogspot.com/2011/07/menembus-batas-produksi-padi-organik.html>)

5. Kultur Jaringan

Kultur jaringan merupakan salah satu perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan media buatan yang dilakukan ditempat steril. Pemanfaatan kultur jaringan memberikan keuntungan sebagai berikut: pengadaan bibit tidak tergantung musim, bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat, bibit yang dihasilkan seragam dan bebas penyakit serta biaya pengangkutan bibit yang lebih murah dan efisien.

Selain faktor lingkungan rencana impor beras menurut prinsip swasembada hendaklah tidak dilakukan pada panen raya. Terlebih bila melihat data produksi beras nasional di Indonesia

(Badan Pusat Statistik) sejak tahun 2018 hingga 2020 (33,9 juta ton, 31,31 juta ton dan 31,33 juta ton) terbukti stabil dan melampaui kebutuhan nasional 29 juta ton per tahun. Fakta tersebut diperkuat bahwa awal tahun 2021 produksi beras di Indonesia 14,54 juta ton lebih besar dibandingkan tahun 2020 periode yang sama sebesar 11,46 juta ton (Kompas, 26 Maret 2021). Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton di tengah panen padi berakibat secara psikologis harga beras jadi turun dan merugikan petani. Peran Bulog adalah beroperasi di daerah surplus dan membeli beras petani local hingga harga pulih di atas HPP. Jadi dana rencana impor beras 1 juta lebih baik dialihkan untuk membeli beras petani (Kompas 5 Maret 2021).

Penyerapan Bulog dalam praktiknya mendapatkan tantangan dari kualitas beras yang rendah akibat curah hujan maupun banjir yang berdampak kandungan air dan kerusakan gabah tinggi. Sementara peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan HPP untuk gabah (GKP) memiliki kandungan air maksimum 25% dengan kotoran maksimal 10% akan dibeli dengan harga Rp 4200 per kg di tingkat petani. Untuk memenuhi standar tersebut Bulog mengendalikan mesin pengering dan penggilingan jaringan mitra perusahaan dan mesin unit-unit pengolahan gabah dan beras yang dikelola perseroan. Unit-unit Bulog tersebut memiliki sekitar 100 mesin pengolahan yang dapat menggiling dan mengeringkan dengan kapasitas 10000 ton per hari (Kompas, Petani Tak setuju Impor, Jumat 12 Maret 2021).

Faktor berikutnya adalah di gudang Bulog beras eks impor 2018 sebesar 279.744 ton dan penyerapan domestik pada 2018 dan 2019 sebesar 172.988 ton dapat berdampak kualitas menurun bila tidak segera disalurkan. Penyaluran beras ini terjadi kesulitan karena Bulog kehilangan outlet penyaluran pelayanan publik. Seperti diketahui sejak 2017 penyerapan beras domestik Bulog terus turun mulai 2,16 juta ton (2017) menjadi 1,25 juta ton (2020). Pada kondisi tersebut outlet penyaluran beras juga menurun untuk rastra/bantuan pangan non tunai dari 2,54 juta ton (2017) menjadi nol pada 2020. Dalam kasus tersebut Bulog

menghadapi dilema sebagai operator maupun BUMN. Solusinya dengan menerapkan kebijakan yang terintegrasi hulu, tengah dan hilir.

Selanjutnya dengan mengacu pada UU Pangan No. 18/2012 dan UU Perdagangan No 7/2014 tentang pentingnya peran negara dalam menjamin ketersediaan pangan dan akses warga terhadap pangan, maka kehadiran Bulog misi suci negara sebagai penjamin terpenuhinya hak pangan warga. Namun realitasnya harga pangan terganggu oleh mekanisme pasar yang dikendalikan oleh produsen, pengusaha atau sekelompok kecil orang yang mempunyai kuasa melakukan kartel dan membuat kesepakatan mengatur harga, volume maupun wilayah distribusi.

Ditinjau dari sudut pandang perekonomian Indonesia kondisi ini sangat merugikan negara. Solusinya Bulog wajib memperbaiki karakter produsen, pengusaha atau sekelompok orang yang melakukan kartel terhadap volume, harga dan wilayah distribusi beras (Khudori, 2021).

Daftar Pustaka

- Asfia Murni. 2016. *Ekonomika makro*, Edisi revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan I. Bandung: Mizan Media Utama.
- Ekonomi & Bisnis, Bulog Butuh Jaminan Penyaluran, Kompas: 26 Maret 2021
- Ekonomi & Bisnis, Menguji Argumen Impor Beras, Kompas: 26 Maret 2021
- Ekonomi & Bisnis, Pemerintah Imor Beras 1Juta Hektare, Kompas: 5 Maret 2021
- Ekonomi & Bisnis, Petani Tak Setuju Impor Beras, Kompas: 12 Maret 2021
- Ekonomi, Gagap Setelah Gula Langka, Tempo: 20-26 April 2020
- <http://de223.4shared.com/doc/B-enF7S/preview.html>
- <http://nasa-banjarnegara.bogspot.com/2011/07/menembus-batas-produksi-padi-organik.html>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada 2045, Tempo: 28 November-4 Desember 2016
- Khudori, Salah Urus Impor 1 Juta Ton, Kompas, 12 Maret 2021
- Lia Amaliawiati, Asfia Murni. 2017. *Ekonomika Mikro*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi ke -2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Michael P.Todaro, Stephen c Smith. 2016. *Pembangunan Ekonomi* Julid 1, Edisi Kesebelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- N. Gregory Mankiw. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*, Alih Bahasa: Fitria Liza dan Nurmawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Opini, Krisis Pangan Di Tengah Pandemi, Tempo: 20-26 April 2020

Prabowo Subianto, et al. 2013. *Membangun Kembali Indonesia Raya Strategi Besar Transformasi Bangsa*, Cetakan Pertama. Jakarta: Institut Garuda Nusantara.

Ringkasan, Program Cetak Sawah Dinilai Tak Realistis, Tempo: 20-26 April 2020

Sadono Sukirno. 2013. *Makroekonomi: Pengantar Teori*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sapuan Gafar. 2016. *Operasi Bulog Keluar Dari Pakem*, Kompas, 2.

Soeharsono Sagir. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugartiningih. 2018. Influence of Tax, Unemployment and Political Stability to Indonesia Government Expenditure 1988-2016, *Jurnal IJET (International Journal of Engineering and Technology)*/Vol 7 No. 4.34.

Tulus T.H. 2014. *Tambunan, Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Indonesia: Ghalia.

www.sinartani.com/teknologi/libang-mancanegara/4191.html

www.sulsel.litbang.depan.go.id

Tentang Penulis



Sugiartiningsih, lahir di Madiun pada 15 Juli 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga serta program S2 dan S3 Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Saat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Penulis pernah mengajar di perguruan tinggi negeri Universitas Padjadjaran dan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Sangga Buana, STIE Ekuitas dan Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Widyatama. Penulis mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Pengantar Ilmu Ekonomika Makro, Perekonomian Indonesia, Perdagangan Internasional, Keuangan Internasional dan Ekonomi Bisnis.

BAB 6

DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

*Rosdiana Sjabat, S.E., M.Si., Ph.D.
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta*

A. Tujuan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Desentralisasi fiskal pada era reformasi dimulai sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Galela, 2016). Pada awal pelaksanaannya, UU No. 25 Tahun 1999 memiliki beberapa kelemahan karena kurang jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Alm et al., 2001; Brojonegoro & Asanuma, 2003). UU No. 25 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). UU ini menetapkan kerangka redistribusi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah di mana pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk mengelola anggaran sendiri dan juga untuk meningkatkan pendapatan untuk membantu mengimbangi pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan desentralisasi (Barr, Resosudarmo, McCarthy & Dermawan, 2006).

Desentralisasi fiskal dilakukan untuk menciptakan kemandirian daerah (Haryanto, 2017). Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan fungsi kepada pemerintah daerah (*power sharing*) yang juga disertai dengan pembagian sumber daya keuangan yang menandai (*financial sharing*). Pelimpahan wewenang diikuti dengan pelimpahan sumber daya tersebut dikenal sebagai prinsip *money follows function* (Wiyekti & Qibthiyah, 2021; Kharisma, 2013).

Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembentukan pendapatan asli daerah dari kegiatan ekonomi masyarakat (Kusuma, 2019).

Desentralisasi fiskal diikuti pembagian sumber daya keuangan yang dilakukan melalui transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak/Nonpajak (DBH). DAU dan DAK merupakan transfer finansial yang memiliki tujuan berbeda. DAU merupakan poin utama dari desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara DAK bertujuan mengurangi adanya kesenjangan horizontal antardaerah dengan memberi dana sesuai kebutuhan daerah tertentu. DAK dilakukan untuk menyamakan pelayanan publik di tiap daerah dengan prioritas utama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur administrasi publik, dan kehutanan (Galela, 2016). Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Christia & Ispriyarso, 2019). Dengan pemberian otonomi ke daerah dalam melakukan proses pemerintahannya, daerah dituntut untuk ikut mencari alternatif pendanaan dan juga menggunakan dana yang tersedia sesuai dengan aspirasi yang dimiliki masyarakat daerahnya.

B. Penerimaan Daerah

Desentralisasi fiskal menyebabkan perubahan pada skema penerimaan di pemerintah daerah. UU No 33 Tahun 2004 mengatur bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam sistem desentralisasi mencakup pendapatan daerah dan pembiayaan (Pasal 5). Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan. Sumber pendapatan daerah yang masuk pada kategori pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Desentralisasi fiskal

memberikan kewenangan pada daerah untuk mengumpulkan pendapatannya sendiri, terutama dari pengumpulan pajak dan retribusi daerah.

UU No 33 Tahun 2004 mengatur bahwa PAD terdiri dari berbagai jenis, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah. Semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menggali PAD kemudian diperkuat melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU ini memberi dasar yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (Hasan, 2014). Berikutnya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan yang dimaksud pada UU No 33 tahun 2004 mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH yang diterima pemerintah daerah bersumber dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari dua kategori, yaitu pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. DBH dari sumber daya alam bersumber dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dibandingkan dengan masa sebelum desentralisasi, dana bagi hasil sumber daya alam merupakan jenis baru bagi hasil yang diperkenalkan sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk memberi kompensasi yang lebih besar kepada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang merasa dieksploitasi secara berlebihan selama era Soeharto (Brodjonegoro, 2002).

Penerimaan sumber daya alam untuk ditransfer ke daerah yang datang dari sektor kehutanan, sektor pertambangan umum,

dan sektor perikanan dialokasikan yaitu sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Sementara itu, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam dibagi dengan proporsi masing-masing 85% dan 70% untuk pusat serta 15% dan 30% untuk daerah. Penerimaan pajak juga dialokasikan dengan persentase yang berbeda tiap jenisnya. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah sementara Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

Dana yang diterima Daerah namun berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut sebagai DAU. Besaran DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Besaran tersebut ditentukan berdasarkan celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah), untuk suatu daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan merupakan kebutuhan khusus yang dimiliki suatu wilayah tertentu. Kebutuhan khusus tersebut dapat diartikan sebagai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum serta kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Besaran DAK ditentukan menurut kemampuan keuangan daerah dalam APBD dan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah serta ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Dalam pelaksanaannya, daerah penerima DAK diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK, dengan pengecualian untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan, sumber ini berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat yang dapat memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD, dana pertimbangan maupun dari pinjaman daerah. Jenis pendapatan disebut sebagai hibah apabila hibah tersebut tidak mengikat. Hibah tersebut dapat bersumber dari luar negeri yang diatur menurut perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

Kemandirian pemerintah daerah dari sisi keuangan daerah masih relatif rendah. Menurut Dongche (2021), secara finansial, dari total 503 pemerintah daerah di Indonesia, hanya sekitar 12 persen yang mandiri secara keuangan dan tidak tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sementara terdapat 88,7 persen (443 pemda) di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah di tahun 2020. Rendahnya kemandirian fiskal tersebut terjadi karena rendahnya proporsi PAD dibandingkan dengan transfer dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan kekuatan pajak lokal dengan menambahkan “Pajak lokal murni” ke dalam penetapan pajak lokal, mengintensifkan pemungutan pajak daerah, serta melarang atau menghapus semua jenis pungutan lokal baru yang melanggar hukum dan peraturan yang ada (Brodjonegoro, 2002). Kemampuan peningkatan kemampuan keuangan daerah tersebut sangat penting karena pelaksanaan desentralisasi fiskal telah memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Lebih penting lagi, implementasi desentralisasi fiskal tidak akan optimal dilakukan jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai dibanding pemerintah pusat (Rodden & Rose-Ackerman, 1997).

Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat juga menjadi suatu tantangan. Galela (2016) menemukan adanya dampak negatif dari nilai dana perimbangan yang besar, yaitu potensi hilangnya motivasi daerah untuk meningkatkan PAD. Argumen tersebut didukung dengan fakta bahwa persentase dari PAD cenderung konstan meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan

dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan kurangnya desentralisasi dalam masalah penerimaan pemerintah daerah jika dibandingkan dengan masalah pengeluaran. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas tersebut juga menjadi indikasi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal cenderung pada sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah (Kharisma, 2013). Sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal, peran dari PAD masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran dana perimbangan dari pusat dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah oleh pemerintah daerah (Kharisma, 2013).

C. Belanja Daerah

Dari segi pengeluaran atau belanja, desentralisasi fiskal memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi daerah, sementara pemerintah pusat berperan memberikan masukan serta melakukan pengawasan (Haryanto, 2017). Mengacu pada UU No 33 Tahun 2004, belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam konteks desentralisasi, belanja daerah ini dapat dibagi menjadi dua, yakni belanja daerah menurut fungsi dan jenis belanja. Menurut fungsinya, belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan belanja daerah menurut jenis mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Secara umum, desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran atau belanja memiliki dampak positif karena pemerintah daerah mendapat kebebasan dalam mengelola kebijakan anggaran, pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dan pengetahuan akan masalah lokal yang juga meningkat (Kurniawan, 2012). Secara empiris, desentralisasi fiskal juga ditemukan berdampak meningkatkan belanja pemerintah daerah, utamanya dalam belanja rutin, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah (Kusuma, 2019). Studi lain menemukan bahwa peningkatan dana untuk desentralisasi, yaitu dana perimbangan, berpengaruh positif terhadap jumlah belanja publik. Kemudian, peningkatan belanja publik membuat daerah otonom meningkatkan kapasitas fiskalnya lebih jauh lagi (Soejoto, Subroto, & Suyanto, 2015).

Selain dampak positif dari desentralisasi fiskal, terdapat pula potensi munculnya beberapa dampak negatif (Galela, 2016: 62-63). Pertama, pelaksanaan pelayanan publik oleh masing-masing daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam skala ekonomi penyediaan pelayanan publik. Masalah skala ekonomi ini semakin membesar setelah adanya pemekaran wilayah di awal 2000-an. Pemerintah provinsi dapat mengurangi dampak negatif ini dengan melakukan inisiasi skala ekonomi di tingkat provinsi. Kedua, desentralisasi mengakibatkan besarnya pengeluaran untuk belanja pegawai karena penggelembungan birokrasi. Ketiga, semakin besarnya struktur birokrasi setelah pelaksanaan desentralisasi telah meningkatkan kemungkinan pengeluaran yang tidak efisien karena terjadinya korupsi. Dengan terjadinya korupsi, alokasi anggaran akan menjadi tidak tepat sasaran dan tujuan utama desentralisasi menjadi tidak terlaksana dengan baik. Keempat, desentralisasi dapat mengakibatkan fragmentasi pasar apabila arus barang/jasa serta faktor produksi antardaerah dibatasi. Fragmentasi pasar dapat mengakibatkan penurunan efisiensi karena pasar tidak dapat bekerja dengan optimal.

Tantangan lain pembelanjaan pada era desentralisasi adalah terkait dengan standar pelayanan publik. Tidak adanya standar minimum untuk layanan publik membuat aspek pengeluaran dalam proses desentralisasi otonomi tampak lebih lemah dibandingkan dengan penerimaan yang teregulasi secara jelas lewat dana perimbangan (Brodjonegoro, 2002). Pengadaan standar minimal pelayanan publik akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan yang layak bagi masyarakatnya. Standar minimum juga akan membantu pemerintah daerah dalam memperkirakan total kebutuhan mereka secara lebih akurat termasuk perkiraan yang lebih baik untuk

kebutuhan setiap sektor pembangunan. Upaya untuk mengatasi pengaruh negatif dari desentralisasi telah dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan, baik antisipatif maupun reaktif, dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Haryanto, 2017). Selain itu, UU No 25 Tahun 1999 yang sudah menjadi UU No. 23 Tahun 2014, semakin menguatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta menyempurnakan mekanisme pembiayaan.

D. Pinjaman Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman pemerintah daerah bertujuan untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. UU tersebut menegaskan bahwa pinjaman daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan batas maksimal kumulatif tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari produk domestik bruto tahun bersangkutan. Pinjaman daerah ini dapat bersumber dari pemerintah pusat melalui menteri keuangan, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Mekanisme pinjaman daerah diperjelas pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah. Pinjaman pemerintah daerah tersebut dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber dalam negeri, pinjaman pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri. Sumber pinjaman pemerintah daerah dari luar negeri diperoleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari pemberi pinjaman yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara. Dari sisi durasi waktu, pinjaman daerah dikelompokkan menjadi pinjaman jangka pendek, pin-

jaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek bertujuan menutup kekurangan arus kas pemerintah daerah, di mana pinjaman ini memiliki durasi kurang atau sama dengan satu tahun di mana seluruh kewajiban terkait pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka menengah dilakukan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah dan harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan (Pasal 13). Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman untuk periode lebih dari satu tahun, hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah tersebut dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Pengajuan pinjaman daerah perlu mempertimbangkan kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kewajiban melunasinya. Pemerintah pusat tidak dapat ikut campur jika sumber utang berasal dari dalam negeri kecuali jika sumbernya adalah pemerintah pusat itu sendiri. Jika pinjaman berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Jika sumbernya dari luar negeri, maka proses peminjaman harus dilakukan melalui kementerian keuangan. Kementerian keuangan, atas nama pemerintah pusat, akan mengevaluasi kelayakan proposal dan setelah disetujui, pemerintah daerah dapat bernegosiasi langsung dengan pemberi pinjaman asing. Hasil negosiasi harus disetujui oleh pemerintah pusat sebelum pemerintah daerah menandatangani perjanjian dengan pemberi pinjaman asing tersebut (Brodjonegoro, 2002). Selain itu, agar keberlangsungan fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah dapat terjaga, perlu ditetapkan batas maksimum jumlah pinjaman daerah. Batas tersebut diatur pada PP No. 56 tahun 2018, nilai rasio kemampuan (*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset publik dan tidak dapat menjaminkan sesuatu untuk dapat mengajukan pinjaman. Kemampuan mengembalikan pinjaman harus didasarkan pada persoalan pengelolaan anggaran daerah, bukan pada aset suatu daerah. Kementerian keuangan secara tidak langsung dapat mengidentifikasi beberapa pemerintah daerah yang mungkin memiliki masalah serius dengan pinjaman dan mengeluarkan kebijakan nasional yang dapat menghentikan kemungkinan pinjaman untuk pemerintah daerah bersangkutan. Dalam hal pinjaman daerah, DPRD merupakan pihak penting yang dapat menyelamatkan pemerintah daerah dari melakukan kesalahan dalam melakukan pinjaman, karena DPRD yang menyetujui proposal pinjaman di awal. Sebelum mengkaji setiap proposal pinjaman pemerintah daerah, DPRD melalui panitia anggaran harus dapat menetapkan pinjaman maksimum yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan situasi anggaran saat ini (Brodjonegoro, 2002).

Daftar pustaka

- Alm, J., Aten, R. H., & Bahl, R. 2001. Can Indonesia decentralize succesfully? Plans, problems, and prospects. *Bulletion of Indonesian Economic Studies*, 83-102.
- Aswar, K., & Surbakti, L. P. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Indonesia. *Proceeding PESAT*, 5.
- Barr, C., Resosudarmo, I., McCarthy, J., & Dermawan, A. 2006. Forests and decentralization in Indonesia: an overview. In C. Barr, I. Resosudarmo, J. McCarthy, A. Dermawan, M. Moelinono, & B. Setiono, Decentralization of forest administration in Indonesia. Implication for forest sustainability, economic development and community livelihoods (pp. 1-17). Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research
- Brodjonegoro, B. 2002. Fiscal decentralization in Indonesia. *Governance in Indonesia*, 282-304.
- Brojonegoro, B., & Asanuma, S. 2003. Indonesia's Decentralization Policy: Origins, Issues, Policy Direction. Jakarta: University of Indonesia.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Dongche, Y. 2021. Hanya 12 Persen Pemda Tak Bergantung pada Pusat. Retrieved Agustus 2, 2021, from <https://infoanggaran.com/detail/hanya-12-persen-pemda-tak-bergantung-pada-pusat>
- Galela, M. R. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Perluakah Desentralisasi Fiskal Diperluas? *Info Artha*, 4(4), 59-68.
- Haryanto, J. T. 2017. *Desentralisasi fiskal seutuhnya*. Jakarta: Kemenkeu RI. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>

- Hasan, P. P. 2014. Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah: (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(2), 1-21.
- Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.
- Kurniawan, D. 2012. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 218209.
- Kusuma, H. 2019. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1-11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- Rodden, J., & Rose-Ackerman, S. 1997. Does federalism preserve markets? *Virginia law review*, 1521-1572.
- Sadu, W., & Petrus, P. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinagor.
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. 2015. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3).
- UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU No 28 Tahun tentang Pajak dan retribusi Daerah.
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tentang Penulis



Rosdiana Sijabat adalah pengajar di Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Rosdiana menyelesaikan gelar PhD pada kajian ilmu ekonomi dan kebijakan publik di Flinders University, Australia. Gelar Sarjana (*cum laude*) dan Magister Sains Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rosdiana memfokuskan penelitiannya pada keuangan publik dan *fiscal federalism*. Keahliannya yang lain meliputi ekonomi bisnis, ekonomi terapan, dan analisis kebijakan.

Korespondensi: rosdiana.sijabat@atmajaya.ac.id

BAB 7

INOVASI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI MASA PANDEMI

Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA.

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) AAN Yogyakarta

Pandemi Covid-19 mengguncang dunia. Berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia, merasakan dampaknya. Virus corona yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020 ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Tidak sedikit perusahaan yang harus tutup usaha karena tidak mampu membiayai operasional kegiatan sehingga terjadi pemutusan kerja yang besar-besaran bagi para pekerja. Banyak pasar dan toko sepi dikunjungi pembeli karena khawatir terkena persebaran virus yang kabarnya sangat cepat dan ganas ini. Tidak hanya warga yang tinggal di perkotaan yang terkena dampak, kawasan perdesaan juga kena imbasnya. Karena itu, desa diharapkan bisa sebagai tulang punggung kebangkitan perekonomian masyarakat, apalagi di tengah wabah yang mengglobal ini.

Berdasarkan data per 3 Agustus 2021

(www.worldometers.info/coronavirus), sudah ada 200.187.759 kasus terkonfirmasi positif virus corona di seluruh dunia, dengan 4.257.752 kasus kematian. Di Indonesia sendiri, ada 3.496.700 kasus positif, dengan 98.889 kasus kematian. Dengan situasi pandemi yang masih berlangsung hingga tulisan ini diturunkan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk bagaimana membangun ketahanan ekonomi, pangan, sosial, dan berbagai bidang kehidupan lainnya sebagai dampak dari “Amukan” virus corona ini.

Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat, termasuk desa. Dampak yang dirasakan tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga perekonomian warga. Pandemi Covid-19 ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi desa, terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk menata kembali pengembangan ekonomi buat masyarakat. BUMDes ternyata punya peran yang sangat besar dalam membangkitkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, namun dengan dukungan inovasi dan teknologi yang memadai.

Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa masa depan tidak lagi terletak di kota, tetapi desa memiliki peran yang sangat besar, mengingat ada lebih dari 75 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, desa menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, apalagi di saat negara sedang diterpa krisis akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Ia menambahkan, yang diperlukan adalah bagaimana mendorong inovasi dan digitalisasi masuk desa (<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/12/174432220/desa-tulang-punggung-ekonomi-bangsa-saat-pandemi-belum-usai?page=all>).

A. Inovasi Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memberi harapan besar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih inovatif dan partisipatif. Selain memberi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, UU ini juga bisa meningkatkan kapasitas keuangan desa. Dengan sumber pendanaan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa memiliki kewenangan dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, dituntut perlunya inovasi untuk membuat program-program pemerintahan dan pembangunan yang sesuai tuntutan di era Revolusi Industri 4.0.

UU Desa memberi ruang bagi pengembangan desa cerdas, desa yang memiliki inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan

pembangunan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa, pemerintah dan masyarakat desa bisa berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan. Menurut hasil penelitian Santoso ddk (2019:8), keberadaan Desa Cerdas dilatarbelakangi karena dua faktor. *Pertama*, adanya peningkatan tren penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan TIK secara umum bisa digunakan sebagai media bagi stakeholder tata pemerintahan untuk memaksimalkan peran dan potensi mereka. *Kedua*, adanya kebutuhan untuk mewujudkan demokratisasi di desa. Proses demokratisasi ini membuka ruang untuk menciptakan desa cerdas karena akan menciptakan peran aktif masyarakat dan meminimalisasi adanya kecenderungan kekuasaan yang terpusat. Apalagi, pemanfaatan TIK mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Program Inovasi Desa (PID) merupakan kebijakan dari pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Tujuan dari PID adalah untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam jangka menengah, PID diharapkan bisa mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kemendes PDTT pada RPJM 2015-2019. Meski Keputusan Kemendes PDTT ditetapkan pada tahun 2017, namun pelaksanaan inovasi desa masih berlanjut hingga kini.

Seperti tertuang dalam latar belakang Kemendes No 93 itu, PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa dengan orientasi untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan program prioritas Kemendes PDTT melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada empat hal. *Pertama*, penguatan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik dalam ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes), dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian desa. *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya kaitan antara produktivitas perdesaan dan kualitas SDM, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. *Ketiga*, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa, dan memiliki dampak untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Ruang lingkup PID mencakup empat hal. *Pertama*, pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, yang terdiri atas penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa; peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis; dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa. *Kedua*, program penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan PID. P3MD adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan desa, sedangkan PID untuk meningkatkan penggunaan dana desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. *Ketiga*, Program Pengembangan Eksekutif (PPE), yakni kegiatan peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kemendes PDTT tentang visi, pengambilan keputusan, program manajemen, dan mitigasi risiko. *Keempat*, Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa, yang dimaksudkan untuk memberi dana stimulan dan asistensi teknik kepada desa terpilih agar bisa mengembangkan produktivitas perekomiannya. Pengelolaan PID adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip taat hukum, transparan, akuntabilitas, partisipatif, inklusif, dan kesetaraan gender.

Inovasi desa yang berkembang belakangan ini adalah dengan pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana akan fokus mengembangkan program “*One Village One Innovation*” untuk 126 desa yang memiliki sektor teknologi tepat guna (TTG). Berdasarkan UU Desa, program ini melibatkan empat sektor, yakni pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemenristek/BRIN, kalangan dunia usaha, komunitas, dan kalangan kampus. Inovasi desa dalam program ini terfokus pada teknologi tepat guna dan pengembangan ekonomi lokal program inovasi desa (PELPID). Pilot inkubasi PELPID oleh Kemendes PDTT adalah Kawasan Wisata Goa Pindul, Gunungkidul, Yogyakarta, yaitu Bejiharjo Edupark (<https://news.detik.com/berita/d-5074654/kemendes-bidik-recovery-ekonomi-desa-dengan-inovasi-ttg>).

B. Peran BUMDes

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat. Tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah upaya memperkuat perekonomian desa dengan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan BUMDes merupakan salah satu model pengembangan masyarakat. Menurut Jack Rothman dalam karyanya berjudul *Three Models of Community Organization Practice* (1968), sebagaimana dikutip Suharto (2014:42), ada tiga model dalam pengembangan masyarakat, yaitu (1) Pengembangan masyarakat lokal; (2) Perencanaan Sosial; dan (3) Aksi sosial. Berdasarkan model ini, BUMDes merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat lokal yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan aktif atau partisipasi serta adanya inisiatif dari anggota masyarakat itu sendiri.

Amanat di dalam UU Desa adalah kewajiban bagi desa untuk membentuk BUMDes. Jumlah unit usaha milik desa mengalami peningkatan setelah UU Desa ini. Menurut data dari World Bank (2017), jumlah BUMDes pada 2016 mencapai 22.000, yang 4.000 di antaranya bisa menghasilkan keuntungan dan berkontribusi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Pada 2018, jumlah BUMDes meningkat lagi menjadi 39.000 dari 74.958 desa yang ada di Indonesia (Santoso ddk, 2019:vii). Data ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes rupanya memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa.

BUMDes merupakan pendekatan baru pemerintah dalam upaya menstimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, yakni lewat pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Layaknya demokratisasi di bidang politik dan pemerintahan, pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip “Dari desa, oleh desa, dan untuk desa” sehingga masyarakat di desa memiliki peran dalam membangun lewat fasilitasi pemerintah desa. Cara kerja yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional (Prihatin, 2018: 3).

BUMDes, sebagai representasi pemerintah desa, memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan persoalan ekonomi menjadi semakin kompleks, yang tentunya juga dihadapi masyarakat di desa, di antaranya adalah kesulitan produsen, seperti petani, untuk memasarkan hasil produksi mereka. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga paling terkena dampaknya. UMKM termasuk pelaku ekonomi yang dominan di masyarakat, tapi mereka kesulitan untuk berkegiatan usaha di saat daya beli masyarakat menurun drastis di masa pandemi ini. Dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan alias menganggur, beban ekonomi desa menjadi meningkat karena tidak sedikit pendatang di kota-kota besar yang pulang kampung setelah mereka kehilangan pekerjaan atau usaha mereka menjadi sepi sebagai akibat dari dampak penyebaran virus corona.

C. Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa

Inovasi pengembangan ekonomi desa menjadi sebuah keniscayaan di era pandemi saat ini. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan memberdayakan BUMDes. Dalam sebuah seminar Rural Corner yang diselenggarakan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), Kamis, 18 Juni 2020, Sukasmanto, M.Si., peneliti dari Institute Research and Empowerment (IRE), mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 adalah momentum yang bagus bagi BUMDes untuk memikirkan ulang orientasi perusahaan, bukan hanya pada unit bisnis, tetapi juga memerankan fungsi sosial, yakni dengan membangun jaringan pengaman sosial bagi masyarakat. Menurutnya, BUMDes perlu melakukan konsolidasi lembaga serta merefleksikan keadaan saat ini dan melakukan transformasi organisasi, orientasi, dan eksistensinya. Hal ini dilakukan agar BUMDes bisa memberi kontribusi yang maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan di desa sebagai akibat dari pandemi. Selain itu, BUMDes juga perlu mengembangkan strategi bisnis yang baru, yakni mengalihkan usaha yang terdampak Covid-19 ke yang tidak terdampak, mendorong pemerintah desa untuk menambah penyertaan modal, melakukan konsolidasi, dan membangun kemitraan dengan para pelaku ekonomi lokal (<https://pspk.ugm.ac.id/2020/06/20/bumdes-dan-pengembangan-ekonomi-lokal-pada-masa-pendemi-covid-19/>).

Pemateri lainnya, Subejo, Ph.D., dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada ketahanan pangan. Akibat dari pembatasan sosial dan kebijakan pembatasan ekspor bahan pangan yang diterapkan oleh negara pengekspor bahan pangan, mobilitas barang dan jasa domestik menjadi terhenti. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi krisis pangan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, menurutnya, BUMDes memiliki peran yang penting terkait ketahanan pangan ini. Beberapa kegiatan dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi,

tetapi dengan catatan harus ada inovasi yang dikedepankan dan memiliki jenis usaha yang belum banyak dilakukan oleh pihak lain (<https://pspk.ugm.ac.id/2020/06/20/bumdes-dan-pengembangan-ekonomi-lokal-pada-masa-pandemi-covid-19/>).

Salah satu strategi pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes adalah dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebagai bentuk inovasi yang sangat penting di era Revolusi Industri 4.0, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Banyak BUMDes kini mulai beralih fokus pengembangan ekonomi dengan pemanfaatan TIK ini. Hasilnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan jenis inovasi semacam ini. Salah satu inovasi desa yang mengundang perhatian publik adalah PasarDesa.id.

Program inovasi desa yang digagas Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, dengan nama PasarDesa.id adalah platform yang awalnya dibentuk sebagai mitigasi ketahanan ekonomi masyarakat desa di tengah wabah virus corona. Tujuannya untuk menjembatani toko-toko yang terdampak, namun tidak bisa berjualan, dengan orang-orang yang masih mempunyai daya beli. PasarDesa.id, yang memiliki empat nilai, yakni mitigasi, solidaritas, kolaborasi, dan ekonomi berbagi, kini berkembang sangat pesat, baik dari jumlah mitra yang bergabung maupun jumlah pendapatannya.

Ada beberapa pengalaman dari daerah atau desa lain yang memiliki inovasi pengembangan ekonomi di masa pandemi ini. *Pertama*, platform KUPESAN di Kota Bengkulu. Berbeda dengan PasarDesa.id yang di inisiasi lewat Pemerintah Desa Panggungharjo, platform KUPESAN justru di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Pemerintah daerah membuat kebijakan atau inovasi untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah. Bekerja sama dengan dinas koperasi dan UKM, Pemkab Bengkulu membuat aplikasi atau platform ini agar masyarakat bisa tetap memiliki peluang untuk mendapat pekerjaan sekaligus pemasukan selama masa pandemi. Dengan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis digital ini, masyarakat didorong untuk tetap bisa berdagang secara online. KUPESAN merupakan

layanan makanan dan belanja sayuran, buah-buahan, dan barang sembako. Pasar digital ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk di desa, agar terjadi peningkatan penghasilan petani, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, dan bisa membuka lapangan kerja yang baru (<https://localisedgs-indonesia.org/beranda/cs/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-berbasis-digital-pada-masa-pandemi-di-kota-bengkulu-melalui-platform-kupesan>).

Kedua, Warung Kopi (Warkop) Digital di Desa Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, yang di inisiasi oleh Bencoolen Coffee. Warung ini awalnya biasa saja, namun disulap menjadi warung penuh informasi dan edukasi. Pengunjung atau konsumen bisa mengakses semua kebutuhan, selain minum kopi atau mengonsumsi beragam makanan dan minuman tentunya, tetapi mereka juga bisa belajar daring sampai membayar listrik atau membeli pulsa karena warung ini juga difasilitasi dengan internet dan layar televisi. Program Warkop Digital ini menyelaraskan Desa Wisata (DEWI) dan Desa Digital (DEDI) sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa (<https://www.jpnn.com/news/musim-pandemi-warkop-digital-mengakselerasi-ekonomi-desa>).

Ketiga, produksi sabun cair di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Untuk mendongkrak ekonomi warga di tengah pandemi, sekelompok pemuda memiliki ide untuk memproduksi sabun cair. Ide ini sangat relevan dengan imbauan pemerintah tentang 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada tahap awal, sabun cair yang diproduksi Tunas Muda adalah enam liter, kemudian berkembang menjadi delapan liter. Sebelum masuk pasar, sabun cair diuji coba terlebih dahulu ke sejumlah warga yang hasilnya cukup memuaskan sehingga mereka percaya diri untuk mengembangkan produk ekonomi ini (<https://faktualnews.co/2020/11/19/inovasi-di-tengah-pandemi-pemuda-desa-kwaron-jombang-produksi-sabun-cair/243610/>).

D. Belajar dari Desa Panggungharjo

Pandemi Covid-19 memberikan ancaman yang besar bagi kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini datang bak tamu yang tidak diundang, yang ketika sudah masuk ke rumah kita menjadi sangat sulit untuk diusir jauh-jauh. Badan Pangan Dunia (Food Agriculture Organization) sudah memberi peringatan terkait kemungkinan terganggunya ketahanan pangan akibat dari wabah Covid-19 ini. Masa pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir menyebabkan ketersediaan pangan dan konsumsi warga menjadi terganggu.

Atas dasar itulah, Lurah Desa Panggungharjo di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi, menggagas pembentukan *PasarDesa.id*. Platform ini dibentuk awalnya sebagai mitigasi ketahanan ekonomi di Desa Panggungharjo dengan tujuan untuk menjembatani toko-toko yang terdampak, namun tidak bisa berjualan, dengan orang-orang yang masih mempunyai daya beli. *PasarDesa.id* merupakan salah satu bentuk Program Inovasi Desa (PID) yang dibutuhkan seiring dengan perkembangan ekonomi dunia dan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0, apalagi di saat krisis dengan adanya pandemi Covid-19.

PasarDesa.id mulai digagas oleh Lurah Wahyudi pada akhir Maret 2020. Gagasan itu langsung direspons oleh mereka yang bekerja di Sanggar Inovasi Desa (SID) dengan membuat platform yang selesai dalam waktu hanya satu pekan. Menurut Lurah Wahyudi, *PasarDesa.id* dibangun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ada empat nilai yang mendasari pembuatan platform ini, yakni mitigasi, solidaritas, kolaborasi, dan ekonomi berbagi. Dalam pengertian nilai mitigasi, platform ini tidak hanya menjaga stabilitas pasar, tetapi ikut mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Platform ini menciptakan nilai solidaritas karena pembeli yang belanja paket sembako di atas Rp 250 ribu akan mendapat *cashback* sebesar 20 persen yang berwujud sembako yang diberikan kepada warga desa yang membutuhkan. Model belanja-sosial ini mengandung makna adanya ekonomi berbagi. Terkait nilai kolaborasi, platform ini

memberdayakan seluruh warung dan toko yang ada di desa sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok (<http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/469845/inovasi-desa-di-tengah-pandemi-corona>).

Pasardesa.id, yang diresmikan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi pada 13 April 2020, meraih sejumlah penghargaan, di antaranya dari Indonesia Smart Nation Award sebagai salah satu inovasi dalam pemulihan ekonomi dan menjadi Top 21 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditetapkan oleh UNOSSC (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus kerja sama negara selatan) sebagai salah satu pusat keunggulan desa. Pasardesa.id mendapatkan pendapatan dalam 25 hari pertama beroperasi sebesar Rp 100,69 juta. Pendapatan itu didapat setelah 2.480 transaksi yang menjual 668 produk dari 57 mitra pasok di Desa Panggungharjo. Setelah berjalan selama beberapa bulan, pendapatan meningkat drastis menjadi sekitar Rp 1,6 miliar hingga Oktober 2020. Pendapatan itu diraih setelah melalui 6.000-an transaksi yang menjual sekitar 4.000 produk dari 152 mitra UMKM dari lima kecamatan di Kabupaten Bantul (<http://kagama.co/bantu-mitigasi-ekonomi-warga-pasardesa-id-besutan-lurah-panggungharjo-raih-pendapatan-rp16-miliar/3>).

Penutup

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting bagi kita tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi krisis, apalagi yang berkepanjangan dan berjangka panjang. Pandemi ini memberikan tantangan bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia, untuk bisa merespons dengan cara yang terbaik. Bukan hanya masyarakat di perkotaan, dampak dari pandemi ini juga menimpa masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk bisa merancang dan mengimplementasikan program-program pengembangan ekonomi dengan inovasi dan teknologi mutakhir. Saat ini, sudah banyak muncul inovasi yang dilakukan desa-desa untuk bagaimana caranya meningkatkan

perekonomian masyarakat di tengah krisis global akibat virus corona. Semoga pelajaran dari pandemi ini bisa membuat kita semakin inovatif!

Daftar Pustaka

- Hermawan, Fajar Wahyu. 2020 Inovasi Desa di Tengah Pandemi Corona. Available at: <http://infopublik.id/kategori/sorosial-budaya/469845/inovasi-desa-di-tengah-pandemi-corona> (Accessed: 10 February 2021).
- JPNN. 2021. Musim Pandemi, Warkop Digital Mengakselerasi Ekonomi Desa. Available at: <https://www.jpnn.com/news/musim-pandemi-warkop-digital-mengakselerasi-ekonomi-desa> (Accessed: 21 February 2021).
- Kagama. 2020. Bantu Mitigasi Ekonomi Warga, Pasardesa.id Besutan Lurah Panggunharjo Raih Pendapatan Rp 1,6 Miliar. Available at: <http://kagama.co/bantu-mitigasi-ekonomi-warga-pasardesa-id-besutan-lurah-panggunharjo-raih-pendapatan-rp16-miliar/3> (Accessed: 2 February 2021).
- Maarif, Nurcholis. 2020. Kemendes Bidik Recovery Ekonomi Desa dengan Inovasi TTG. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5074654/kemendes-bidik-recovery-ekonomi-desa-dengan-inovasi-ttg> (Accessed: 21 February 2021).
- Muji, Lestari. 2020. Inovasi di Tengah Pandemi, Pemuda Desa Kwaron Jombang Produksi Sabun Cair. Available at: <https://faktualnews.co/2020/11/19/inovasi-di-tengah-pandemi-pemuda-desa-kwaron-jombang-produksi-sabun-cair/243610/> (Accessed: 12 February 2021).
- Nabila, Marsha. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital pada Masa Pandemi di Kota Bengkulu Melalui Platform KUPESAN. Available at: <https://localisedgs-indonesia.org/beranda/cs/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-berbasis-digital-pada-masa-pandemi-di-kota-bengkulu-melalui-platform-kupesan> (Accessed: 21 February 2021).

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Prihatin, Rohani Budi. 2018. BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing.
- PSPK UGM. 2020. BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19. Available at: <https://pspk.ugm.ac.id/2020/06/20/bumdes-dan-pengembangan-ekonomi-lokal-pada-masa-pendemi-covid-19/> (Accessed: 21 February 2021).
- Santoso dkk. 2019. Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespons Era Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Center for Digital Society dan IGPA Universitas Gadjah Mada.
- Siddiki, Rusmadi dkk. 2018. Evaluasi Program Inovasi Desa (PID) dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPMM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Makassar. Available at: <https://repositori.stialanmakassar.ac.id/items/show/37> (Accessed: 7 February 2021).
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, Reni. 2020 Desa, Tulang Punggung Ekonomi Bangsa saat Pandemi Belum Usai. Available at:

<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/12/174432220/desa-tulang-punggung-ekonomi-bangsa-saat-pandemi-belum-usai?page=all> (Accessed: 21 February 2021).

Worldometer. 2021. Covid-19 Coronavirus Pandemic. Available at: www.worldometers.info/coronavirus (Accessed: 3 August 2021).

Tentang Penulis



Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA, yang lahir di Jakarta, 3 April 1980, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) AAN Yogyakarta. Menyelesaikan studi S1 di Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Islam '45 (Unisma) Bekasi pada 2004. Studi S2-nya ditempuh di Sekolah Pascasarjana Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (lulus 2006) dan Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta (lulus 2017). Buku-bukunya yang sudah terbit di antaranya adalah: *Zamrud Khatulistiwa: Negeri yang Unik* (Citra Aji Parama, 2013), *Panduan Lengkap Menyusun Proposal* (Visimedia, 2010), *Proposal Tepat Bisnis Melesat: Kiat Jitu Menggolkkan Proposal* (Visimedia, 2009) dan *Panduan Praktis Menyusun Proposal* (Visimedia, 2008), *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visimedia, 2008); *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Visimedia, 2008); *Nikah Siri, Apa Untungnya?* (Visimedia, 2007). Ia aktif menulis di beberapa surat kabar nasional, seperti *Kompas*, *Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Sinar Harapan*, dan *Jawa Pos*.

BAB 8

KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

Dr. (C) Suhatman, S.Pd., M.Si.

Dosen STIE Pariaman Sumatera Barat

Munculnya aliran ekonomi kelembagaan merupakan bentuk protes dari mazhab ekonomi klasik maupun neoklasik, pada umumnya aliran neoklasik banyak digunakan oleh negara-negara maju dengan mekanisme pasar persaingan bebas untuk mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*Pareto Optimal*). Ada hal-hal yang tidak mendapat perhatian dari mazhab ekonomi klasik, seperti adanya *invisible hands*, jika tidak terdapat aturan maka hukum rimbalah yang akan terjadi, yang kuat akan semakin kuat dan yang lemah akan semakin lemah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Veblen bahwa terdapat budaya yang barbar dalam berkompetisi di pasar bebas, kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya kegagalan atau yang dikenal dengan istilah kegagalan pasar (*market failure*). Dengan memahami ekonomi kelembagaan kita dapat belajar dari kegagalan-kegagalan yang ditemui pada asumsi klasik. Kegagalan pasar ini terjadi karena terdapat hal-hal yang diabaikan oleh asumsi klasik maupun neoklasik. Ekonomi kelembagaan mencoba mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut.

Dalam pembahasan selanjutnya penulis akan membagi tulisan ini kedalam 3 (tiga) sub bagian yaitu 1) kegagalan ekonomi neoklasik, 2) ekonomi kelembagaan dan 3) ekonomi kelembagaan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

A. Kegagalan Ekonomi Neoklasik

Mazhab ekonomi Neoklasik sudah begitu dominan pemakaiannya pada hampir sebagian besar negara di dunia. Menurut Santoso

(2010), ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II, dirintis oleh buku Paul Samuelson yang berjudul *Economics An Introductory Analysis*. Inti ajaran yang dikemukakan oleh Samuelson dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasik. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik (*homo ekonomikus* dan *invisible hand* Adam Smith), dan ajaran *marginal utility* serta keseimbangan umum. Penekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekali pun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*Pareto Optimal*).

Dominasi aliran ekonomi neoklasik ini disebabkan keberhasilan negara-negara maju dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga berdampak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar negara berkembang ingin maju dengan mempelajari kemajuan negara-negara maju dalam segala aspek termasuk ekonomi. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa aliran ekonomi Neoklasik mungkin saja cocok bagi negara maju, akan tetapi tidak untuk negara sedang berkembang dan perlu diadakan penyesuaian. Kenyataan ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang sangat berbeda antara negara maju dan sedang berkembang.

Pemakaian aliran ekonomi Neoklasik di negara maju pun banyak mendapat kritikan, terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan maupun berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Terdapatnya krisis multi dimensional di dunia merupakan bentuk kegagalan pemakaian dan penerapan ajaran neoklasik. Melihat itu maka banyak pihak yang ingin melihat kegagalan tersebut baik secara filosofis maupun dari aspek sosial-ekonomi.

B. Kegagalan Secara Filosofis

Pada setiap kampus di dunia dalam pengajaran ilmu ekonomi, mengajarkan mazhab ekonomi neoklasik. Ciri khas dari mazhab ekonomi neoklasik adalah begitu dominannya pemakaian metode kuantitatif dalam melakukan analisis ekonomi. Seolah-olah bagi mahasiswa dan dosen di Fakultas Ekonomi, belum bergengsi dan berbobot kalau belum memakai pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Kebiasaan penggunaan alat analisis kuantitatif sebenarnya tidak terlepas dari kedekatan ilmu ekonomi dengan ilmu eksakta, yang tak terlepas dari paradikma positivisme. Terdapat anggapan tidaklah ilmiah suatu disiplin ilmu kalau tidak memakai pendekatan kuantitatif, maka tidaklah mengherankan kalau ilmu ekonomi mendapatkan julukan sebagai rajanya ilmu-ilmu sosial.

Kritik yang bertumpu kepada aliran ekonomi Neoklasik secara filosofis sebenarnya bertumpu kepada bias yang terlalu memutlakkan kepada paradigma positivisme, yang melihat realitas hanya dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang sering tidak realistis. Realitas empiris yang terjadi merupakan refleksi dari kondisi deterministik serta hanyalah sebuah materi belaka dan bagaikan sebuah mesin, sehingga perbaikannya hanyalah bertumpu kepada unsur-unsur yang ada dalam mesin tersebut. Analisis yang terlalu sederhana dan steril ini pada kenyataannya bisa berlainan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan paradikma yang holistik, di mana metodologi pendekatan eksperimental melalui observasi dipandang tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode, sumber data, periset dan teori. Teori kritis dalam memandang suatu realitas penuh dengan muatan ideologi tertentu, seperti neo-Marxisme, materialisme, feminisme, dan paham lainnya. Masa mendatang perkembangan ilmu akan menjurus kepada studi lintas ilmu di mana unsur spiritualitas dan moralitas harus mendapat porsi utama.

C. Kegagalan Aspek Sosial-Ekonomi

Gunnar Myrdal yang dikenal sebagai salah satu ekonom aliran Kelembagaan dan memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1974 menyatakan teori ekonomi yang sekarang diajarkan dan diaplikasikan di seluruh dunia adalah berbasis kepada aliran Neoklasik yang cocok untuk negara maju. Menurutnya teori tersebut tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang atau sedang berkembang, oleh karenanya bagi negara sedang berkembang diperlukan teori yang berbeda dengan negara maju karena perbedaan masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.

J.H. Boeke (1910) dalam disertasinya mengatakan bahwa untuk negara sedang berkembang perlu dikembangkan teori ekonomi tersendiri, yang berlainan dengan negara maju (Barat). Yang menjadi objek penelitiannya adalah dualisme sosial-ekonomi pada masyarakat Hindia Belanda (Indonesia). Satu sisi, pada masyarakat maju (perkebunan yang dikuasai oleh Belanda) berlaku prinsip ekonomi yang berujung pada pengejaran keuntungan, akan tetapi pada masyarakat kebanyakan (petani) masih berpola subsistem di mana prinsip ekonomi boleh dikatakan tidak berlaku.

Selanjutnya banyak para ahli ekonomi yang sepemikiran dengan J.H. Boeke dan Gunnar Myrdal diantaranya yaitu Everett E. Hagen (1960), Amartya Sen (1998), Chapra (2001), Joseph E. Stiglitz (2002), Perkins (2004), Muhammad Yunus (2006), dan Sritua Arief (2006). Everett E. Hagen seorang pakar Ekonomi Pembangunan dalam sebuah artikel (1960) tentang perbandingan pembangunan di Asia, menyatakan Indonesia seharusnya merupakan negara industri termaju di Asia diikuti oleh India dan Cina, sedangkan Jepang menjadi negara yang paling tidak berkembang. Menurutnya, hal ini disebabkan Indonesia telah memiliki kontak dan keterbukaan terlama dengan institut-institut dan gagasan-gagasan Barat, sementara Jepang adalah yang tersingkat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana Jepang menjadi negara industri termaju di Asia, bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam perindustrian, sebaliknya Indonesia

tetap menduduki ranking bawah di Asia. Menurut Hagen dari kenyataan yang terjadi tersebut membawa hikmah, bahwa faktor-faktor nonekonomi (seperti keyakinan-keyakinan religius, sikap kerjadan kesenangan, serta kriteria status sosial) harus sepe-nuhnya dimasukkan ke dalam sistem teoritis sebagai variabel-variabel yang turut mempengaruhi variabel ter-gantungnya. Masalahnya, meskipun para ekonom menyadari pentingnya faktor non ekonomi, tetapi seperti layaknya Mark Twin menuduh setiap orang telah mengutak-atik 'cuaca' dan mereka telah mem-bicarakannya, akan tetapi tidak melakukan apa pun dengannya.

Selanjutnya Muhammad Yunus peraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 telah mengkritik teori ekonomi dengan corak sistem pasar bebas seperti berlaku di negara AS sangat tidak cocok untuk mengatasi kemiskinan di negara sedang berkembang, sepertinya Bangladesh. Beliau mengem-bangkan konsep untuk mengatasi kemiskinan yang disebut kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*), yang berhasil membawa perubahan multidimensional padamasyarakat miskin khususnya kaum perempuan. Beliau merintis kredit mikro dan mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983. Filsafat Grameen Bank adalah kepercayaan kepadakaum miskin. Melalui Grameen Bank dan modifikasi usahayang dilakukan ternyata telah berhasil mengatasi kemiskinan, bahaya kelaparan dan bencana lainnya yang sering terjadi di negara Bangladesh.

1. Ekonomi Kelembagaan

Keberadaan mazhab Ekonomi Kelembagaan(*Institutional Economics*) merupakan reaksi dari ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Menurut Hasibuan (2003) inti pokok aliran ekonomi Kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Mereka merangkum hal tersebut dalam analisis ekonomi, namun demikian di antara mereka masih mempunyai ragam dan variasi pandangan. Pada garis besarnya mereka menentang pasar bebas atau persaingan bebas dengan semboyan *laissez- faire*

dan motif laba maksimal.

Ahmad Erani Yustika (2006) membagi mazhab kelembagaan ke dalam ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama (*'old' institutional economics*) dan ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru (*'new' institutional economics*). Maka selanjutnya akan dibahas mengenai Mazhab Ekonomi Kelembagaan Lama dan Mazhab Ekonomi Kelembagaan Baru.

Ekonomi Kelembagaan Lama (*Old Institutional Economics* atau *OIE*)

Para pakar setuju bapak Ekonomi Kelembagaan adalah Thorstein Bunde Veblen (1857-1929). Kritik Veblen sangat tajam terhadap ilmu ekonomi ortodoks, di mana pengertian ekonomi ortodoks adalah pemikiran-pemikiran ekonomi yang menggunakan dan melanjutkan ekonomi Klasik, seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, manusia adalah rasional, motivasi memaksimalkan keuntungan (kepuasan) dan meminimasi pengorbanan ekonomi.

Selain Veblen, tokoh Ekonomi Kelembagaan Lama lainnya adalah Wesley Clair Mitchell (1874-1948), John R. Commons (1826- 1945), John A. Hobson (1858-1940). *Founder* mazhab ekonomi kelembagaan banyak melakukan kritik terhadap aliran ekonomi ortodoks, seperti lingkungan ekonomi yang terlalu sempit, statik, dan mereka berusaha memasukkan segi-segi kejiwaan, sejarah, hukum, sosial, dan politik dalam pembahasannya. Sebagai misal, teori harga dalam ekonomi ortodoks hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu. Menurut ekonomi ortodoks dalam pasar hanya terjadi pertukaran yang mempunyai tiga fungsi yaitu transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan dan transaksi distribusi. Keadaan yang terjadi dalam transaksi tersebut sebenarnya melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum dan juga kejiwaan. Begitu juga, dalam kegiatan ekonomi bukan hanya individu, tetapi juga kelompok dan anggota-anggota kelompok yang diatur oleh aturan permainan. Aturan-aturan itu merupakan ketentuan yang harus ditaati bersama, yang

bertujuan untuk kemajuan individu, membebaskan individu dari tekanan dan diskriminasi. Keberadaan persaingan bebas di kecam oleh para *founder*, tetapi yang diperlukan campur tangan pemerintah untuk melakukan regulasi.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran dari founder tersebut Harriss et al (1995) menyimpulkan bahwa teori ekonomi kelembagaan lama merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak memiliki teori dasar ekonomi ortodoks ekonomi klasik ataupun neoklasik. Mereka menentang pemikiran neoklasikal karena dianggap tidak memasukkan sisi-sisi *humanistic* dalam pendekatannya. Mereka mengatakan bahwa teori ekonomi Kelembagaan lama bukan lembaga secara fisik melainkan perilaku ekonomi yang didorong oleh pertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu.

Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics* atau NIE)

Jika ekonomi kelembagaan lama berargumentasi tanpa menggunakan teori kuantitatif, ekonomi kelembagaan baru muncul dengan pendekatan yang teoritis dan berfokus pada pentingnya kelembagaan. Ekonomi kelembagaan baru pun dapat bekerja pada ekonomi makro secara agregat yang disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) dan ekonomi mikro secara individu yang disebut dengan kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*). Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Lingkungan kebijakan meliputi aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan dan hak-hak di dalam kontrak.

Ekonomi kelembagaan baru sebagai kumpulan teori muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an, meskipun akarnya sudah ada jauh sebelum itu. Istilah "Ekonomi kelembagaan baru" diciptakan oleh Williamson Tahun 1975 tetapi asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke artikel klasik Ronald Coase Tahun 1937 dengan judul "*Nature of the firm.*" Dalam

analisis nya Coase menjelaskan tentang adanya konsep “Biaya transaksi” yang beberapa dekade kemudian menjadi dasar ekonomi kelembagaan baru, Coase berusaha menjawab pertanyaan "Mengapa perusahaan ada?" Sampai kemudian, dalam teori neoklasik, perusahaan hanya diperlakukan sebagai fungsi produksi yang mengubah input menjadi output, sehingga mewakili apa yang kemudian dikenal sebagai "Kotak hitam" teori neoklasik (Meramveliotakis, 2018).

Ekonomi kelembagaan baru secara definitif merupakan studi multidisiplin, di mana ilmu ekonomi berekspansi dengan wilayah ilmu sosial, khususnya hukum, politik dan sosiologi; sehingga memiliki beberapa cabang ilmu. Sampai sekarang ini meskipun masih terjadi diskusi tentang wilayah kajian Ekonomi kelembagaan baru, namun setidaknya cabang-cabang dari Ekonomi kelembagaan baru dapat dibagi dalam dua kategori.

Pertama, sejarah ekonomi baru (*new economic history*) dikembangkan oleh North, Fogel dan Rutherford dan aliran pilihan publik (*public choice school*), yang dikembangkan oleh Buchanan, Tullock, Olson dan Bates. Kedua, teori ekonomi biaya transaksi (*transaction cost economics*) dikembangkan oleh Ronald Coase, Douglass North dan Oliver Williamson dan informasi ekonomi (*economics information*) yang diperkenalkan oleh Akerlof, Stigler dan Stiglitz (Santoso, 2010). Di luar itu masih terdapat beberapa cabang lainnya yang cukup menarik, seperti teori ekonomi sosial baru (*new social economics*) yang dikembangkan oleh Garry S. Becker, teori tindakan kolektif (*collective action theory*) yang ditekuni oleh Mancur Olson, serta teori hukum dan ilmu ekonomi (*law and economics*) yang dimininati oleh Posner.

Selanjutnya Oliver Williamson, (2000) telah memperkenalkan evolusi teori ekonomi kelembagaan baru melalui empat level analisis sosial. Level I, yaitu teori sosial (*social theory*) yang merupakan aturan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, agama, norma, adat, dan konvensi keterkandungan atau *mindset (embeddedness)*. Level II terkait dengan lingkungan kelembagaan (*institutional*

environment). Level II menekankan ekonomi kepemilikan (*economics of property rights*) yang terdiri dari aturan main (hukum), politik dan birokrasi yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, hukum, maupun fungsi birokrasi pemerintahan. Level III menekankan struktur tata kelola yang menekankan kontrak dan biaya transaksi (*transaction cost economics*). Meskipun hak milik tetap penting, fungsi sistem hukum mendefinisikan hukum kontrak dan perlindungan kontrak tidak bisa diabaikan. Level IV menekankan efisiensi sumber daya dan struktur insentif yang merupakan kerangka kerja neoklasik. Analisis marginal dikembangkan di mana digambarkan sebagai fungsi produksi. Penyesuaian harga dan output bersifat lebih atau kurang kontinu.

2. Kelembagaan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dengan berakhirnya program *Melenium Development Goals* (MDGs) pada Tahun 2015, maka arah kebijakan pembangunan dunia beralih kepada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). *Sustainable Development Council* (CSD)/Dewan Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda 21 telah menetapkan dimensi pembangunan berkelanjutan menjadi empat bidang yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan (Bossel, 1999).

Salah satu faktor penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah kelembagaan (Sari et al., 2020). Kelembagaan yang dimaksud adalah aturan main (*rule of game*) atau organisasi yang berfungsi mengatur dan meminimalkan kendala dalam melakukan interaksi dan kontrak dalam kegiatan ekonom (Amar & Gani, 2012). Kekuatan dan kualitas lembaga akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan poin ke 16 dalam SDGs yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi suatu hal yang penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, modal

sosial berupa kepercayaan, jejaring sosial, dan norma dapat menjadi aset yang menimbulkan adanya keteraturan, menumbuhkan kepercayaan, dan kemampuan kerja sama yang kuat dalam suatu lembaga.

Selanjutnya Anelli (2014), untuk upaya pencapaian penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan berkelanjutan maka harus difokuskan pada tiga tingkatan yaitu individual, organisasi, dan sistem. Dalam konteks tingkatan individu, yang dimaksud adalah pada pengembangan sumber daya manusia dalam kelembagaan, dengan perhatian diberikan pada profesionalitas dan kemampuan personil secara teknis seperti potensi yang dimiliki, keterampilan, attitude, kemampuan dalam pengelompokan pekerjaan, serta motivasi yang dimiliki individu. Dalam kaitannya dengan tingkatan organisasi, difokuskan pada manajemen untuk perbaikan kinerja dari fungsi dan tugas yang dilihat dari kelengkapan struktur, kesesuaian prosedur dan mekanisme pekerjaan, kejelasan proses pengambilan keputusan, pengaturan sarana prasarana, serta terjalannya hubungan dan jaringan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam konteks sistem, lebih ditekankan pada pengaturan struktur secara makro dengan melihat kerangka pekerjaan, kesesuaian peraturan dengan kebijakan, dan alasan pendukung objektivitas kebijakan dalam kelembagaan tersebut. Tiga tingkatan di atas merupakan parameter untuk mengukur nilai penguatan kapasitas kelembagaan, yang berarti semakin tinggi nilai tingkatan individual, tingkatan organisasi, menuju ke arah tingkatan sistem maka semakin kuat kelembagaan tersebut.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Shuaibu (2016), menegaskan ada hubungan jangka panjang yang signifikan antara kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia dan juga kelembagaan (pemerintahan yang bagus), ia berpendapat bahwa keuntungan jangka pendek dapat dicapai melalui peningkatan kualitas kelembagaan. Singh et al (2016), menetapkan stabilitas kelembagaan sebagai salah satu dimensi keberlanjutan sosial di samping: kesetaraan, pem-

berdayaan, aksesibilitas, partisipasi, berbagi dan identitas budaya. Dari aspek lingkungan kelestarian lingkungan meliputi pencegahan dampak yang ditimbulkan oleh organisasi pada sistem alam terdiri dari makhluk hidup dan tidak hidup (Emetuei, E., Ahaiwe, 2018).

Dari pendapat (Emetuei, E., Ahaiwe, 2018; Shuaibu, 2016; Singh et al., 2016) dapat disimpulkan bahwa kelembagaan (pemerintahan yang bagus) merupakan kunci keberhasilan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sama halnya dengan apa yang disimpulkan oleh Ajor, L., & Alikor (2020) untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, setiap organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi secara proaktif pada pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ajor, L., & Alikor, L. O. 2020. Innovative Mindset and Organizational Sustainability of Small and Medium Enterprises in Rivers State, Nigeria. *British Journal of Management and Marketing Studies*, 3(1), 20–36.
- Amar, S., & Gani, E. 2012. *Ekonomi dalam perspektif kelembagaan*. Penerbit UNP Press.
- Anelli, M. 2014. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas: Diterjemahkan secara bebas*.
- Bossel, H. 1999. *Indicators for sustainable development: theory, method, applications*. International Institute for Sustainable Development Winnipeg.
- Emetuei, E., Ahaiwe, C. I. 2018. Quality assessment and corporate sustainability of deposit money banks in port harcourtNo Title. *Nigeria Business and Social Review*, 9(2), 141–154.
- Harriss, J., Hunter, J., & Lewis, C. M. 1995. Introduction: development and significance of NIE. In *The new institutional economics and Third World development* (hal. 15–28). Routledge.
- Meramveliotakis, G. 2018. *New Institutional Economics : A Critique of Fundamentals & Broad Strokes Towards an Alternative Theoretical Framework for the Analysis of Institutions*. 3(2), 50–64. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v3i2.395>
- Santoso, P. B. 2010. *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*.
- Sari, R. R., Siahainenia, R. R., & Hadiwijoyo, S. S. 2020. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Kelurahan Berkelanjutan Berbasis Agrowisata di Kumpulrejo, Kota Salatiga. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 187–201. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.187-201>
- Shuaibu, M. 2016. Determinants of human capital development in

Africa: a panel data analysis. *Oeconomia Copernicana*, 7(4), 523–549.

Singh, M. P., Chakraborty, A., & Roy, M. 2016. Entrepreneurial commitment, organizational sustainability and business performance of manufacturing msme: Evidence from India. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(6), 4615–4631.

Williamson, O. E. 2000. The new institutional economics: taking stock, looking ahead. *Journal of economic literature*, 38(3), 595–613.

Tentang Penulis



Dr.(C) Suhatman, S.Pd., M.Si.

Lahir di Pasar Ulakan 19 April 1980, tamat SDN 32 Manggopoh tahun 1992, tamat SMPN 3 Nan Sabaris tahun 1995, tamat SMUN 1 Nan Sabaris Tahun 1998, S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang tahun 2004, S2 Perencanaan Pembangunan Pemusatan Perencanaan Pendidikan Universitas Andalas tahun 2009 dan Agustus 2018 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan FE Universitas Negeri Padang. Mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Januari 2005 sampai sekarang. Jabatan yang pernah diduduki adalah: Kasubag Adm. Pertanahan Setda Kab. Padang Pariaman 2010-2011, Kasi Program Dinas Pendidikan 2011-2012, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan 2012-2013, Kasi Kurikulum SMK Dinas Pendidikan 2013-2014, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan 2014-2015, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 2015-2017, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017-2020 dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-sekarang. Dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumbar 2014-sekarang.

Pendidikan Non Gelar: Program pendidikan dan pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) di Universitas Syah Kuala Aceh.

Sertifikat Keahlian: Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud. Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Pratama oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.

Email Penulis: suhatman1904@gmail.com

No Hp/Wa: 08126791997

BAB 9

ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN

*Marissa Silooy, S.E., M.M., CRA.
Universitas Kristen Indonesia Maluku*

A. Pembangunan Sektor Keuangan

Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, tingkat pengangguran yang rendah, fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang rendah (meredam siklus bisnis), dan tingkat inflasi yang rendah. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai kebijakan. World Bank (2001) menekankan pentingnya sektor keuangan untuk mencapai tujuan tersebut karena sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan pentingnya kebijakan yang mendorong perkembangan sektor keuangan di berbagai negara di dunia.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu negara sebagai capaian arah dan tujuan dari pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga keberlanjutan penduduk negara untuk mencapai kesejahteraan terwujud. Kemajuan ekonomi merupakan komponen utama dalam pembangunan, akan tetapi bukan satu-satunya komponen. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari sektor keuangan yang bertindak sebagai *intermediary function*. Pembangunan sektor keuangan yang baik dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kemampuan pengembangan sektor keuangan merupakan saluran pertumbuhan akumulasi modal dan inovasi teknologi, (McKinnon, 1991); dan (Afangideh, 2006).

Tidak berbeda dengan perkembangan perekonomian di berbagai negara, Indonesia juga mengalami perkembangan ekonomi yang fluktuatif, yang mencapai puncaknya ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Sektor keuangan disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis tersebut (lihat misalnya World Bank, 1998; Nugroho, 2000; dan Hill, 2000). Untuk kasus Indonesia, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kesulitan pendanaan pada awal tahun 1980-an yang disebabkan oleh turunnya harga minyak mendorong pemerintah untuk memobilisasi dana dari masyarakat melalui kebijakan deregulasi pada sektor keuangan. Melalui deregulasi tersebut diharapkan sektor keuangan mampu menyerap dana dari masyarakat dan akhirnya dapat mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. Usaha tersebut kemudian mendatangkan hasil karena Indonesia dapat kembali menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, sektor keuangan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari pembangunan sektor keuangan. Hasil penelitian (Levine, 1997) mengenai hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan mengemukakan bahwa pasar keuangan dan lembaga keuangan muncul untuk memperbaiki masalah ketidaksempurnaan dari informasi pasar dan transaksi friksi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kombinasi informasi dan biaya transaksi. Hal ini karena akan memunculkan kontrak yang berbeda antara pasar uang dan lembaga sistem keuangan yang fungsi utamanya adalah memfasilitasi alokasi sumber daya dalam ruang dan waktu di dalam lingkungan ketidakpastian (Merton & Bodie, 1995) dalam (Levine, 1997). Berdasarkan temuannya, (Levine, 1997) dalam (Hariyanti, 2015) membagi lima fungsi dasar sistem keuangan guna mengatur sistem keuangan dan kegiatan ekonomi secara luas, yakni: (1) dengan memfasilitasi perdagangan; hedging; diversifikasi, dan penyatuan risiko; (2) mengalokasikan sumber daya, (3) memonitor manajer dalam melakukan kontrol perusahaan, (4) memobilisasi tabungan dan (5) memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

(Afangideh, 2006) menyimpulkan bahwa pembangunan sektor keuangan berpengaruh terhadap output sektor pertanian di Nigeria melalui saluran pinjaman kredit dan investasi. Sistem finansial yang berkembang dapat mengurangi kendala pembiayaan dengan meningkatkan tabungan nasional, kredit yang disalurkan bank dan investasi di sektor pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan output di sektor pertanian.

(Hariyanti, 2015), berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan, pembangunan sektor keuangan masih menjadi kunci penentuan pembangunan keberlanjutan untuk sektor industri manufaktur di Indonesia. Rasio kredit/PDB memiliki pengaruh variabel signifikan yang lebih banyak dari pada rasio M2/PDB sebagai penentu kedalaman pembangunan sektor keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Kredit/PDB merupakan instrumen penentu kedalaman pembangunan sektor riil di Indonesia pada periode 1998-2013. Sementara rasio M2/PDB merupakan instrumen penentu kedalaman pembangunan sektor keuangan dari sisi kebijakan pemerintah dari sektor moneter.

(Anwar & Nguyen, 2011), dalam penelitiannya mengenai pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Vietnam menyimpulkan bahwa terdapat interaksi antara tingkat pertumbuhan sektor keuangan (rasio kredit terhadap GDP) yang berhubungan secara positif dan signifikan. Saham dari penanaman modal asing (investasi) di Vietnam berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasar uang menjadi dominasi yang diinginkan oleh sektor perbankan dan sektor jasa keuangan di Vietnam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Afangideh, 2006), (Hariyanti, 2015), (Anwar & Nguyen, 2011), (Arnold et al., 2006), (Fernandes et al., 2008), secara tidak langsung pembangunan sektor keuangan akan mempengaruhi sektor jasa melalui mekanisme transmisi sektor keuangan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard VH Tampubolon mengatakan “Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, sektor jasa keuangan

merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Namun, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan kita masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian kita. Inklusivitas Indonesia juga masih terbilang cukup rendah, di mana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

Pada akhirnya, pendalaman keuangan masih sangat diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan bank dan non-bank, maupun pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan memperluas instrumen dan intensitas penerbitan aset keuangan, meningkatkan kualitas platform digital untuk perdagangan, dan meningkatkan emiten serta basis investor. Dari sisi inklusivitas, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi digital dan *branchless banking* untuk memperluas keterjangkauan dan meningkatkan literasi keuangan.

Dampak positif pendalaman keuangan bagi pertumbuhan ekonomi akan muncul jika pembangunan sektor keuangan dilakukan dengan arah dan kecepatan yang tepat, sehingga pembangunan keuangan tidak berakhir dengan peningkatan kesenjangan dan fluktuasi tidak terkendali.

Sektor Keuangan Indonesia

Di Indonesia, sektor keuangan secara umum digerakkan oleh dua lembaga yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan penggadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan. Akibatnya, segala sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan. Sementara sektor keuangan lainnya relatif kurang berkembang.

Sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sektor Keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian suatu negara karena memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan perannya yang dominan, di tengah maraknya inovasi produk keuangan, kinerja sektor keuangan akan turut menentukan naik turunnya kegiatan ekonomi suatu negara.

Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan risiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, terjadinya *asymmetric information*, yang dimanifestasikan dalam bentuk tingginya biaya-biaya transaksi dan biaya-biaya informasi dalam pasar keuangan dapat diminimalisasi, jika sektor keuangan berfungsi secara efisien (Fritzer, 2004).

Peran sektor keuangan juga ditunjukkan oleh peran kredit perbankan dalam perekonomian. Perkembangan penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan di Indonesia berfluktuasi dari tahun 2005-2014. Pada periode 2005 sampai dengan 2010, penyaluran kredit perbankan mengalami fluktuasi naik sementara setelah periode tersebut hingga tahun 2014 mengalami tren yang menurun. Hasil analisa kuantitatif menemukan bahwa pertumbuhan kredit yang diberikan oleh sektor perbankan terbukti memberikan dampak yang positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Rasbin, dkk, 2015).

Studi empiris juga membuktikan adanya hubungan antara perkembangan sektor keuangan dengan volatilitas ekonomi makro. Easterly, Islam, dan Stiglitz (2000) menemukan bahwa perkembangan sektor keuangan dapat berperan dalam meredam maupun meningkatkan volatilitas ekonomi. Dalam studi empiris yang dilakukan, perkembangan sektor keuangan yang diproksi dengan rasio kredit yang disalurkan kepada sektor swasta terhadap GDP dapat menurunkan volatilitas ekonomi, namun semakin besar kredit yang disalurkan justru akan berpengaruh terhadap peningkatan volatilitas ekonomi. Darrat dan Haj (2001) dengan menggunakan rasio monetisasi dan rasio demand deposit terhadap jumlah uang beredar M1 juga menemukan adanya hubungan yang negatif antara perkembangan sektor keuangan dengan volatilitas pertumbuhan ekonomi, volatilitas pertumbuhan konsumsi, dan volatilitas pertumbuhan investasi di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Perkembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian suatu negara. Bukan hanya sebagai penyedia dana bagi kegiatan produksi ataupun konsumsi, SJK juga menjadi media bagi penyimpanan kekayaan masyarakat. Dengan perannya yang dominan, di tengah maraknya inovasi produk keuangan, kinerja SJK akan turut menentukan naik turunnya kegiatan ekonomi suatu negara.

Sejarah Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia dapat ditarik mundur sejak zaman kolonialisme. Dalam periode yang panjang itu, selain menapakkan perannya dalam pembangunan ekonomi, SJK juga mengalami masa pasang-surut yang kerap menimbulkan instabilitas. Jika dicermati, gejala di SJK cenderung semakin cepat dengan magnitude yang semakin besar. Sebagian besar gejala ini dapat dijelaskan oleh perilaku berpuas diri, terutama dalam mencari keuntungan sehingga melupakan kemampuan intrinsiknya. Masa booming ekonomi cenderung diikuti oleh sikap

procyclicality dari SJK. Bahkan, SJK seringkali bergerak jauh di atas fundamental perekonomian. Puncaknya adalah krisis keuangan di akhir periode 1990-an yang telah membawa perekonomian Indonesia ke titik nadir.

Sebagai respon atas krisis 1997/98, SJK Indonesia telah mengalami proses restrukturisasi secara menyeluruh. Fokus utama adalah pada penguatan struktur dan fundamental SJK yang dilengkapi dengan penguatan fungsi pengawasan dan penerapan *governance* di industri. Proses ini berjalan dengan tetap memperhatikan peran intermediasi SJK, sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan lebih sehat. Dalam periode 2001-2008, secara rata-rata Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% per tahun.

Peran SJK dalam perekonomian di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Namun dalam konteks perekonomian modern, peran SJK secara signifikan melonjak setelah deregulasi sektor keuangan pada 1983. Deregulasi ini bertujuan untuk menciptakan SJK yang lebih kompetitif dalam mendukung kegiatan pertumbuhan yang sedang mengalami fase turun pasca-bonanza minyak pertama. Selanjutnya Indonesia telah beberapa kali menderegulasi SJK tentunya dengan niat untuk semakin meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan.

Namun, pengalaman dari beberapa krisis yang terjadi dalam dua hingga tiga dekade terakhir menunjukkan sisi lain dari pesatnya perkembangan SJK, yakni kerentanannya terhadap gejolak perekonomian baik yang bersumber dari eksternal ataupun domestik. Gejolak ini seringkali terjadi pada saat sektor keuangan tumbuh sangat pesat, melebihi pertumbuhan sektor riil. Dampak instabilitas yang ditimbulkan sangat signifikan dan bahkan mampu menimbulkan resesi sebagaimana yang dialami oleh perekonomian global hampir satu dekade terakhir.

SJK Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok besar, yakni sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Hingga saat ini, sektor perbankan masih mendominasi SJK nasional dengan pangsa aset sekitar 74% dari total aset SJK. Sementara itu, pangsa aset industri

reksa dana, perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan masih relatif kecil.

Kinerja perbankan konvensional relatif terkendali dengan ditopang oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang terjaga. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan mencapai 23,4 persen pada triwulan IV tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,0 persen. Selain itu, likuiditas perbankan mengalami perbaikan, tercermin dari membaiknya rasio Loan to Deposit Ratio perbankan, yaitu dari 94,8 persen pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 94,4 persen pada triwulan IV tahun 2019, atau semakin mendekati batas maksimal yang ditetapkan yaitu 94,0 persen. Selanjutnya dari segi kualitas kredit, risiko kredit pada triwulan IV tahun 2019 masih terkelola dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah yaitu 2,5 persen, atau berada di bawah batas maksimal yang ditentukan (5 persen). Kualitas kredit tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi yang berdampak pada terhambatnya kemampuan membayar dari para pelaku usaha (<https://www.bappenas.go.id>).

Jelang tutup tahun, kinerja pasar modal pada triwulan IV tahun 2019 bergerak cukup positif di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi global. Kinerja pasar modal yang kondusif ditandai dengan naiknya aliran modal asing yang masuk ke pasar modal domestik. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh risiko ketidakpastian global yang mereda pada triwulan IV tahun 2019 dan mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi pasar saham kembali menguat pada triwulan IV tahun 2019, setelah sebelumnya sedikit melemah pada triwulan III tahun 2019. Penguatan tersebut salah satunya ditunjukkan oleh perkembangan nilai kapitalisasi pasar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh positif. IHSG ditutup pada level 6.299,5 pada triwulan IV tahun 2019, tumbuh sebesar 1,7 persen (YoY) (<https://www.ojk.go.id>).

Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. OJK sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong serta memulihkan perekonomian nasional yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 –2025.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat 15 Januari 2021. Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh pelaku industri jasa keuangan, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Kepala Daerah, serta pelaku usaha mikro dan pimpinan media massa tersebut. Wimboh menjelaskan, bahwa pandemi Covid 19 merupakan badai besar yang membawa guncangan hebat bagi perekonomian dan pasar keuangan global. Perekonomian nasional pun terkontraksi cukup dalam, sehingga menekan kinerja sektor riil dan mengurangi pendapatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, OJK pada Tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan *forward looking* dan *countercyclical policies* yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat membantu dengan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif (<https://keuangan.kontan.co.id>).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pelambatan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19. Misalnya, terkait restrukturisasi pembiayaan. Kontrak yang disetujui oleh perusahaan pembiayaan untuk dilakukan restrukturisasi sebanyak 4,96 juta kontrak. Total outstanding pokok senilai Rp 149,61 triliun dan bunga sebesar Rp 40,14 triliun. Melihat masih adanya dampak pandemi terhadap perekonomian global dan domestik, OJK

memperpanjang restrukturisasi hingga 17 April 2022. Hal ini tertuang dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (<https://keuangan.kontan.co.id>).

Perkembangan SJK yang cukup menggembirakan jangan menimbulkan sikap berpuas diri, terutama mengingat tuntutan atas peningkatan peran SJK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi di tengah arus pengetatan regulasi keuangan global. Untuk menemukan keseimbangan yang optimal antara mendukung pertumbuhan dan penguatan regulasi tersebut, perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan SJK Indonesia di masa depan.

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025

Sejak diumumkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan rangkaian kebijakan untuk mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19. Sejumlah stimulus telah diterbitkan, meliputi stimulus fiskal, moneter, dan SJK. Bauran kebijakan yang efektif sangat penting untuk mencegah meningkatnya korban jiwa serta meluasnya dampak negatif yang lebih dalam, khususnya pada perekonomian. Untuk itu SJK nasional harus meningkatkan efisiensi, ragam produk dan layanan, dan layanan prima termasuk dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Kapasitas dan kapabilitas yang memadai pun menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kontribusi dan daya saing SJK.

Sebagai landasan untuk penanganan krisis kemanusiaan dan perekonomian, Pemerintah menetapkan payung hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020). Dalam rangka tindak lanjut Pasal 11 UU 2/2020, Pemerintah melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai langkah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Dukungan SJK terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kerangka Struktural 2021-2025 berfokus pada tiga area yaitu (1) penguatan ketahanan dan daya saing; (2) pengembangan ekosistem jasa keuangan; dan (3) akselerasi transformasi digital. Selain itu, MPSJKI 2021-2025 mengarus utamakan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (*enabler*) untuk pencapaiannya (<http://www.ojk.go.id>).

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 diarahkan untuk memulihkan perekonomian nasional serta meningkatkan ketahanan dan daya saing SJK melalui inovasi dan digitalisasi, serta mempersiapkan SJK nasional dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Struktur MPSJKI terdiri dari: (<https://www.ojk.go.id>).

Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021): Dukungan SJK terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak pembuat kebijakan respon dampak Covid-19 adalah dari segi kecepatan dan ketepatan penerima manfaat. Hal ini dirasakan pula dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan stimulus di SJK. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama setiap pihak baik dari sisi pembuat kebijakan maupun intermediary kebijakan menjadi sangat penting.

Dalam upaya mempercepat implementasi stimulus Pemerintah, OJK mendukung program Pemerintah dalam PEN dan mengoptimalkan peran SJK baik dalam menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan/atau memiliki multiplier effect yang tinggi

terhadap perekonomian. OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus di masa pandemi Covid-19 sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong PEN. b. Kerangka Struktural 2021-2025: Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing SJK

1. Penguatan Ketahanan dan Daya Saing

Ketahanan dan daya saing SJK masih perlu ditingkatkan di tengah berbagai tantangan sebagaimana diuraikan di atas. Ketahanan yang kuat dibutuhkan agar LJK mampu menghadapi berbagai hantaman yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi akibat dari proses integrasi ekonomi kawasan serta semakin meningkatnya pemain baru di SJK terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat.

2. Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan

SJK memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional baik sebagai sumber pembiayaan pembangunan hingga penjaga stabilitas keuangan. Sejalan dengan upaya transformasi ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkesinambungan, SJK diharapkan dapat semakin mengoptimalkan perannya. Dalam hal ini, SJK harus dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan perekonomian antara lain dengan mengembangkan pasar keuangan, menyediakan sumber alternatif pembiayaan dan investasi, dan memperluas jangkauan pasar. Pengembangan ekosistem keuangan ini harus sejalan dengan rencana pembangunan yang ditetapkan sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan transformasi ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem ini tentunya meliputi seluruh sektor mulai dari Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

3. Akselerasi Transformasi Digital

Transformasi teknologi yang akan terjadi oleh SJK akan berdampak pada perubahan dunia kerja. Di satu sisi, akan terdapat pekerjaan manual dan kognitif yang digantikan oleh mesin dan algoritma, atau bahkan terotomasi sepenuhnya. Di sisi lain, pengadopsian teknologi tersebut menciptakan ber-

bagai pekerjaan baru dan meredefinisikan kembali berbagai tugas. Kedua fenomena ini pada akhirnya berujung pada terjadinya transformasi pasar tenaga kerja yang cukup besar ke depannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia terus mengalami perkembangan positif walaupun di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik selama lima tahun terakhir dan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Namun demikian, pencapaian yang menggembirakan tersebut jangan menimbulkan sikap puas diri. Ke depan, SJK masih menghadapi berbagai tantangan yang datang dari ketidakpastian perekonomian dan perkembangan ekonomi digital yang mendisrupsi model bisnis. Selain itu, SJK sebagai urat nadi perekonomian semakin dituntut untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mampu meningkatkan daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan arah kebijakan strategis pengembangan SJK sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Afangideh, U. 2006. Financial Development and Agricultural Investment in Nigeria: Historical Simulation Approach. *Journal of Economic and Monetary Integration*, 9(1), 74-97.
- Anwar, S. &. 2011. Financial Development and Economic Growth in Vietnam. *Journal of Economics and Finance*, 35(3).
- Arnold, J. M. 2006. Services Input and Firm Productivity in Sub-Saharan Africa Evidence from Firm-Level Dat. *Journal of African Economies*, 14(4), 578-599.
- Bank, W. 2001. *"Finance for Growth: Policy Choice in a Volatile World"*. New York: Oxford University Press, Inc.
- BAPPENAS. (2021, July 23).
<https://www.bappenas.go.id/files/2715/8529/3891>.
Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>:
<https://www.bappenas.go.id>
- Darrat. A. F., &. H. 2001. *"Further Evidence on the Link Between Finance and Cyclical Fluctuations"*. Louisiana: Louisiana Tech University.
- Easterly, W. I. 2001. "Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility. *Annual Bank Conference on Development Economics, World Bank*. Washington, D.C.
- Fernandes, J. M. 2008. Genomic, evolutionary, and expression analyses of cee, an ancient gene involved in normal growth and development. *Genomics*, 91(4), 315-325.
- Fernandes, J. M. 2021.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754307002819?via%3Dihub>. Retrieved from
<https://www.sciencedirect.com>:
<https://www.sciencedirect.com>
- Friedrich, F. 2004. "Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective, Monetary Policy and The Economy 2nd Quarter", pp. 72-87. 72-87.

- Fritzer, F. 2004. Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective. *Monetary Policy and The Economic 2nd Quarter*. 72-87.
- Hariyanti, D. 2015. Financial Sector Development Analysis to Support Sustainable Development in Indonesia Period 1998.1-2013.4. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 8(8), 11-28.
- Hill, H. 2000. *The Indonesian Economic, 2 nd Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KONTAN. 2021.
[https://keuangan.co.id/news/industri-multifinance-setujui-restrukturisasi pembiayaan-covid-19-rp-1496-t-di-2020](https://keuangan.co.id/news/industri-multifinance-setujui-restrukturisasi-pembiayaan-covid-19-rp-1496-t-di-2020). Retrieved from
<https://keuangan.kontan.co.id>:
<https://keuangan.kontan.co.id>
- KONTAN. 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/walau-dihadang-pandemi-ojk-sebut-kinerja-sektor-keuangan-di-2020-terjaga>. Retrieved from
<https://keuangan.kontan.co.id>:
<https://keuangan.kontan.co.id>
- Levine, R. 1997. Economic Development and Financial and Agenda Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, 32(2), 688-726.
- McKinnon,, R. 1991. Financial Control in The Transition from Classical Socialism to a Market Economy. *Journal of Economic Perspectives*, 5(4), 107-122.
- Merton, R. C. 1995. A conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment. In *The Global Financial System: A Functional Perspective*. 3-31.
- Nugroho, A. 2000. "The Linkages between Banking Sector and the Indonesian Currency Crisis". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 23-44.

- OJK. 2021.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Master-Plan-Sektor-Jasa-Keuangan-Indonesia-20212025/Master%20Plan%20Sektor%20Jasa%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>. Retrieved from <https://ojk.go.id>: <https://ojk.go.id>
- OJK. 2021.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Master-Plan-Sektor-Jasa-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>: <https://www.ojk.go.id>
- OJK. 2021. <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/OJK%20-%20Laporan%20Triwulan%20I-2020.pdf>. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>: <https://www.ojk.go.id>
- Rasbin, d. 2015. *Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta Pusat: P3D1 Setjen DPR RI & Azza Grafika.
- World Bank. 1998. *Indonesia in Crises: A Macroeconomic Update*. Washington, D. C.

Tentang Penulis



Marissa Silooy. Menekuni bidang ilmu ekonomi dan bisnis sejak duduk di bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ambon pada tahun 2002. Ketertarikan ini terus bertambah ketika melanjutkan studi pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Pattimura Ambon dan berhasil lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Pascasarjana Magister Manajemen pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan lulus pada tahun 2012. Menjalani tugas sebagai dosen tetap pada Lembaga Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi. Penulis melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok dan juga aktif dalam kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ilmu yang digeluti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan. Saat ini penulis diberikan kepercayaan tugas tambahan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Keuangan dan Perbankan di Fakultas Ekonomi UKIM. Untuk meningkatkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kepakarannya tersebut. Selain itu, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat lebih bermanfaat untuk banyak orang.
Email: mshellokittycha@gmail.com

BAB 10

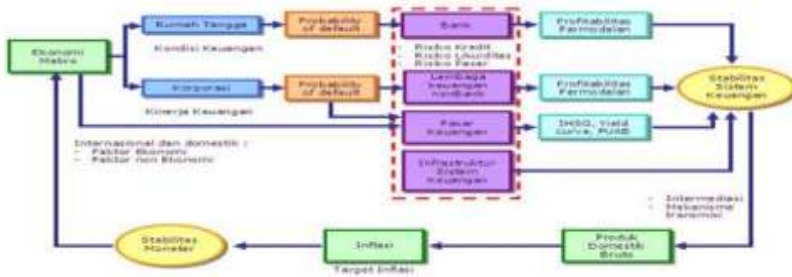
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

*Dr. Dra. Alfiana, M.M.
Universitas Muhammadiyah Bandung*

Pemerintah pada tahun 2016 menerbitkan Undang-Undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, di mana pada pasal 1 butir satu menyatakan bahwa sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sebagai berikut: (1) fungsi tabungan; (2) fungsi penyimpan kekayaan; (3) fungsi likuiditas; (4) fungsi kredit; (5) fungsi pembayaran; (6) fungsi risiko; (7) fungsi kebijakan. Sistem keuangan dapat didefinisikan pada tingkat global, regional maupun perusahaan. Jika kondisi sistem keuangan berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri dinamakan stabilitas sistem keuangan.

Sistem keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian, oleh karena itu sistem keuangan memegang peranan penting bagi perekonomian yaitu mengalokasikan dana dari pihak yang mendapatkan surplus kepada pihak yang kekurangan/defisit. Sistem keuangan diharapkan stabil dan berfungsi dengan efektif dan efisien, sehingga penghimpunan dana dan pengalokasian dana tidak terganggu yang berdampak pada perputaran roda perekonomian. Ketidakstabilan sistem keuangan mengakibatkan kondisi sebagai berikut: (1) transmisi kebijakan

moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif; (2) fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi; (3) ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; (4) sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Sejarah perekonomian Indonesia tahun 1998 membuktikan bahwa biaya krisis keuangan memperberat bangkitnya perekonomian terutama kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Hubungan stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan stabilitas moneter dengan stabilitas sistem keuangan

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan>

Pentingnya stabilitas sistem keuangan dikarenakan stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Pada dasarnya, fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan dan menilai risiko-risiko serta merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas keuangan. Untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh perlu dilakukan monitoring terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan krisis

termasuk melakukan proyeksi secara reguler apakah terdapat potensi risiko yang membahayakan.

Perkembangan teknologi dan meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Tingginya inovasi, makin beragamnya dan makin kompleksnya produk keuangan mengakibatkan sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan juga semakin meningkat, semakin beragam dan dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala.

Tabel 1: Kemungkinan sumber ketidakstabilan sistem keuangan

<i>Endogenous</i>		
<i>Institutions based</i>	<i>Market-based</i>	<i>Infrastructure-based</i>
<i>Operating risk</i>	<i>Countyparty risk</i>	<i>Clearance, payment and settlement system risk</i>
<i>Financial risk</i> 1. <i>Credit - Market</i> 2. <i>Liquidity - Currency</i> 3. <i>Interest rate</i>	<i>Asset price misalignment</i>	<i>Infrastructure fragilities</i> <i>-legal - Regulatory</i> <i>-Accounting - Supervisory</i>
<i>Informational technological weaknesses</i>	<i>Runs on markets</i> 1. <i>Credit - Liquidity</i>	<i>Collapse of confidence leading to runs</i>
<i>Legal/ Integrity risk</i>	<i>Contagion</i>	<i>Domino effect</i>
<i>Reputation Risk</i>		
<i>Business strategy risk</i>		
<i>Concentration risk</i>		
<i>Capital adequacy risk</i>		
<i>Exogenous</i>		
<i>Macroeconomics disturbance</i>	<i>Event risk</i>	
<i>Economic environment risk</i>	<i>Natural distater</i>	
<i>Policy imbalances</i>	<i>Political events</i>	
	<i>Large business failures</i>	

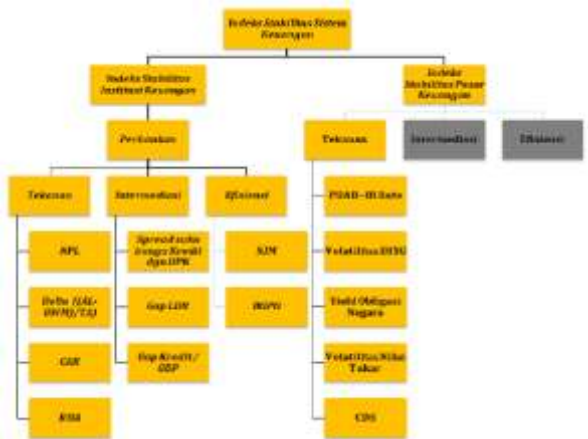
Sumber: Hauben, Kakes dan Schinasi (2004), Schinasi (2005), Schinasi (2007)

Tabel 1 menunjukkan sumber ketidakstabilan sistem keuangan. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan

pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal dan internal. Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul, dan seberapa jauh potensi risiko tersebut membahayakan, meluas dan bersifat sistemik, sehingga akan melumpuhkan perekonomian. Pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan terjadinya ketidakstabilan keuangan yang mematikan perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan. Ada dua indikator utama yang menjadi target pemantauan, yakni indikator microprudential dan indikator makroekonomi. Kedua indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator microprudential dilakukan terhadap kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Pemantauan indikator makroekonomi juga perlu dilakukan terhadap kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.

Indeks stabilitas sistem keuangan (ISSK) dibentuk untuk mendapatkan tingkat di mana stabilitas sistem keuangan Indonesia saat ini. Indeks stabilitas sistem keuangan menggambarkan kondisi ketahanan, tekanan dan intermediasi dari institusi keuangan serta pasar keuangan. ISSK dibentuk dari Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK) dan Indeks Tekanan Pasar

keuangan (ITPK). ISIK dibentuk dari Indeks Tekanan Institusi Perbankan (ITP), Indeks Efisiensi Perbankan (efisiensi) dan Indeks Intermediasi perbankan (intermediasi) seperti yang terlihat pada gambar 2.



$$ISSK = 0,45(Inststitusi)_t + 0,55(Pasar)_t$$

$$Inststitusi_t = 0,6(ITP)_t - 0,2(Efisiensi)_t + 0,2(Intermediasi)_t$$

$$ITP_t = 0,35(NPL)_t - 0,2(CAR)_t - 0,1(ROA)_t - 0,3(\Delta (AL - GWM)/TA)_t$$

$$Efisiensi_t = -(0,30(NIM)_t - 0,23(BOPO)_t - 0,23(CIR)_t - 0,23(\frac{OHC}{PO})_t)$$

$$Intermediasi_t = -0,2(Spread sb Kredit dg DPK)_t + 0,4(Gap LDR)_t + 0,4(Gap Kredit/GDP)_t$$

$$NC_t = 0,35(Likuiditas)_t + 0,2(IHSG)_t + 0,15(Bond)_t + 0,25(Valas)_t + 0,1(CDS)_t$$

$$CS_t = 0,25(Likuiditas)_t + 0,25(IHSG)_t + 0,15(Bond)_t + 0,25(Valas)_t + 0,1(CDS)_t$$

$$ISPK_t = 0,75(NC)_t + 0,25(SC)_t$$

Gambar 2. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

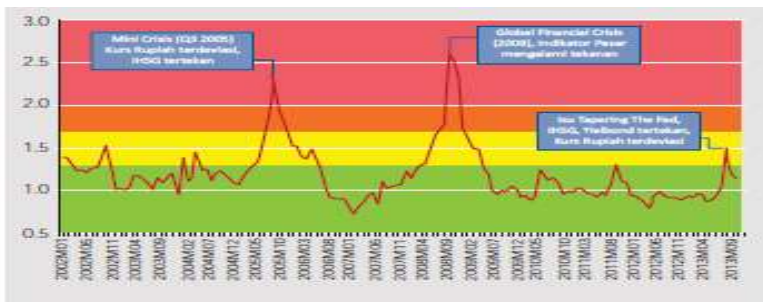
Sumber: Bank Indonesia (2013)

Tabel 3: Pembentuk Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

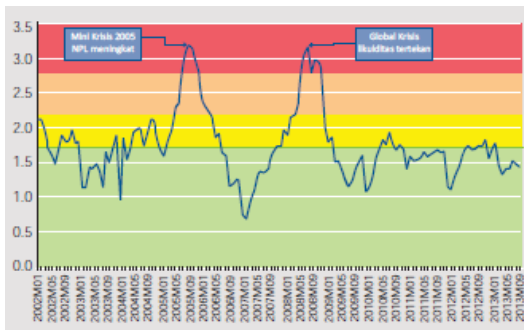
Parameter	2012					2013											
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nov	Des
ISSK	0,87	1,08	0,86	1,01	0,92	0,96	0,87	0,84	0,86	0,03	1,00	1,01	1,20	1,17	1,20	1,00	
ISSI	1,30	1,19	1,06	1,31	1,19	1,23	1,28	1,03	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	1,00	
Indeks Tekanan Institusi Perbankan	0,45	0,79	0,67	0,64	0,66	0,70	0,77	0,68	0,66	0,03	0,61	0,66	0,66	0,68	0,63	0,68	
Indeks Intermediasi Perbankan	0,99	1,20	1,22	1,41	1,20	1,21	1,20	1,21	1,06	1,00	1,00	1,14	1,14	1,12	1,12	1,10	
Indeks Efisiensi Perbankan	0,88	0,34	0,36	0,30	0,47	0,66	0,68	0,25	0,20	0,20	0,41	0,01	0,40	0,48	0,23	0,30	
BIKX	0,70	1,01	0,78	0,76	0,78	0,74	0,71	0,69	0,70	0,07	1,00	1,00	1,21	1,20	1,30	1,10	

*1 Data Perbankan sd Nov 2013, pasar keuangan sd 31 Des 2013

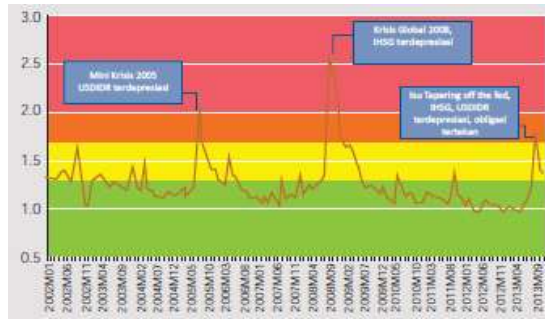
Sumber: Bank Indonesia (2014)



Gambar 3: Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)



Gambar 4: Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK)



Gambar 5: Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK)

Sumber: Bank Indonesia (2014)

Tabel 3 dan gambar 3 menunjukkan hasil perhitungan indeks stabilitas sistem keuangan (ISSK) yang dihitung dari komponen komponennya yaitu dari NPL, Delta $((AL-GWM)/TA)$, CAR, ROA, Spread suku bunga kredit dengan DPK, Gap LDR, Gap Kredit/GDP, NIM, BOPO, PUAB-BI Rate, Volatilitas IHSG, Yield Obligasi Negara, Volatilitas Nilai Tukar, dan CDS. ISSK di atas angka indikatif maksimum 2 yang menunjukkan sistem keuangan nasional dalam keadaan genting. (Departemen Keuangan, 2010,22). Gambar 4 menunjukkan indeks stabilitas institusi keuangan (ISIK) sedangkan gambar 5 menunjukkan indeks stabilitas pasar keuangan (ISPK), keduanya membentuk indeks stabilitas sistem keuangan.

Indeks stabilitas sistem keuangan yang diungkap Bank Indonesia terbaru (2020) adalah sebagai berikut:



Gambar 6: Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (2017-2020)

Sumber: Bank Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan no 36 maret tahun 2021

Gambar 6 menunjukkan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) masih dalam zona normal dan bertahan di bawah batas 2 hingga pada akhir desember berada pada angka 0,41. Terlihat adanya penurunan ISSK dibanding realisasi Semester I 2020 karena didukung oleh ketahanan likuiditas dan efisiensi perbankan. Tekanan dari sisi tingkat intermediasi masih relatif tinggi dan masih belum kembali ke level pra pandemi. Tertahannya intermediasi perbankan tercermin dari standar pinjaman perbankan yang ketat.

Lembaga yang berkepentingan sesuai dengan tugasnya dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai amanat Undang-Undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (2016) yaitu komite stabilitas sistem keuangan yang terdiri dari:

1. Otoritas jasa keuangan, di mana misi kedua dan tujuan kedua otoritas jasa keuangan adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil seperti yang tertuang pada pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan.
2. Bank Indonesia, di mana misi kedua Bank Indonesia adalah turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Selain dari misi Bank Indonesia, terlihat juga dari tugas pokok Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas Rupiah melalui stabilitas moneter dan didukung oleh stabilitas keuangan. Jadi dalam praktiknya, fungsi untuk menjaga stabilitas moneter tidak dapat terlepas dari fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Lembaga penjamin simpanan, di mana fungsi kedua dan tugas ketiga lembaga penjamin simpanan yang tercantum pada pasal 4 dan 5 UU No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan di mana sistem perbankan adalah bagian kecil dari sistem keuangan.

4. Kementerian keuangan, di mana salah satu struktur organisasi kementerian keuangan adalah kesekretariatan stabilitas sistem keuangan yang bertugas diantaranya merumuskan kerangka kerja, penilaian kriteria dan indikator, penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan serta mengusulkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi setiap anggota komite stabilitas sistem keuangan.

Komite stabilitas sistem keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Komite stabilitas sistem keuangan bertugas untuk:

1. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
2. melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan
3. melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan diberi wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan keputusan mengenai tata kelola komite stabilitas sistem keuangan dan sekretariat komite stabilitas sistem keuangan;
2. membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas komite stabilitas sistem keuangan;
3. menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan;
4. melakukan penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota komite stabilitas sistem keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
5. menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota komite stabilitas sistem keuangan;
6. merekomendasikan kepada presiden untuk memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan, dari kondisi

- normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal;
7. merekomendasikan kepada presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis sistem keuangan;
 8. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada lembaga penjamin simpanan;
 9. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota komite stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh lembaga penjamin simpanan;
 10. menetapkan keputusan pembelian oleh bank indonesia atas surat berharga negara yang dimiliki lembaga penjamin simpanan untuk penanganan bank; dan
 11. merekomendasikan kepada presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran program restrukturisasi perbankan.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada presiden yang berisi tentang:

1. kondisi stabilitas sistem keuangan setiap 3 (tiga) bulan;
2. penanganan krisis sistem keuangan;
3. penanganan permasalahan bank sistemik; dan/atau
4. pelaksanaan program restrukturisasi perbankan oleh lembaga penjamin simpanan.

Sistem keuangan dapat berada pada tingkat global, regional maupun perusahaan, dalam penanganan stabilitas sistem keuangan tidak hanya berpusat pada komite stabilitas sistem keuangan, individu, perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah dan lainnya dapat mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yaitu dengan tidak panik, jika ada berita buruk mengenai sektor keuangan, jangan sesegera mungkin menarik dana di bank, karena bank menguasai kurang lebih 75% aset pada sistem keuangan, artinya jika aktivitas perbankan terganggu, maka sistem keuangan menjadi tidak stabil karena 60-90% dana simpanan di bank disalurkan ke kredit yang ada jangka waktu pengembalian dengan

perjanjian, sehingga bank tidak akan mampu mengembalikan dana nasabah penyimpan dengan cepat.. Edukasi sejak dini mengenai stabilitas sistem keuangan yang isinya bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi pada stabilitas sistem keuangan akan membantu mengurangi pengambilan dana (*bank run*) dan ditunjang dengan adanya lembaga penjamin simpanan yang menjamin dana nasabah penyimpan sampai jumlah tertentu tergantung peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2021.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx> diunduh 20 Juli 2021
- Bank Indonesia 2013b. *Kajian Stabilitas Keuangan* No. 21 Oktober. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia 2014. *Kajian Stabilitas Keuangan* No. 22 Maret. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2021. *Kajian Stabilitas Keuangan* No. 22, Maret.
- Bank Indonesia. 2013a. *Kajian Stabilitas Keuangan* No.20 Maret. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dahlan Siamat. 2005. Manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan, Lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Gunadi, Iman, Taruna, Aditya Anta, Harun, Cicilia Anggadewi. 2014. Penggunaan Indeks Stabilitas Keuangan (ISSK) dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial. Bank Indonesia Research Paper. *Kajian Stabilitas Keuangan* no. 22, Maret
- Hauben, Aerd. Kakes, Jan. Schinasi, Garry. 2004. Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability. IMF Working Paper WP/04/01. June.
- Kementrian keuangan,
<https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk>
diunduh 20 Juli 2021
- Lembaga penjamin simpanan,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>
diunduh 20 Juli 2021

- Otoritas Jasa Keuangan,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>
- Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
- Schinasi, Garry J. 2004. Defining Financial Stability IMF Working Paper WP/04/187. International Monetary Fund, September.
- Schinasi, Garry J. 2005. *Preserving Financial Stability, Economic Issues 36*. International Monetary Fund.
- Schinasi, Garry J. 2006. *Safeguarding of Financial Stability: Theory and Practice*. Washington: International Monetary Fund
- Undang -Undang No.24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Tentang Penulis



Alfiana, lahir di Bandung 9 Oktober 1965, mengawali pendidikan di SDN Sabang 2 lulus tahun 1977 Bandung, kemudian SMPN VII Bandung lulus tahun 1990, dan SMAN IX Bandung lulus tahun 1983. Pendidikan strata 1 dijalani di Universitas Katolik Parahyangan jurusan manajemen, Strata 2 dan strata 3 di Universitas Padjadjaran Magister Manajemen dan doktor Ilmu Manajemen. Pekerjaan saat ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung dengan jabatan fungsional lektor kepala dan pernah menjabat ka Prodi Magister Manajemen Universitas Widyatama 2018-2020.

BAB 11

SINERGI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (TIK) BERSAMA UMKM MENUJU KEBANGKITAN EKONOMI PASCA PANDEMI

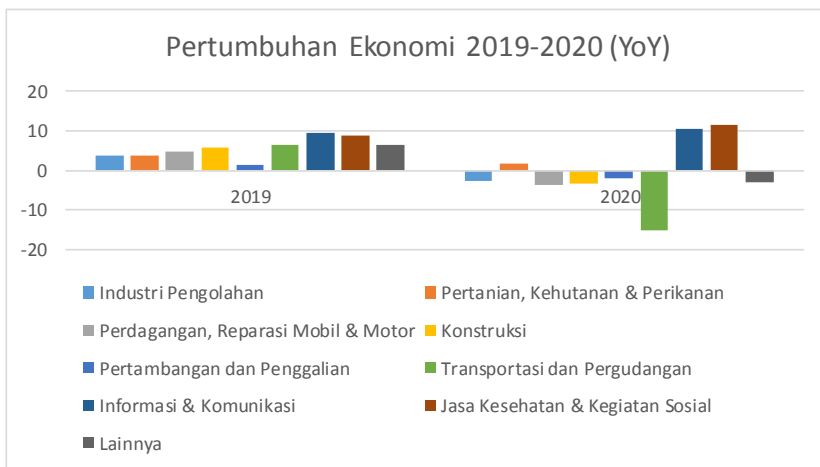
*Dr. Siti Mardiana, M.T., M.S.I. S.eC.
Universitas Muhammadiyah Bandung*

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selama pandemi

Pandemi Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia di tahun 2020-2021 tidak hanya berakibat kepada banyaknya korban jiwa tetapi juga memburuknya situasi ekonomi di negara-negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah kasus tertinggi penderita Covid mendapat dampak yang relatif berat. Menurut laporan Biro Pusat Statistik, perekonomian Indonesia turun sebesar 2,07% di tahun 2020 (Biro Pusat Statistik, 2021). Penurunan ini terjadi karena berbagai bidang usaha terpaksa harus meliburkan karyawan mereka untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas. Sebagian perusahaan bahkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan mereka. Hal tersebut membuat turunnya jumlah penghasilan masyarakat yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat.

Industri transportasi adalah sektor yang terpuuk cukup berat karena pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang intinya membatasi pergerakan masyarakat. Masyarakat sendiri juga membatasi diri untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, persyaratan kesehatan yang cukup ketat (cek suhu tubuh dan cek antigen) untuk dapat menggunakan sarana transportasi umum membuat banyak orang enggan untuk melakukan perjalanan. Sebagai akibatnya selama tahun 2020

sektor industri transportasi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 15,04% (Biro Pusat Statistik, 2021), merupakan kontraksi terdalam sebagai akibat dari pandemi. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 11-1 yang menunjukkan bahwa dari sembilan jenis industri, hanya tiga industri yang tidak mengalami kontraksi yaitu 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut terlihat pada Gambar 11-1.

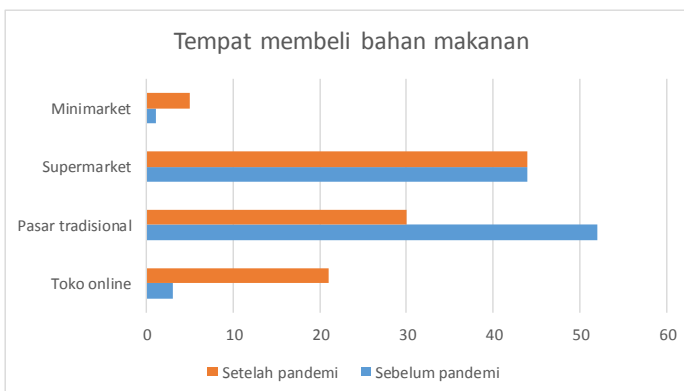


Gambar 11-1 Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 (YoY) (Biro Pusat Statistik, 2021)

Pertumbuhan yang tinggi pada industri kesehatan dan kegiatan sosial selama pandemi sangat bisa dimengerti karena industri kesehatan merupakan garda terdepan dalam melawan pandemi. Di masa pandemi kebutuhan terhadap tenaga kesehatan dan obat-obatan sangatlah besar. Sektor kedua yang mempunyai pertumbuhan positif adalah Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Tidak bisa diungkiri bahwa selama pandemi berlangsung, kegiatan perkantoran dan pendidikan lebih banyak dilakukan secara daring. Demikian juga kegiatan ekonomi dari jual-beli di toko fisik beralih ke jual-beli secara online. Hal tersebut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pertumbuhan positif industri bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut nantinya

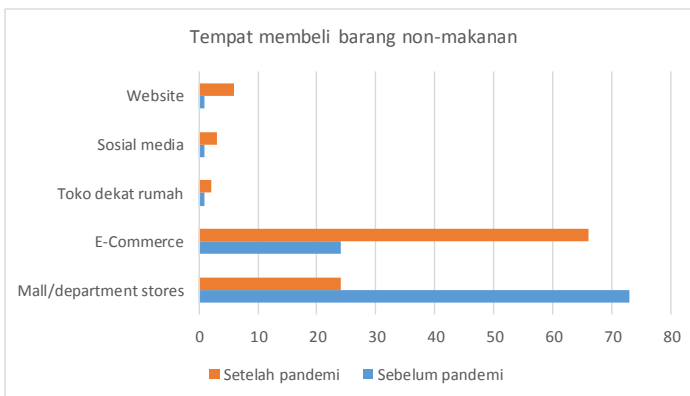
diharapkan akan bertahan bahkan setelah pandemi karena TIK akan menjadi landasan tumbuhannya ekonomi di era normal baru (*new normal*).

Pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk di perkantoran dan sekolah, telah memberi efek domino terhadap berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh kecil, dalam kondisi normal pegawai perkantoran atau murid sekolah akan membeli makanan di seputar kantor atau sekolah, maka sejak terjadinya pandemi kegiatan tersebut terhenti seketika karena para pegawai dan anak sekolah lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Ketika para pengusaha di bidang industri makanan saji (warung dan restoran) banyak yang terpaksa menutup tempat usaha mereka, maka hal tersebut berakibat pada berkurangnya aktivitas pembelian bahan makanan di pasar tradisional seperti terlihat pada Gambar 11-2. Selain itu, masyarakat pun semakin jarang ke pasar tradisional karena khawatir terjadi kerumunan yang mengakibatkan penularan virus. Dari Gambar 11-2 terlihat juga pergeseran frekuensi belanja dari pasar tradisional ke toko online yang menyediakan bahan makanan. Frekuensi pembelian bahan makanan di supermarket nampak tidak berubah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menilai supermarket lebih teratur dan kerumunan bisa dihindari. Pun di banyak supermarket diberlakukan pembatasan jumlah pengunjung yang boleh masuk dalam satu waktu.



Gambar 11-0-2 Perubahan tempat membeli bahan makanan sebelum dan selama pandemi (Widjaja & Sim, 2020)

Ternyata bukan hanya pemilihan tempat belanja bahan makanan yang berubah tetapi juga pemilihan tempat belanja barang non-makanan. Selama pandemi, masyarakat lebih memilih belanja kebutuhan non-makanan secara daring dibandingkan dengan datang langsung ke toko/mall seperti yang terlihat di Gambar 11-3. Hal tersebut didukung oleh data yang didapat dari berbagai perusahaan marketplace bahwa kegiatan belanja di platform mereka meningkat tajam selama pandemi (Astutik & Hastuti, 2020). Kementerian komunikasi dan informatika menyatakan pendapat yang senada bahwa ekonomi digital telah menjadi tulang punggung perekonomian selama pandemi (Rizkinaswara, 2020). Ekonomi digital diproyeksikan akan tetap menjadi primadona bahkan setelah pandemi selesai karena platform ekonomi digital menawarkan berbagai kemudahan bari dari sisi penjual maupun pembeli.



Gambar 11-3 Perubahan tempat pembelian banan non-makanan sebelum dan selama pandemi (Widjaja & Sim, 2020)

Dari ulasan tersebut terlihat jelas bahwa teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengakomodasi perubahan kehidupan masyarakat selama pandemic: mendukung kegiatan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH). Di samping itu, himbauan untuk menjaga jarak selama pandemi juga telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jasa yang bisa diakses secara *online*. Sebagai contoh adalah alat pembayaran dengan *digital banking* dan *e-wallet*. Kedua jenis

layanan keuangan tersebut adalah contoh di mana teknologi informasi memberi peran penting selama pandemi. Berbagai bank melaporkan adanya kenaikan dalam transaksi melalui *digital banking* selama pandemic di tahun 2020 (Astutik & Hastuti, 2020). Selama pandemi tahun 2020 hingga awal 2021, transaksi *digital banking* naik sekitar 22,9% (Muhtarom, 2021). Dengan tersedianya layanan transaksi non-tunai, masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk ke mesin ATM guna mengambil uang tunai. Mereka juga tidak perlu bertemu muka dengan penjual untuk menyerahkan pembayaran secara tunai atau menerima pengembalian. Selain menghindari adanya kontak, pertukaran uang secara fisik juga dikhawatirkan menjadi perantara penularan virus Covid-19. Penggunaan dompet digital (*e-wallet*) juga melonjak pesat selama pandemi dengan pertambahan pengguna baru sebesar 44% selama tahun 2020 (Elmira, 2021) dengan kenaikan transaksi hingga Februari 2021 sebesar 26,4% year on year (Muhtarom, 2021).

UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia

Meskipun akibat dari buruknya perekonomian saat pandemi dirasakan oleh semua kalangan, namun yang paling berat mendapat pukulan adalah usaha mikro dan kecil (UKM). Menurut laporan dari Asian Development Bank, hampir separuh dari UMKM di Indonesia tutup sementara saat pandemi di tahun 2020 (Asian Development Bank, 2020). Sumber dari Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) diperkirakan ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut saat pandemi (DPR RI, 2021; Puspaningtyas & Zuraya, 2021). Yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa UMKM merupakan penyedia lapangan pekerjaan bagi 97% pekerja di Indonesia dan penyumbang 60,3% *product domestic bruto* (PDB) Indonesia (Agustini, 2020; UNDP Indonesia, 2021). Oleh sebab UMKM bisa disebut sebagai pilar perekonomian Indonesia. Itu artinya bahwa segala upaya untuk mendongkrak ekonomi harus fokus kepada UMKM.

Meskipun terpuruk selama pandemi, namun UMKM tetap berusaha menggeliat dengan memanfaatkan keberadaan teknologi

informasi dan komunikasi melalui saluran e-commerce. Kehadiran UMKM di *e-commerce* meningkat tajam selama tahun 2020-2021 dari 2 juta menjadi 4,8 juta (Sukarno, 2021). Pada tahun 2020 nilai gross merchandize value (GMV) *e-commerce* di Indonesia meningkat dengan pesat mencapai US\$40 (Eloksari, 2020) merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Google, Temasek, & Bain & Company (2020) menyebut angka US\$44). Dengan potensi ekonomi digital yang demikian besar maka tidak diragukan lagi bahwa UMKM akan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional bahkan setelah pandemi.

Di tahun 1998 saat Indonesia mengalami resesi ekonomi yang cukup berat, UMKM terbukti mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Saat itu perusahaan-perusahaan besar terpukul karena nilai rupiah yang sangat lemah terhadap mata uang dolar Amerika. UMKM yang tidak tergantung terhadap nilai mata uang asing tetap bisa bertahan dan menjadi tumpuan pergerakan ekonomi rakyat. Terbukti rakyat Indonesia bisa melampaui krisis 1998 dengan baik dan menuju era reformasi di awal abad 21 dengan semangat optimis.

Berbeda dengan krisis tahun 1998, saat pandemi 2020-2021 terjadi pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, termasuk UMKM, untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. UMKM sendiri banyak yang melakukan pembatasan aktivitas usaha mereka, misal dengan menutup gerai, membatasi jumlah pelanggan yang datang, atau membatasi jam operasional. Hal tersebut membuat UMKM tidak bisa bergerak secara leluasa sehingga tidak bisa dielakkan membuat banyak UMKM jatuh terpuruk. Namun sebagian dari para pelaku UMKM tetap berusaha mencari celah untuk menemukan “kesempatan dalam kesempitan” dalam artian positif. Dengan memanfaatkan segala inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, banyak UMKM yang berusaha menggeliat dari keterpurukan dengan mengubah pola operasi mereka dari offline menjadi *online*.

Beberapa saluran (*channel*) penjualan online yang dijadikan sarana utama oleh UMKM selama pandemi adalah: 1) website perusahaan dan aplikasi online perusahaan, 2) e-commerce atau

online marketplace (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Grab, Gojek, dan sebagainya), dan 3) media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya). Dengan memanfaatkan berbagai saluran tersebut, sebagian UMKM bahkan mengalami kenaikan omzet saat pandemi (Ulya, 2020; Sukarno, 2021). Di tahun 2022 diproyeksikan bahwa UMKM melalui *e-commerce* akan mampu menyediakan lapangan kerja untuk 26 juta pencari kerja (Das, Tamhane, Vatterott, Wibowo, & Wintels, 2018).

Geliat kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan saluran online bukan hanya terjadi di kota besar. Di berbagai daerah dan pelosok kota di Indonesia terdapat berbagai kelompok masyarakat yang membuat group di media sosial yang berfungsi sebagai media informasi jual-beli. Sebagai contoh adalah beberapa group kuliner di Facebook, diantaranya group Kuliner Kuningan yang beranggotakan 22.000 pengguna, group kuliner Cianjur yang diikuti oleh 48.000 pengguna, group kuliner Ngawi yang mempunyai anggota 64.000 pengguna. Di dalam kelompok kuliner tersebut para anggota saling menawarkan dagangan mereka, mulai dari hasil panen di sawah atau tegal mereka hingga produk makanan jadi buatan mereka sendiri. Ini adalah bentuk “Digitalisasi” sederhana dari ekonomi rakyat. Geliat ekonomi rakyat melalui media sosial ini pantas mendapat perhatian karena ribuan masyarakat bertumpu pada saluran media sosial Facebook yang secara unik dipilih masyarakat di daerah untuk saling berkomunikasi sekaligus berniaga. Itu adalah bentuk realisasi digitalisasi dari pasar tradisional yang sesungguhnya di mana masyarakat tidak hanya bertemu untuk berjual-beli (seperti di marketplace online) tetapi juga bersosialisasi dan bertegur sapa.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai *enabler* untuk transformasi digital UMKM

Pemerintah Indonesia melalui berbagai program di berbagai kementerian berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi, salah satunya melalui transformasi digital UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi digital. Transformasi digital adalah perubahan drastis segala aspek proses bisnis dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Itu artinya bahwa sekadar berjualan di *e-commerce* atau melakukan promosi di media sosial belum bisa disebut sebagai transformasi digital yang menyeluruh. Salah satu program dari pemerintah untuk mendukung transformasi digital sebenarnya sudah diawali jauh hari sejak tahun 2016 berupa program UMKM Go Online dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Program UMKM Go Online menuntut UMKM untuk melakukan empat langkah menuju bisnis digital, yaitu 1) on boarding – UMKM mulai masuk ke dalam pasar online terutama melalui marketplace/*e-commerce*, 2) aktif berjualan dan meningkatkan jumlah transaksi, 3) *scale up business* – memperbesar volume bisnis, dan 4) Go export – UMKM mulai merambah pasar di negara lain melalui ekspor produk-produk Indonesia. Ekspor tersebut bisa dilakukan dengan penjualan langsung melalui marketplace. Ketika dicanangkan di tahun 2016, UMKM Go Online menargetkan bahwa pada tahun 2020 akan terdapat enam juta UMKM yang berada di marketplace. Namun hingga awal tahun 2021 baru terdapat 4,8 juta UMKM yang bergabung ke *e-commerce* (Karina, 2021). Jika dihitung dengan UMKM yang beraktivitas bisnis di media sosial (tetapi tidak mempunyai akun di *e-commerce*) maka angka enam juta tersebut kemungkinan besar telah tercapai karena aktivitas penjualan melalui media sosial mencapai 40% dari seluruh aktivitas perniagaan online (Das et al., 2018).

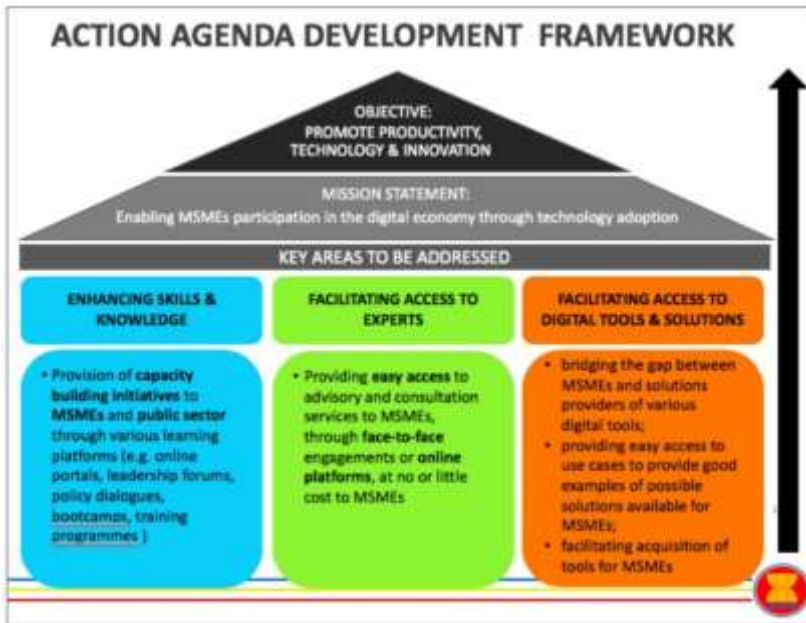
Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa sasaran untuk program Pengembangan *e-commerce* dan ekonomi digital yaitu 1) penguatan ekosistem digital, 2) penataan penyelenggaraan *e-commerce*, 3) pembenahan basis data *e-commerce*, 4) pelaksanaan ekspor melalui *e-commerce*, dan 5) peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung ekspor produk UMKM Indonesia. Tentunya pelaksanaan merupakan program yang bersinergi dengan program UMKM Go Online. Untuk itu diperlukan pasar digital yang sudah matang dan ramai oleh pembeli atau pemakai internet.

Selama pandemi 2020, pengguna internet di Indonesia naik sekitar 37% (Google et al., 2020). Diperkirakan angka tersebut

akan terus bertahan bahkan naik setelah pandemi berakhir. Yang menggembirakan adalah bahwa lebih dari 50% pemakai internet di Indonesia tinggal di kota kecil. Itu artinya pemakai internet sudah relatif merata tidak hanya di kota besar. Hal tersebut memberi harapan akan adanya potensi yang besar untuk pasar ekonomi digital, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Dimulai dari tahun 2016 hingga 2019 pemerintah Indonesia telah meluncurkan proyek Palapa Ring yaitu pembangunan jaringan serat optik di wilayah Indonesia barat, tengah dan timur. Jaringan Palapa Ring berfungsi sebagai tulang punggung (*backbone*) komunikasi yang diharapkan mampu melayani kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dengan *bandwidth* yang lebih besar. Meskipun infrastruktur telekomunikasi telah tersedia dengan jaringan Palapa Ring namun sampai pada bulan Maret 2021 secara umum penetrasi pemakaian internet di Indonesia masih rendah (74% dari total populasi) dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand (81,5%), Singapura (88%), Malaysia (89%), dan Brunei (97,5%). Menurut data di Biro Pusat Statistik di tahun 2019 terdapat 83.820 desa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, di tahun 2020 terdapat 20.000 desa yang belum terjangkau internet. Daerah yang belum banyak terjangkau internet adalah Papua dan Nusa Tenggara (UNICEF, 2021). Di samping itu, rata-rata kecepatan internet mobile di Indonesia adalah sekitar 13,83 Mbps, lebih rendah dibandingkan Malaysia (23.8 Mbps), Thailand (25.9 Mbps), Vietnam (30,39 Mbps), dan Singapura (57.16).

Banyak daerah di Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh Palapa Ring. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan proyek Satelit Satria untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak dapat bisa dilayani oleh Palapa Ring. Satelit Satria diharapkan akan beroperasi sekitar tahun 2022. Dengan berbagai pembangunan infrastruktur di bidang teknologi telekomunikasi diharapkan angka penetrasi internet di Indonesia akan semakin meningkat serta membuka peluang bagi kebangkitan ekonomi digital yang semakin cepat.



Gambar 11- 4 Kerangka kerja pengembangan Go Digital ASEAN (ASEAN Coordinating Committee on MSMEs (ACCMSME), 2020)

Karena Indonesia berada di lingkungan negara-negara ASEN maka kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam pengembangan ekonomi digital sangatlah penting. Ekonomi digital pada prinsipnya merupakan aktivitas ekonomi tanpa garis batas negara, bisa melintas antar negara. Barang yang dijual secara online di Singapura misalnya bisa dilihat dan dibeli oleh seseorang yang berada di Indonesia, dan sebaliknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, di tahun 2020 ASEAN telah membentuk kesepakatan untuk bersama-sama membangun ekonomi digital sebagai langkah kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kesepakatan tersebut disebut Go Digital ASEAN dengan kerangka kerja seperti terlihat pada Gambar 11-4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa TIK mempunyai peran sangat vital. Tujuan akhir adalah meningkatkan produktivitas, teknologi dan inovasi dengan mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.

Hambatan dalam transformasi digital untuk UMKM

Terdapat lima landasan bagi terciptanya ekonomi digital, yaitu 1) konektivitas – tersedianya internet kecepatan tinggi dengan harga murah, 2) sistem pembayaran online, terutama yang bisa diterima antar negara, 3) sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam teknologi digital, 4) layanan logistik – yang murah dan bisa mencapai daerah terpencil serta antarnegara, dan 5) kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi digital – misal menyangkut keamanan data dan perlindungan konsumen (World Bank Group, 2019; UNCTAD (2021)). Secara perlahan pemerintah Indonesia telah membangun landasan tersebut demi segera terciptanya ekonomi digital dalam level yang diharapkan.

Sehubungan dengan lima landasan tersebut di atas, bagi UMKM di Indonesia, hambatan utama untuk menuju transformasi digital adalah:

1. Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan dalam bidang TIK. Banyak pemilik UMKM yang hanya bisa mengoperasikan *smartphone* atau komputer secara terbatas. Banyak fitur dan aplikasi yang tidak mereka pahami dan kuasai, termasuk juga konsep keamanan data dan keamanan bertransaksi secara online.
2. Kurangnya kemampuan pengelolaan bisnis secara online. Menjalankan bisnis secara online berbeda dengan offline. Sebagai contoh, jika suatu UMKM menggunakan suatu saluran daring untuk melaksanakan jual-beli maka mereka tersebut harus menyediakan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk/jasa yang mereka tawarkan tersebut. Pelanggan online tidak bisa melihat barang secara langsung, tidak bisa memegang atau meraba teksturnya, tidak mengetahui ukuran atau dimensinya, tidak bisa melihat warnanya secara jelas (tampilan di layar gawai bisa berbeda dengan warna aslinya).
3. Keterbatasan kemampuan finansial. Selain masalah keterbatasan permodalan untuk bisa mengadopsi TIK, UMKM yang berada di kelas usaha mikro juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses institusi keuangan. Banyak diantara mereka

yang bahkan tidak mempunyai rekening bank sehingga menghambat pembayaran secara online. Karena mereka tidak mempunyai rekening bank, maka biasanya mereka juga tidak mempunyai akun dompet digital. Hal tersebut menyulitkan pelaksanaan transaksi secara online.

4. Daya saing rendah, apalagi dengan membanjirnya produk impor. UMKM perlu meningkatkan keterampilan agar produk mereka bisa bersaing dengan produk serupa dari luar negeri. Selain itu perlu regulasi yang ketat dari pemerintah untuk membatasi masuknya barang impor dari luar negeri yang kemungkinan bersaing dengan produk lokal.
5. Kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak UMKM yang tidak memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai contoh, banyak UMKM yang belum mengerti pentingnya pendaftaran merek mereka. Dengan mendaftarkan merek usaha mereka maka akan melindungi keberlangsungan usaha mereka di masa mendatang, menjamin bahwa merek yang mereka gunakan dan mereka "*Branding*" tidak dimiliki dan belum dipakai oleh pihak lain.

Berbagai keterbatasan di atas memerlukan solusi yang datang baik dari pemerintah dan dari berbagai komunitas penggerak dan pendamping UMKM. Pendampingan terhadap UMKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar mereka bisa naik kelas, bisa bersaing di negara sendiri dan juga di manca negara. Harapan yang besar tercurah untuk kebangkitan UMKM menuju ekonomi digital untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Agustini, P. 2020. Menkominfo: UMKM Sumbang 60 Persen PDB Indonesia. Retrieved from Aptika.Kominfo.Go.Id website: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/menkominfo-umkm-sumbang-60-persen-pdb-indonesia/>
- ASEAN Coordinating Committee on MSMEs (ACCMSME). 2020. *Factsheet "Go Digital ASEAN: Digital Skills to Address The Economic Impact of COVID-19" Project*. Retrieved from https://asean.org/storage/2020/06/Factsheet-Go-Digital-ASEAN-as-of-19-June-2020_final.pdf
- Asian Development Bank. 2020. *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: COVID-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia*. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/asia-sme-monitor-2020-country-regional-reviews>
- Astutik, Y., & Hastuti, R. K. 2020. Transaksi Digital Sampai e-Commerce Melesat di Era Pandemi. *CNBC Indonesia.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200825151913-37-181854/transaksi-digital-sampai-e-commerce-melesat-di-era-pandemi>
- Biro Pusat Statistik. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. In *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Das, K., Tamhane, T., Vatterott, B., Wibowo, P., & Wintels, S. 2018. The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development. In *McKinsey & Company*. Retrieved from www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/the-digital-archipelago-how-online
- DPR RI. 2021. 30 juta UMKM bangkrut, Kmenkop UKM diminta lakukan Pedataan dan Evaluasi. *Parlementaria Terkini - DPR RI*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32556/t/30+Juta+>

UMKM+Bangkrut%2C+Kemenkop+UKM+Diminta+Lakukan
+Pedataan+dan+Evaluasi

- Elmira, P. 2021. Studi : Penggunaan Dompot Elektronik Melonjak Selama Pandemi Covid-19. *Liputan6.Com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4496366/studi-penggunaan-dompot-elektronik-melonjak-selama-pandemi-covid-19>
- Eloksari, E. A. 2020. Indonesia's e-commerce sales to surpass India's. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/08/indonesias-e-commerce-sales-to-surpass-indias.html#:~:text=Redseer Southeast Asia partner Roshan,than India's predicted %2438 billion.>
- Google, Temasek, & Bain & Company. 2020. *E-Conomy SEA 2020 - At full velocity: Resilient and racing ahead*. Retrieved from <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2020/>
- Karina, D. 2021. Berkah Pandemi, Ada 4,8 Juta UMKM Gabung Marketplace. *Kompas.Tv*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/169417/berkah-pandemi-ada-4-8-juta-umkm-gabung-marketplace>
- Muhtarom, I. 2021. Persaingan 5 Dompot Digital Berebut Pasar di Masa Pandemi Covid-19. *Bisnis.Tempo.Com*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1445184/persaingan-5-dompot-digital-berebut-pasar-di-masa-pandemi-covid-19/full&view=ok>
- Puspaningtyas, L., & Zuraya, N. 2021. 30 Juta UMKM Bangkrut, Sisanya Bertahan dengan Digitalisasi | Republika Online. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qkkg48383/30-juta-umkm-bangkrut-sisanya-bertahan-dengan-digitalisasi>
- Rizkinaswara, L. 2020. Ekonomi Digital jadi Penopang Perekonomian di Tengah Pandemi. *Aptika.Kominfo.Id*, 19(September), 7-10. Retrieved from <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/ekonomi-digital-jadi-penopang-perekonomian-di-tengah-pandemi/>

- Sukarno, P. A. 2021. Ada Pandemi, Jumlah Transaksi dan Pelaku UMKM di e-commerce Melesat. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210429/12/1388059/ada-pandemi-jumlah-transaksi-dan-pelaku-umkm-di-e-commerce-melesat>
- Ulya, F. N. 2020. Riset : 9 Persen UMKM yang “Go Digital” Catat Kenaikan Omzet saat Pandemi. *KOMPAS.Com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/10/23/190500926/riset--9-persen-umkm-yang-go-digital-catat-kenaikan-omzet-saat-pandemi>
- UNCTAD. 2021. *Covid-19 and E-Commerce - A global review*. Retrieved from <https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review>
- UNDP Indonesia. 2021. *Micro, Small and Medium Enterprises bear the brunt of the COVID-19 pandemic in Indonesia*. Retrieved from <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/precenter/pressreleases/2021/MSMEs-bear-the-brunt.html>
- UNICEF. 2021. *Final Report: Situational Analysis on Digital Learning Landscape in Indonesia*. Retrieved from [https://www.unicef.org/indonesia/media/8766/file/Digital Learning Landscape in Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/8766/file/Digital%20Learning%20Landscape%20in%20Indonesia.pdf)
- Widjaja, C. C., & Sim, A. 2020. COVID-19's Impact on Indonesian Consumers Accelerating Shifts in Consumer Behaviour. *DBS Asian Insights: Sector Briefing 91*, pp. 1–46. Retrieved from https://www.dbs.com/in/sme/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/092020/200922_insights_id_consumer.xml#
- World Bank Group. 2019. *The Digital Economy in Southeast Asia : Strengthening the Foundations for Future Growth*. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10986/31803>

Tentang Penulis



Dr. Siti Mardiana, Ir., M.T., M.Si., S.eC., lahir di Madiun, 3 Januari 1966. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dari Jurusan Teknik Komputer. Pendidikan master diselesaikan di program studi Informatika, Institut Teknologi Bandung. Saat tinggal di Amerika Serikat selama 14 tahun dari tahun 1998–2012, dia menyempatkan mengambil master yang kedua bidang Management Information System and *e-Commerce* di College of Business, Arkansas State University. Pendidikan S3 diselesaikan di Sekolah Bisnis Management, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Sejak tahun 2021 menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bandung.

BAB 12

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

*Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Bandung*

*“Sustainable development is one of those ideas that everybody supports but nobody knows what it means”
(Sir Jonathon Porritt quoted in the Financial Times, 1998).*

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan bersamaan dengan kesadaran bahwa kerusakan ekologis dimanifestasikan sebagai kemiskinan, kekurangan serta faktor yang merusak dunia dan tidak dapat dipertahankan (Do & Thomas, 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menggabungkan kekhawatiran yang berkembang tentang berbagai masalah lingkungan dengan masalah sosial ekonomi. Ini merupakan hasil dari tumbuhnya kesadaran akan keterkaitan global antara masalah lingkungan yang meningkat, masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta kekhawatiran tentang masa depan umat manusia.

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu elemen pengorganisasian yang menopang sumber daya yang tidak terbarukan dan terbatas dengan tujuan melestarikannya bagi generasi masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses komitmen masa depan yang diinginkan bagi masyarakat, di mana kondisi dan penggunaan sumber daya akan memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak integritas, keindahan serta stabilitas sistem vital (Garg, 2015).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah fokus pada perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memberikan solusi bagi pola pembangunan, sosial dan ekonomi untuk mencegah masalah seperti perusakan sumber daya alam, degradasi sistem biologis, polusi, perubahan iklim, peningkatan populasi yang berlebihan, ketidakadilan dan penurunan kualitas kehidupan baik di masa sekarang dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses menggunakan sumber daya, mengarahkan investasi, pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan (Sharma & Kushwaha, 2015).

Pembangunan berkelanjutan sebagai pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial dilakukan dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alami, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang menggunakan kapasitas ekosistem di sekitarnya (Lotfi et al, 2018). Pembangunan berkelanjutan memberikan solusi bagi pola pembangunan struktural, sosial, dan ekonomi; mencegah masalah seperti perusakan sumber daya alam; degradasi sistem biologis, polusi, perubahan iklim, peningkatan populasi yang berlebihan, ketidakadilan, serta kemunduran kualitas hidup baik sekarang dan masa depan. Hal ini menunjukkan pembangunan berkelanjutan adalah paradigma yang menempatkan alam dan manusia sebagai subjek. Pembangunan berkelanjutan merupakan teori dan strategi pembangunan yang didasarkan pada perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, dengan syarat mendorong pembangunan ekonomi, dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan ekonomi sebagai konsep pembangunan, moralitas dan peradaban (Cao et al, 2019). Secara sinergis antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, masyarakat berusaha untuk mengejar pembangunan berkelanjutan di luar pembangunan ekonomi.

B. Defensi Pembangunan Berkelanjutan

Komisi Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (World Development Commission on Environment and Development, 1987). Definisi ini bertumpu pada 3 (tiga) pilar (ekologi, masyarakat, ekonomi) di mana pembangunan berkelanjutan menyangkut 3 (tiga) P (people, planet, dan Profit) (Crals & Vereeck, 2005).

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah stabilitas ekonomi dan lingkungan jangka Panjang. Hal ini dapat dicapai melalui integrasi dan pengakuan atas masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial di seluruh proses pengambilan keputusan. Definisi pembangunan berkelanjutan (lemah) menjelaskan hanya tingkat agregat modal penting seperti modal buatan. atau manufaktur, merupakan alternatif yang memadai untuk modal alam. Definisi pembangunan keberlanjutan (kuat) mengakui fitur unik sumber daya alam yang tidak dapat digantikan oleh modal manufaktur. Sebagian besar ahli ekologi dan lingkungan pendukung definisi keberlanjutan kuat (Stoddart, 2011).

C. Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Sachs (2015) menjelaskan bahwa konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyelaraskan tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik. Sebagai turunan dari konsep utama tersebut, pilar pertama dari pembangunan berkelanjutan dikenal sebagai 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*) (UN, 2015). Pilar 5P ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. *People*: pembangunan berkelanjutan memastikan semua manusia terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat.
2. *Planet*: pembangunan berkelanjutan berupaya melindungi bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang

tak bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan.

3. *Prosperity*: pembangunan berkelanjutan memastikan semua manusia memiliki kehidupan sejahtera, berkecukupan dan hidup harmonis berdampingan dengan alam.
4. *Peace*: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan begitu pula sebaliknya.
5. *Partnership*: keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama global yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi.

D. Sasaran pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan merupakan visi terhadap keadaan dunia global pada tahun 2030 dengan 17 tujuan. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan berlaku universal dengan sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya.



Gambar 1. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang menjadi komitmen dari semua negara di dunia termasuk Indonesia.

1.	Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di mana pun. Indonesia berkomitmen menghapus kemiskinan sesuai target yang ingin dicapai thn 2030. Warga negara memiliki akses pelayanan dan hak menikmati standar kehidupan layak. Pemerintah harus menjamin masyarakat miskin melalui program jaminan sosial.
----	--

2.	<p>Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Bertujuan mengakhiri jenis kelaparan tahun 2030, mengupayakan ketahanan pangan serta menjamin memiliki ketahanan pangan menuju kehidupan sehat. Pencapaian ini membutuhkan akses lebih baik terhadap pangan dan budidaya pertanian secara luas serta berkelanjutan.</p>
3.	<p>Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk setiap tahap kehidupan. Tujuannya meningkatkan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak; mengakhiri epidemi HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit tropis; mengurangi penyakit tidak menular dan environmental; mencapai cakupan kesehatan universal; dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau obat dan vaksin.</p>
4.	<p>Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua. Menjamin dan memastikan semua orang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.</p>
5.	<p>Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensi sehingga memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Bentuk diskriminasi dan kekerasan perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat perempuan, dan lainnya. Perempuan memiliki kesempatan memperoleh hak reproduksi. Pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.</p>
6.	<p>Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua. Pemerintah menjamin air bersih untuk keperluan masyarakat dan sanitasi yang baik agar menciptakan higienis dan Kesehatan sepanjang hidupnya.</p>
7.	<p>Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua. Perencanaan dilakukan agar menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat</p>

	akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk dan penambahan sarana transportasi.
8.	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Layak untuk Semua. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, dapat berkontribusi meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah.
9.	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.
10.	Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antarnegara. Mengurangi kesenjangan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan, baik di dalam dan antar negara. Para pemimpin dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Diperlukan komitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur.
11.	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Pada tahun 2030, diproyeksikan 6 dari 10 adalah penduduk kota. Banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan <i>driver</i> pembangunan berkelanjutan.
12.	Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Jejak bahan konsumsi merupakan jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi.
13.	Tujuan 13: Mengambil Tindakan cepat mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pelayanan iklim terkait dengan aksi terhadap iklim dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator global ini tidak tersedia di Indonesia sehingga termasuk indikator yang perlu untuk dikembangkan.
14.	Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki

	muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.
15.	<p>Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan keberlanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p> <p>Kontribusi dari situs keanekaragaman hayati pegunungan signifikan terhadap keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung secara global. Konsep kawasan lindung (Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam – IUCN) adalah ruang geografis, yang berdedikasi dan dikelola melalui hukum atau cara lain yang efektif, untuk mencapai konservasi jangka panjang dari alam yang terkait dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya.</p>
16.	<p>Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan.</p> <p>Pembangunan yang berkelanjutan agenda 2030 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel.</p>
17.	<p>Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Mencapai target agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerja sama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor lainnya. Peningkatan dukungan untuk mengembangkan negara, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil yang merupakan dasar untuk kemajuan adil bagi semua.</p>

E. Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan menyiratkan bahwa sumber daya terbarukan harus digunakan sedapat mungkin dan bahwa sumber daya tak terbarukan harus dikelola untuk memperpanjang kelangsungan hidup mereka untuk generasi yang akan datang. Indikator pembangunan berkelanjutan dipahami berdasarkan konsep serta identifikasi hubungan antara pembangunan ekonomi serta degradasi dan polusi lingkungan dalam konteks aktivitas bisnis. Indikator pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Indikator Tujuan pembangunan berkelanjutan

No	Tujuan	Indikator	Sumber	Metadata
1	Tanpa Kemiskinan	Penduduk miskin dengan garis kemiskinan \$1.90 per hari (%)	SUSENAS	Persentase populasi yang hidup < US\$1,90 per hari dihitung penyesuaian US dollar terhadap rupiah.
		Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (%)	BPS	Persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (representasi jumlah rupiah minimum dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok setara 2100 kkal/kapita/hari) dibagi jumlah penduduk periode waktu yang sama (%).
2	Tanpa Kelaparan	Balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek (%)	RISKESDAS	Stunting yaitu kondisi kurang gizi kronis berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan standar WHO 2005. Data tinggi badan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) landasan menganalisis status gizi dan tinggi badan balita dikonversikan ke nilai terstandar baku anthropometri anak balita WHO 2005.

				<p style="text-align: right; font-size: small;">Jurnal Pengabdian Masyarakat The Journal of Social and Economic Research Volume 1 Nomor 1 Desember 2019</p>
		Balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (%)	RISKESDAS	Balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus berdasarkan indeks berat badan dan tinggi badan dibandingkan menggunakan standar WHO 2005.
		Produktivitas tanaman pangan (t/ha)	BPS	<p>Nilai rata-rata hasil produksi persatuan luas perkomoditi tanaman pangan satu tahun laporan.</p> $Y_{it} = \frac{Q_{it}}{A_{it}} \times 100$
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Angka kematian di bawah 5 tahun (per 1.000 kelahiran hidup)	BPS	<p>Angka kematian < 5 thn atau angka kematian balita sebagai jumlah kematian anak belum mencapai 5 thn (dibagi jumlah kelahiran hidup periode sama dikalikan 1000 karena menghitung angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup)</p> $AKBa = \frac{JK < 5th}{JLH} \times 1.000$
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	BPS	Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi yang dilahirkan tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama

				kehidupan. Angka ini sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. $AKN = \frac{JK \times 28hr}{JLH} \times 1000$
		Angka harapan hidup saat lahir (tahun)	BPS	Angka harapan hidup saat lahir adalah suatu angka perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai ketika mereka lahir. Asumsi tingkat mortalitas terus berlaku. Angka harapan hidup saat lahir merefleksikan mortalitas suatu populasi.
		Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)	BPS	Definisi Kecelakaan Lalu Lintas adalah peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban
		Penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun (%)	RISKESDAS & SUSENAS	Persentase penduduk berusia > 15 thn dengan kebiasaan merokok didefinisikan jumlah penduduk berusia >15 thn yang merokok setiap hari selama sebulan terakhir dibandingkan

				<p>dengan jumlah penduduk berusia > 15 thn keseluruhan yang dinyatakan dalam satuan (%).</p> $\%M_{\geq 15} = \frac{JP_{\geq 15, M}}{JP_{\geq 15}} \times 100\%$
4	Pendidikan Berkualitas	Rata-rata lama sekolah (tahun)	SUSENAS	<p>Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 thn adalah rata-rata jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang).</p> $MST = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^n (i \times \text{orang telah selesai } i \text{ thn})$
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	BPS	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (19-23 thn)</p> $APK_{PT} = \frac{JMP_{PT}}{JP_{19-23}} \times 100\%$
		Angka melek huruf usia 15-24 (%)	SUSENAS	<p>Perbandingan jumlah penduduk berusia 15-24 thn</p>

				<p>yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15-24 thn</p> $PAA001\ 15-24 = \frac{JAM01\ 15-24}{JP\ 15-24} \times 100$
5	Kesetaraan Gender	Tingkat kesuburan wanita (kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun)	RISKESDAS	<p>Tingkat kesuburan wanita remaja adalah banyaknya kelahiran perempuan berusia 15-19 thn periode tertentu di antara jumlah penduduk dengan usia sama, dan dinyatakan setiap 1000 perempuan usia 15-19 thn.</p> $ASFR\ 15-19 = \frac{JK\ 15-19}{JP\ 15-19} \times 1.000$
		Proporsi perempuan dalam parlemen (%)	BPS	<p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah, dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.</p>

		Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (%)	SUSENAS	<p>Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita adalah persentase jumlah angkatan kerja wanita terhadap penduduk usia kerja wanita.</p> $TPAKW = \frac{JAKW}{JPW15+} \times 100\%$
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Rumah tangga dengan air minum layak (%)	SUSENAS	<p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya (%). Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air</p>

				<p>kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan.</p> $P_{AML} = \frac{JRTAME}{JRT} \times 100\%$
		Rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	SUSENAS	<p>Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau</p>

				bersama rumah tangga lain tertentu. Sanitasi layak memenuhi lima (5) kriteria STBM yaitu (i) stop buang air besar sembarangan; (ii) cuci tangan pakai sabun; (iii) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (iv) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (v) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman. $P.LSL = \frac{JRISL}{JRIS} \times 100\%$
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Rasio Elektrifikasi (%)	Statistik Ketenagalist rikan, Kementerian ESDM	Perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. $RE = \frac{RTE}{RT} \times 100\%$
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Per Kapita (Harga Konstan 2016) (juta rupiah)	SUSENAS	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. $PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$
		Tingkat pengangguran dengan kriteria jam	SUSENAS	Tingkat setengah pengangguran adalah tingkat pengangguran di

		kerja <35 (%)		<p>mana yang bekerja dengan jam kerja < 35 jam dalam satu minggu. Mereka yang tergolong setengah pengangguran ini adalah yang masih mencari pekerjaan lain atau bersedia menerima pekerjaan yang tersedia meski jam kerja tidak penuh. Penghitungan tingkat setengah pengangguran dinyatakan dalam persen (%)</p> <p><small>Tingkat Setengah Pengangguran = $\frac{A+B}{A+B+C} \times 100\%$</small></p>
		Penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak pelatihan (%)	SUSENAS	<p>Persentase usia muda (15-24 thn) sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. (NEET) diperoleh membagi jumlah akumulasi usia muda berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 thn) dikalikan 100%</p> <p><small>NEET = $\frac{A+B+C}{A+B+C+D} \times 100\%$ NEET = jumlah penduduk usia 15-24 tahun / 100%</small></p>
		Penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak (%)	SAKERNAS	<p>Persentase dari penduduk usia 5-14 thn termasuk dalam kategori pekerja anak diperoleh dengan membagi jumlah anak usia 5-14</p>

				thn yang tercatat merupakan pekerja anak pada seminggu terakhir terhadap jumlah populasi anak umur 5-17 thn
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang (% dari Total Panjang Jalan)	Kementerian PUPR	<p>Kondisi jalan kualitas baik dan sedang merupakan persentase panjang jalan nasional yang memenuhi kategori baik dan sedang, terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan memadai bagi kendaraan untuk dilalui kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.</p> $K\%MN = \frac{P\%JN}{TP\%JN} \times 100\%$
		Rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (%)	BPS	Internet atau interconnected network adalah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer atau perangkat elektronik lainnya, seperti telepon seluler, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital,

				<p>dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global.</p> <p><small>UIN Ar-Raniry, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 1-10</small></p>
10	berkurangnya Kesenjangan	Rasio gini	SUSENAS	<p>Indeks Gini atau Koefisien Gini yaitu indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan sama). Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Koefisien Gini diupayakan mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p> <p><small>Koefisien Gini = $1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i^2}{(\sum_{i=1}^n P_i)^2}$</small></p>
		Rasio palma	SUSENAS	Rasio Palma untuk mengukur

				<p>angka ketimpangan pendapatan perekonomian. Rasio ini mengukur rasio pendapatan 10% masyarakat tertinggi dengan pendapatan 40% masyarakat terendah. Berguna mengukur ketimpangan dengan lebih akurat. Saat tidak ada pertumbuhan ekonomi namun bagian pendapatan 10% masyarakat tertinggi meningkat lebih besar dibandingkan pendapatan 40% masyarakat terbawah, maka rasio ketimpangan akan naik sementara kelas menengah tidak mengalami perubahan.</p>
		<p>Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah</p>	<p>SUSENAS</p>	<p>Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk.</p>

11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sederhana sehat (%)	SUSENAS	Persentase rumah tangga yang memenuhi spesifikasi Rumah Sederhana Sehat adalah proporsi rumah tangga yang memiliki rumah dengan klasifikasi minimum Rumah Sederhana Sehat (RSS) terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Klasifikasi Rumah Sederhana Sehat yaitu 1) Luas ruang per orang 9m ² ; 2) Dinding terbuat dari conblock/batu bata; 3) Atap terbuat dari seng/asbes; 4) Memiliki toilet dengan jenis toilet leher angsa; 5) Lantai terbuat dari beton.
		Rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (%)	SUSENAS	Persentase rumah tangga kota yang memiliki akses dengan jaringan air ledeng, terhadap total rumah tangga kota.
		Rata-rata partikulat (PM10)	Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rata-rata partikulat PM10 adalah rata-rata partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer).
12	Konsumsi dan Produksi	Rumah tangga	BPS	Perbandingan jumlah rumah

	yang Bertanggung Jawab	dengan perilaku memilah sampah (%)		tangga yang memilah sampah dengan jumlah rumah tangga di suatu wilayah. $\% gbg = \frac{\sum Rgbg}{\sum RT} \times 100$
13	Penanganan Perubahan Iklim	Emisi CO2 per kapita (tCO2/kapita)	BPS	Perkiraan emisi CO2 yang dihitung adalah emisi CO2 dari bahan bakar memasak, emisi CO2 dari kendaraan bermotor emisi CO2 yang berasal dari kegiatan pembangkitan Listrik oleh PLN. Emisi CO2 dari bahan bakar memasak dan kendaraan bermotor. Emisi CO2 dari kegiatan pembangkitan listrik dihitung dari penggunaan bahan bakar di pembangkit listrik PLN di propinsi Indonesia. <small>Emisi CO2 pembangkitan Listrik</small>
14	Ekosistem laut	Area keanekaragaman hayati laut yang dilindungi (% luas perairan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase wilayah ekosistem laut dan pesisir yang dilindungi dari luas wilayah perairan tiap provinsi di Indonesia. Wilayah ekosistem laut dan pesisir bersumber dari database KKP

				<p>2015 yang memiliki informasi luas wilayah daerah konservasi: Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Alam Perairan, Cagar Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Taman Wisata Perairan, Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Taman Nasional Perairan. Luas perairan laut provinsi diukur berdasarkan UU No. 23/2014 yang mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p><small>1. Ditinjau dari segi pengelolaan: sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan, Kelautan dan Perikanan No. 1/2006</small></p>
15	Ekosistem Daratan	Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan (%)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas Penutupan Lahan Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+ (ribu Ha), 2009-2010 dan 2011-2012.

				<p style="text-align: right;"><small>© 2014, Direktorat Jenderal Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</small></p> <p>Luas area konservasi yang dilindungi bersumber dari statistik lingkungan hidup, area konservasi yang dihitung merupakan penjumlahan dari luas konservasi daratan yang meliputi: Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional. Area konservasi yang dilindungi merupakan persentase dari luas wilayah provinsi,</p> <p style="text-align: right;"><small>© 2014, Direktorat Jenderal Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</small></p>
		Area konservasi yang dilindungi (% luas wilayah)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Persentase lahan kritis terhadap luas wilayah (%)	BPS	<p>Persentase lahan kritis adalah proporsi lahan yang termasuk ke dalam kategori kritis dan sangat kritis terhadap luas wilayah. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim</p>

				Tahun 2013 tentang tata tertib <small>Revisi Tahun 2013, 10.000 an/Kab. 000/10.000</small>
		Anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran (%)	SUSENAS	Akta kelahiran adalah surat yang menandakan bukti kelahiran seseorang dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil daerah. <small>Revisi Tahun 2013, 10.000 an/Kab. 000/10.000</small>

Sumber: (Kementerian PPN/Bappenas)

Daftar Pustaka

- Ait-Kadi, M. 2016. Water for development and development for water: realizing the sustainable development goals (SDGs) vision. *Aquatic Procedia*, 6, 106-110.
- Alisjahbana, A. S. 2017. *Menyongsong SDGs: kesiapan daerah-daerah di Indonesia*. Unpad Press.
- Butlin, J. 1989. Our common future. By World commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp. 383£ 5.95.).
- Byrch, C., Kearins, K., Milne, M., & Morgan, R. Sustainable 'What'? A Cognitive Mapping Approach to Understanding Sustainable Development.
- Cao, Z., Wu, Z., Liu, L., Chen, Y., & Zou, Y. 2019. Assessing the relationship between anthropogenic heat release warming and building characteristics in Guangzhou: A sustainable development perspective. *Science of the Total Environment*, 695, 133759.
- Crals, E., & Vereeck, L. 2005. The affordability of sustainable entrepreneurship certification for SMEs. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 12, 173-183.
- Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. 2011. The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. *Sustainable development*, 19(5), 289-300.
- Do, X. S., & Thomas, D. E. C. 2017. Urbanization and Urban design in sustainable development. Case study of the ToLich River regions in Hanoi. *UPLand-Journal of Urban Planning, Landscape & environmental Design*, 2(2), 37-52.
- Emas, R. 2015. The concept of sustainable development: definition and defining principles. *Brief for GSDR, 2015*.

- Garg, A. 2015. Green marketing for sustainable development: an industry perspective. *Sustainable Development*, 23(5), 301-316.
- Gast, J., Gundolf, K., & Cesinger, B. 2017. Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions. *Journal of Cleaner Production*, 147, 44-56.
- Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. 2005. Sustainable development: mapping different approaches. *Sustainable development*, 13(1), 38-52.
- Kushwaha, G. S., & Sharma, N. K. 2016. Green initiatives: a step towards sustainable development and firm's performance in the automobile industry. *Journal of cleaner production*, 121, 116-129.
- Lotfi, M., Yousefi, A., & Jafari, S. 2018. The effect of emerging green market on green entrepreneurship and sustainable development in knowledge-based companies. *Sustainability*, 10 (7), 2308.
- Pesqueux, Y. 2009. Sustainable development: a vague and ambiguous "theory". *Society and Business Review*.
- Rees W. 1995. Achieving Sustainability: Reform or Transformation? *Journal of Planning Literature* 9: 343-361
- Sachs, J. D. 2015. *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Statistik, B. P. 2016. Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.
- Stoddart, H. 2011. A Pocket guide to sustainable development governance. Stakeholder Forum.
- Weisenborn, G. 2018. United Nations Sustainable Development Goals.

Tentang Penulis



Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si., merupakan dosen FEB Universitas Muhammadiyah Bandung. Menyelesaikan program S1 dan S2 di Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran. Saat ini adalah kandidat Doktor bidang Sustainability pada Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran.

BAB 13

PERBANKAN DI INDONESIA DI MASA KRISIS

*Ni Wayan Novi Budiasni, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja*

Fungsi intermediasi merupakan fungsi vital. Fungsi tersebut diemban oleh sektor perbankan. Hembusan napas perekonomian nasional sangat bergantung pada sektor ini. Sebab, sektor perbankanlah yang mendukung pelaku bisnis selaku tokoh penting penggerak ekonomi Indonesia. Ekonomi nasional tidak akan terpisahkan dengan sektor perbankan. Ketahuilah, kondisi sektor perbankan suatu negara merupakan indikator kestabilan ekonomi negara. Penting bagi suatu negara untuk memperhatikan secara khusus sektor perbankan di saat kondisi ekonomi mengalami guncangan. Berikut dibahas kondisi dan langkah strategis ketika perbankan berada pada pusaran krisis ekonomi.

A. Definisi Bank

Bank bukanlah kata yang asing lagi bagi kita. Ketika mendengarkan kata “Bank” yang terbayangkan dalam benak ialah uang dan sekumpulan hiruk pikuk transaksinya. Tentunya bayangan tersebut sangat tepat, karena bank memang merupakan lembaga keuangan yang terfokus pada penyediaan jasa keuangan. Seiring perkembangan, dari masa ke masa, kini bank menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat. Sangat penting untuk diketahui bahwa, bank berasal dari Bahasa Italia “*Banco*” yang berarti bangku. Bank identik dengan kata bangku karena saat melaksanakan pelayanan nasabah atau aktivitas operasional bank pasti bankir menggunakan bangku. Hingga pada akhirnya, istilah bangku resmi dipopulerkan menjadi *Bank* (Hasibuan,2004).

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah (Kasmir,2015):

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak.

Sesuai dengan definisi tersebut, perbankan memiliki 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu

1. Menghimpun dana (*funding*) masyarakat dalam bentuk simpanan. Sehingga bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang aman oleh masyarakat. Selain keamanan, terdapat keuntungan bunga yang diperoleh masyarakat dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan.
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pinjaman atau kredit diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa bank lainnya (*services*), contohnya transfer uang, *clearing*, inkaso, *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque*, dan jasa lainnya (Kasmir, 2004).

Bank juga dikatakan memiliki fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Sangat penting meningkatkan kinerja perbankan nasional guna memperkuat sektor perekonomian nasional (Arthesa & Handiman, 2009).

B. Fungsi dan Peran Bank Bagi Perekonomian Nasional

Sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar bagi perekonomian suatu masyarakat. Ketika tingkat bunga kredit tinggi dan jumlah dana yang tersedia terbatas untuk memfasilitasi aktivitas produksi atau penyediaan jasa, maka akan berdampak buruk pada kelancaran aktivitas perekonomian. Terpuruknya perekonomian tentunya berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Pemahaman tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa, sistem keuangan merupakan bagian integral bagi

perekonomian suatu negara (Abdullah & Tantri, 2012). Di Indonesia, asas, fungsi dan tujuan lembaga perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 2 yang menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*)”. Asas demokrasi ekonomi yang dimaksudkan ialah setiap proses operasional perbankan mengutamakan kehati-hatian terhadap segala resiko (Arthesa & Handiman, 2009).

Tokoh terkemuka Indonesia Drs. Mohammad Hatta menyatakan negara yang tidak memiliki banyak bank dengan kualitas yang baik maka negara tersebut adalah negara terbelakang, sebab bank merupakan sendi kemajuan masyarakat pada suatu negara (Hasibuan,2004). Posisi bank berfungsi sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan atau menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau pemberi pinjaman (*severs/lenders*) kepada pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) tanpa perlu mengenal satu sama lain. Berikut pemaparan lebih rinci tentang fungsi perbankan:

1. Fungsi pembangunan (*development*), apabila sistem perbankan baik ketika menjalankan tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana, maka akan sangat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Hal penting yang perlu ditekankan ialah pola kerja perbankan nasional yang dituntut akomodatif terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional, sehingga pembangunan perekonomian dapat berjalan dengan baik.
2. Fungsi Pelayanan (*services*), jasa sebagai penyimpan dana dan pemberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan merupakan pelayanan utama oleh bank. *Service excellence* atau pelayanan prima harus diterapkan oleh perbankan Di Indonesia guna memberikan kualitas pelayanan yang tinggi kepada nasabah. Pelayanan yang cepat dan kemudahan dalam bertransaksi sangatlah bermanfaat bagi perkembangan perekonomian dan masyarakat Indonesia.
3. Fungsi transmisi (*transmisi*), berkaitan tentang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan

instrumen keuangan yaitu uang giral risiko (Arthesa & Handiman, 2009).

Di Indonesia, industri perbankan menjadi sangat penting sebab budget pemerintah tidak mampu menutupi *saving-investment* layaknya tipikal negara berkembang. Adanya perbankan yang memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran dana sangat membantu proses pembangunan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan sangatlah penting dalam mendukung perekonomian negara berkembang (Sunarsip, 2003).

C. Pemicu Krisis Ekonomi Indonesia

Seorang ekonom yang bernama Krugman memiliki pandangan tersendiri tentang krisis ekonomi atau krisis moneter yang melanda Indonesia. Menurutnya, krisis yang terjadi Di Indonesia disebabkan oleh faktor domestik, misalnya praktik *crony capitalism* dan lemahnya struktur finansial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sedangkan seorang ekonom lainnya, ekonom Keynesian seperti Prof Kindlebeger krisis tersebut terjadi karena sentimen pasar finansial yang menyebabkan kepanikan dan berimbas pada sistem ekonomi nasional.

Berikut beberapa faktor yang dinilai memicu krisis moneter Di Indonesia:

1. Globalisasi ekonomi kapitalis. Dalam konteks ini, berlangsung proses internasionalisasi mata uang sejumlah negara besar dalam skala yang amat luas hingga menjalankan persaingan yang sangat kompetitif, sehingga imperialisasi dan supremasi kekuatan ekonomi industri negara-negara besar terhadap negara kecil sangat berpengaruh. Kondisi ini menyebabkan mata uang negara pemegang kendali globalisasi ekonomi dan industri dengan sendirinya menjadi alat transaksi internasional yang sangat dominan, dan dinamikanya sangat berpengaruh pada perekonomian dunia.
2. Fluktuasi pasar. Seiring dengan globalisasi kapitalis, uang tidak hanya sebagai instrumen transaksi melainkan barang fisik seperti sektor riil yang bisa diperjualbelikan setiap saat.

3. Peran spekulasi. Sebelum terjadinya krisis moneter di Asia, para spekulasi mengetahui bahwa banyak negara di Asia memiliki hutang jangka pendek luar negeri yang segera jatuh tempo. Para spekulasi berupaya merauk keuntungan dengan nilai jual tinggi atas kurs dolar yang sedang mereka butuhkan. Dengan memborongnya maka dolar AS menjadi langka dan nilai uang domestik menjadi terjungkal (Salamah, 2001).

Demikian kilas balik tentang krisis moneter yang sempat mengguncang Indonesia pada tahun 1997. Selain 3 (tiga) faktor eksternal tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang menimbulkan terjadinya krisis diantaranya:

1. Hiperinflasi

Kondisi ini terjadi akibat jumlah uang yang dicetak berlebih, kemudian memicu kenaikan harga yang tidak terkendali. Selanjutnya pemerintah menaikkan suku bunga hingga terjadi hiperinflasi.

2. Stagflasi

Negara mengalami stagflasi akibat tingkat inflasi yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dampak yang dirasakan negara tersebut hingga bertahun-tahun bahkan beberapa dekade.

3. Jatuhnya Pasar Saham

Kemerosotan yang dialami pasar saham disebabkan oleh krisisnya kepercayaan investor. Jika kondisi tersebut berlanjut, maka modal bisnis akan terkuras. Namun sebaliknya, apabila harga saham meningkat maka akan menimbulkan *crash* hingga penggunaan hutang margin yang berlebih.

4. Tingginya Suku Bunga

Suku bunga yang tinggi menyebabkan pembatasan likuiditas. Tingginya suku bunga menyebabkan daya beli atau konsumsi masyarakat cenderung menurun. Kondisi daya beli yang rendah dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu faktor pemicu krisis ekonomi pada suatu negara.

5. Menurunnya Pesanan terhadap Barang

Menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang berimbas pada jumlah produksi industri yang ikut menurun,

pendapatan industri menurun dan berimbas pula pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Apabila berlangsung lama, tentunya krisis ekonomi tidak bisa dihindari.

6. Deflasi

Deflasi merupakan kondisi harga barang dan jasa yang cenderung menurun, namun nilai uang bertambah. Hal ini disebabkan oleh jumlah uang yang beredar banyak, sehingga nilai mata uang mengalami penurunan. Salah satu akibat yang ditimbulkan ialah sulitnya lapangan pekerjaan dan daya beli yang menurun.

7. Perubahan Kebijakan atau Deregulasi

Situasi terjatuhnya suatu perekonomian negara juga dapat disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan kebijakan. Keputusan menambahkan atau mengurangi suatu aturan cenderung menjerumuskan perekonomian negara. Pengambilan keputusan yang tepat dan hati-hati sangat berpengaruh pada kelangsungan ekonomi.

8. Manajemen yang Buruk

Demi kelancaran usaha, pada umumnya perusahaan akan mengajukan pinjaman kepada bank. Pada tahap ini, bank dituntut teliti dan selektif dalam menentukan kelayakan pinjaman dan meloloskan pinjaman. Kegiatan bisnis yang ilegal dan meragukan tentunya dapat membahayakan kondisi perekonomian negara.

9. Turunnya Harga dan Penjualan Properti

Penurunan pembelian properti disebabkan oleh berkurangnya kemampuan pembeli atau masyarakat dalam mengambil hutang hipotek. Situasi ini berdampak pada penurunan uang yang dimiliki oleh bank, apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama, situasi ini bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi (SimulasiKredit.com,2021).

D. Pandemi Covid-19 Sebabkan Krisis Ekonomi

Dampak luar biasa (*extraordinary*) disebabkan oleh adanya *Corona Virus Disease* yang muncul pada tahun 2019 pertama kali di Kota Wuhan, China Tengah. Upaya penanggulangan wabah Covid-19 menyebabkan pembatasan mobilitas dan kegiatan ekonomi yang memicu ketidakpastian pasar keuangan maupun perekonomian dunia. Berbagai upaya dilakukan, misalnya penerapan protokol kesehatan hingga pembatasan mobilitas antar wilayah maupun negara. Namun, kebijakan tersebut berdampak buruk pada penurunan konsumsi, produksi, dan investasi. Terganggunya perdagangan internasional turut memperburuk keadaan ekonomi global. Dampak yang signifikan juga dirasakan pada sektor pariwisata. Penekanan dan pembatasan mobilitas antarnegara berimbas buruk pada penurunan aktivitas sektor pariwisata. Kondisi yang serba sulit tersebut semakin mengikis kepercayaan konsumen dan dunia usaha. Penilaian yang cenderung timbul ialah tentang rendahnya prospek ekonomi (bi.go.id,2020).

Setelah 24 tahun bangkit dari krisis moneter yang sempat menerjang Negara Indonesia, dan krisis pada tahun 2008, kini Indonesia kembali berjuang bangkit dari koyakan Covid-19 yang mengguncang ekonomi global (Pink & Santoso, 2021). Selain krisis ekonomi, Indonesia juga merasakan krisis kesehatan. Hingga kini di akhir Bulan Juli 2021 sudah 3 juta jiwa yang terinfeksi virus ini. Bahkan pandemi Covid-19 dinilai sebagai penyebab terburuk yang membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Pada tahun 2020, pertumbuhan perekonomian domestik minus 2,07% dan kondisi ini merupakan kondisi terparah sejak 1998. Banyak sektor ekonomi yang semakin melemah, termasuk sektor manufaktur dan perdagangan. Hanya sektor pertanian yang minim dampak (Merdeka.com, 2021).

Menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mencapai 5.3%. Kajian koordinator perekonomian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan mengalami penurunan 0,1% sampai 0,3 %

dalam waktu 6 bulan. Melemahnya sektor pariwisata pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang bersumber dari APBN demi mendongkrak industri pariwisata (Kompaspedia.com,2020).

E. Situasi Perbankan Saat Krisis Ekonomi

Ketika kondisi ekonomi Indonesia mengalami gejala, terutama pada sektor keuangan dan perbankan, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada perbankan dan nasabah. Kebijakan ini diberlakukan agar kualitas aset perbankan terjaga karena kredit yang direstrukturisasi secara otomatis masuk kategori lancar. Restrukturisasi diberlakukan dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (Kontan.co.id,2020). Perbankan sangatlah penting bagi laju ekonomi suatu negara. Terlebih ketika kondisi ekonomi membutuhkan rangsangan untuk tetap bertahan. Pada kondisi pandemi, para ekonom dan pengamat ekonomi meyakini bahwa, titik bangkit ekonomi Indonesia berada pada sektor keuangan dan perbankan (Michelle, 2021).

Perbankan nasional salah satu sektor yang terguncang akibat gejala nilai tukar dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang melemah menyebabkan kesulitan likuiditas perbankan. Kondisi pelik lain seperti lemahnya kondisi perbankan nasional, lemahnya manajemen, konsentrasi kredit yang berlebih, *moral hazard*, serta kurangnya transparansi informasi keuangan bank turut memperburuk kondisi perbankan nasional. Berbagai program kesehatan ekonomi ditempuh guna memulihkan situasi ekonomi nasional. Berbagai kebijakan penyehatan ekonomi pada bidang moneter, perbankan dan fiskal maupun sektor riil penting untuk dilaksanakan. Langkah moneter melalui intervensi pada pasar uang dan pasar valuta asing ditempuh guna menekan laju inflasi nilai tukar. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam meningkatkan

ketahanan ekonomi masyarakat. Bank Indonesia berupaya mengurangi kontraksi ekonomi dengan kebijakan kredit melalui Penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) secara selektif memberikan dukungan pada penyediaan pangan, pengembangan usaha kecil dan koperasi. Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga menjadi pekerjaan yang rumit bagi Bank Indonesia. Program reformasi perbankan pun ditempuh guna memulihkan kepercayaan masyarakat, diantaranya:

1. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan
2. Penyempurnaan pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian guna memperbaiki kondisi internal perbankan
3. Memperkuat fungsi pengawasan perbankan dalam penegakan ketentuan dan undang-undang yang berlaku
4. Menyempurnakan perangkat hukum, meliputi RUU Perbankan dan pendirian asuransi lembaga pinjaman (Mariana, 2002).

Situasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan memicu penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran (*rush money*). *Rush money* berimplikasi kepada penurunan tingkat kecukupan likuiditas bank. *Rush money* dapat diminimalisasi apabila perbankan menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) yang baik dan sistem pelaporan keuangan dilaksanakan secara akuntabel (akuntabilitas) (Budiasni & Ayuni, 2021). Melalui penerapan SPI dan akuntabilitas yang baik masyarakat tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja perbankan (Sari & dkk, 2020).

Demikianlah perjuangan Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berangsur-angsur berhasil pulih. Namun bagaimana dengan kondisi kesehatan ekonomi saat ini yang sedang diserang pandemi Covid-19? Jika dilakukan perbandingan situasi perbankan saat krisis moneter 1997-1998 dengan kondisi ekonomi akibat Covid-19, menurut Direktur Riset Center of Reform (Core) Indonesia Piter Abdullah, rasio kredit bermasalah NPL (*Not Performing Loan*) perbankan Indonesia masih berada di bawah 5%. Berbeda dengan kondisi pada tahun 1997-1998 di mana angka

rasio NPL mencapai 50%. Sehingga kondisi perbankan Indonesia di tengah-tengah pandemi masih stabil jika dibandingkan dengan situasi krisis moneter terdahulu (Wiratmini,2020). Meski dinyatakan dalam kondisi stabil, Pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan kepincangan bagi sektor perbankan di Indonesia. Risiko tersebut terjadi dikarenakan peran yang dimiliki sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Menanggapi risiko tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada sektor perbankan dengan menyediakan anggaran pada APBN tahun 2020 untuk menambah kemampuan likuiditas bank terutama bagi kredit yang akan jatuh tempo. Langkah awal turut ditempuh Bank Indonesia dengan membeli surat berharga jangka panjang bank konvensional dan memberikan dana likuiditas kepada perbankan (Suhartoko, 2020). Unsur penting yang perlu diminimalisasi ialah situasi yang memicu terjadinya *bank panic* atau *rush money*. Pengelolaan isu yang buruk dan merosotnya kepercayaan masyarakat menimbulkan kepanikan hingga terjadi penarikan dana/tabungan besar-besaran di bank. Kurangnya kehati-hatian akan menimbulkan dampak kecukupan likuiditas bank.

Daftar Pustaka

- 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Abdullah, Thamrin & Tantri, Francis. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arthesa, Ade & Handiman, Edia. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. INDEKS. Jakarta.
- Bi.go.id. 2020. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020. Tersedia pada link:
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf, Diakses pada tanggal 24 Juli 2021
- Budiasni, N.W.N & Ayuni, N.M.S. 2021. Accountability: Efforts to Prevent Rush Money at Village Credit Institutions in Buleleng Regency. *International Journal of Social Science and Business (IJSSB)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, No 2 (2021). Link doi: <http://dx.doi.org/10.23887/ijssb.v5i2.33623>
- Hasibuan, Malayu.S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Kontan.co.id. 2020. Core: Kondisi perbankan Indonesia saat ini masih cukup kuat. Tersedia pada link:
<https://keuangan.kontan.co.id/news/core-kondisi-perbankan-indonesia-saat-ini-masih-cukup-kuat>, diakses pada tanggal: 30 Juli 2021
- Mariana, Novita.2002. Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Upaya Menghadapi Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Dinamik*. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank. Edisi Mei 2002. Vol VII No. 2
- Merdeka.com. 2021. Menristek Bambang Sebut Covid-19 Jadi Krisis Ekonomi Terbesar yang Pernah Ada. Tersedia pada link:

<https://www.merdeka.com/uang/menristek-bambang-sebut-covid-19-jadi-krisis-ekonomi-terbesar-yang-pernah-ada.html>, Diakses pada tanggal: 24 Juli 2021

Michelle. 2021. Perbankan Bisa Jadi Penyelamat saat Krisis Ekonomi Imbas Pandemi. Tersedia pada link: <https://www.idxchannel.com/market-news/perbankan-bisa-jadi-penyelamat-saat-krisis-ekonomi-imbaspandemi>, diakses pada tanggal: 30 Juli 2021

Pink, Bidara & Santoso, I.Y. 2021. 24 Tahun Setelah Krismon 1998, RI Kini Berjuang Melawan Krisis Akibat Covid-19. Business Insight. Tersedia pada link: <https://insight.kontan.co.id/news/24-tahun-setelah-krismon-1998-ri-kini-berjuang-melawan-krisis-akibat-covid-19>, diakses pada tanggal: 24 Juli 2021

Salamah, Lilik. 2001. Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Vol. 14 / No. 2. Universitas Airlangga-Surabaya.

Sari, R. P., Mulyani, S. C., & Budiarto, S. D. 2020. Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*. Link doi: DOI: <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.69>

Suhartoko, Yohanes B. 2020. Bagaimana pandemi COVID-19 bisa memicu krisis perbankan di Indonesia. *Disiplin ilmiah. The Conversation*. Tersedia pada link: <https://theconversation.com/bagaimana-pandemi-covid-19-bisa-memicu-krisis-perbankan-di-indonesia-142559>, Diakses pada tanggal: 30 Juli 2021

SumilasiKredit.com. 2021. 9 Faktor Utama Penyebab Krisis Ekonomi. Tersedia pada link: <https://www.simulasikredit.com/9-faktor-utama-penyebab-krisis-ekonomi/>, Diakses pada tanggal: 23 Juli 2021

Sunarsip. 2003. Analisa atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia: Pendekatan Teori Polizatto dan

William E. Alexander”, Jurnal *Keuangan Publik*, Vol. 1/No. 1, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.

Wiratmini, N.P.E. 2020. Kondisi Perbankan saat Krisis 98 dengan Pandemi. Lebih Berat Mana? Tersedia pada link: <https://finansial.bisnis.com/read/20201119/90/1319692/kondisi-perbankan-saat-krisis-98-dengan-pandemi-lebih-berat-mana>, diakses pada tanggal: 31 Juli 2021

Tentang Penulis



Ni Wayan Novi Budiasni, S.E., M.M., Gianyar-Bali, 17 November 1993. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Dharma Singaraja-Bali. Sekolah Dasar Negeri 2 Melinggih Kelod Payangan, SMP Negeri 1 Payangan, SMA Negeri 1 Ubud-Gianyar Ilmu Pengetahuan Sosial. 2011 Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, 2015 Magister Manajemen di Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS). Buku dan Hak Kekayaan Intelektual: Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Di Bali.

EKONOMI PEMBANGUNAN

Sejarah ekonomi Indonesia sejarah hilangnya kesempatan, dalam catatan sejarah bahwa nasionalisme ekonomi Indonesia terdapat pada dua titik yang ekstrem, titik pertama adalah titik moderat, dimana pendukungnya berkeyakinan mengundang modal dan investasi asing masih diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, dan kutub ekstrem yang kedua adalah para nasionalis yang menekankan pentingnya memajukan bisnis para pengusaha pribumi, menasionalisasikan perusahaan asing sebagai upaya membebaskan diri dari kekangan imperialis, dan meningkatkan peranan perusahaan negara untuk membangun industri nasional.

Dalam membangun ekonomi Indonesia tidak lepas dari pembangunan industri dari struktur hingga kinerja dan daya saing, dalam meningkatkan daya saing industri perekonomian harus dapat menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan permintaan konsumen, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memberikan kesempatan bagi investasi asing maupun domestik.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Perumahan Gardena Maisa 2 Blok F03,
Koto Baru, Kec. Kubung, Solok
Email : penerbitbic@gmail.com
Website : www.insancendekiamandiri.co.id



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

